LAPORAN KAJIAN KEMISKINAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT



2024

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulilah, kami panjatkan rasa berterima kasih kepada sang pencipta Allah SWT, karena atas ridho dan rahmatnya, laporan kajian kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat dapat terlaksana dengan baik.
Kajian ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi masalah kemiskinan serta upaya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi guna memajukan daerah, daya saing, dan kesejahteraan masyarakatnya.

Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang paling kompleks dan menantang di dunia. Kemiskinan tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga keluarga, masyarakat, daerah, bahkan negara secara keseluruhan. Namun, dengan strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat dan efektif, kita dapat mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Strategi penanggulangan kemiskinan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Strategi ini harus berfokus pada pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan keterampilan dan kemampuan masyarakat.
Dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, kita dapat mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tim Penulis
Desember 2024

bappelitbangda

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Dafar Tabel iv
Daftar Grafik v
Daftar Gambar vi
Bab 1 Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Landasan Hukum 3
1.4. Ruang Lingkup 5
1.5. Metode Kegiatan 6
1.6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 8
1.7. Output Kegiatan 9

Bab II Tinjauan Pustaka 10
2.1. Konsep Kemiskinan 10
2.2. Jenis-Jenis Kemiskinan 13
2.3. Indikator Kemiskinan 15
2.4. Faktor-Faktor Timbulnya Kemiskinan 17
2.5. Upaya Penanggulangan Kemiskinan 26

Bab III Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat 30
3.1. Kondisi Geografis 30
3.2. Topografi 31
3.3. Kondisi Demografi 32
3.4. Kondisi Ketenagakerjaan 35
3.5. Kondisi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat 39

Bab 4 Gambaran Umum Masyarakat Kabupaten Bandung Barat 45
4.1. Gambaran Masyarakat Kecamatan Gunung Halu 45
4.2. Gambaran Masyarakat Sindangkerta 49
4.3. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cihampelas 54
4.4. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cililin 60
4.5. Gambaran Masyarakat Kecamatan Rongga 67
4.6. Gambaran Masyarakat Kecamatan Saguling 71
4.7. Gambaran Masyarakat Kecamatan Padalarang 76
4.8. Gambaran Masyarakat Kecamatan Ngamprah 80
4.9. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cisarua 84
4.10. Gambaran Masyarakat Kecamatan Lembang 95
4.11. Gambaran Masyarakat Kecamatan Parongpong 114
4.12. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cikalong Wetan 120

bappelitbangda

4.13. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cipendeuy 127
4.14. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cipatat 128
4.15. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cipongkor 131
4.16. Gambaran Masyarakat Kecamatan Batu Jajar 134
4.17 Permasalahan yang dihadapi masyarakat 139
4.18 Program yang diinginkan 145

Bab 5 Gambaran Umum Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat 148

Bab 6 Strategi Dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan 161
6.1. Penyebab Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat 161
6.2. Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat 166

Bab 7 Penutup 197

bappelitbangda

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 8
Tabel 3.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan penduduk, dan Distribusi Persentase, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 2024 32
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Umur 33
Tabel 3.3 Karakteristik Pengangguran di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2021-Agustus 2023 36
Tabel 3.4. Jumlah Individu Miskin di Bandung Barat 40
Tabel 3.5. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Bandung Barat 41
Tabel 3.6. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2023 42
Tabel 3.7. Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2023 43
Tabel 3.8. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut (wilayah) 2023 44
Tabel 5.1. Jumlah Rumah Tangga miskin yang bekerja sebagai Pekerja Lepas dan Belum Bekerja 149
Tabel 5.2. Karakteristik Masyarakat dan Wilayah Kabupaten Bandung Barat 151
Tabel 5.3. Masyarakat dengan Resiko Stunting berdasarkan Kecamatan 155
Tabel 5.4. Kondisi Rumah Keluarga Miskin di KBB 157
Tabel 5.5. Jumlah Siswa yang DO dan LTM di KBB 158
Tabel 5.6. Jumlah Siswa yang DO dan LTM di Tingkat SD 159
Tabel 5.7. Jumlah Siswa yang DO dan LTM di Tingkat SMP 159
Tabel 6.1. Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan 169
Tabel 6.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Secara Komprehensif 181
Tabel 6.3. Rencana Aksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan KBB 182

bappeltbangda

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Tingkat Pendidikan Penduduk 34
Grafik 3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bandung Barat 35
Grafik 3.3. Distribusi Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2023 37
Grafik 3.4. Persentase Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan Utama 38
Grafik 3.5. Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2021-Agustus 2023 39
Grafik 5.1. Rumah Tangga miskin berdasarkan Tingkat Pendidikan 148
Grafik 5.2. Rumah Tangga miskin berdasarkan Pekerjaan 149
Grafik 5.3. Resiko Stunting Masyarakat KBB 154
Grafik 5.4. Kepemilikan Rumah Masyarakat Miskin KBB 156

bappelitbangda

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Lingkaran Kemiskinan 19
Gambar 2.2. Kondisi Ketengakakerjaan di Indonesia Tahun 2021-2023 24
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat 31
Gambar 5.1. Penyebab Kemiskinan di KBB 160
Gambar 6.1. Lingkaran Kemiskinan Masyarakat KBB 162
Gambar 6.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Komprehensif di Kabupaten Bandung Barat 175

bappelitbangda

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah keadaan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, maupun lainnya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, yakni dihadapi oleh seluruh negara di berbagai belahan dunia. Pemahaman utama dari gambaran kemiskinan mencakup kekurangan materi dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pelayanan dasar. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan juga disebabkan oleh kurangnya penghasilan dan kekayaan yang kurang memadai.

Kebijakan pemerintah nasional terkait program penanggulangan kemiskinan yaitu dengan tetap melaksanakan program perlindungan sosial lebih bersasaran tapi masih bersifat reaktif, seperti program padat karya, raskin, bantuan kesehatan dan pendidikan untuk rumah tangga miskin. Semua program ditujukan untuk menjaga agar tingkat konsumsi rumah tangga miskin tidak mengalami penurunan. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, sebagai berikut :

- Unifikasi sistem penetapan sasaran nasional.
- Menyempurnakan pelaksanaan bantuan sosial kesehatan untuk keluarga miskin.
- Menyempurnakan pelaksanaan dan memperluas cakupan Program Keluarga Harapan.

- Integrasi program pemberdayaan masyarakat lainnya ke dalam PNPM.
- Mengembangkan peta jalan Sistem Keuangan Inklusif untuk percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 menurut data BPS sebanyak 183,7 ribu jiwa, urutan ke-5 angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Pada tahun 2023, angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 179,4 ribu jiwa dengan persentase angka kemiskinan sekitar 10,52% (namun tetap lebih tinggi dari pada persentase angka kemiskinan Jawa Barat yang sebesar 7,46%). Tingginya angka kemiskinan tersebut, diperlukan suatu perencanaan yang bertujuan mengupayakan penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi dan multisektoral. Hal ini bukan hanya menjadi tanggungjawab perangkat daerah tertentu melainkan tugas seluruh elemen di Kabupaten Bandung Barat termasuk pihak lain secara pentahelix seperti filantrofi bisnis, media, maupun lembaga pendidikan.

Upaya penanggulangan kemiskinan ditangani oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (TKPKD). Bagi TKPKD, TKPKD ini lah yang akan menjadi lokomotif dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Bagi TKPKD, perencanaan menjadi sebuah syarat penting agar upaya penanggulangan kemiskinan tersebut berjalan optimal. Program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui strategi dan program yang dijabarkan dalam dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah, dan strategi tersebut juga menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya kajian ini adalah untuk menyusun rencana penanggulangan kemiskinan yang akan menjadi pedoman bersama antara

bappelitbangda

pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat, sekaligus memberikan masukan dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mengetahui kondisi umum dan karakteristik serta faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat
2. Memberikan informasi bagi pengambilan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat;
3. Merumuskan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat .

1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum upaya Penanggulangan Kemiskinan Daerah mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

bappelitbangda

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

bappelitbangda

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794).

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini, meliputi :

1. Mendeskripsikan kondisi eksisting kemiskinan Kabupaten Bandung Barat
2. Mengidentifikasi faktor-faktor determinan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat
3. Menjaring aspirasi masyarakat tentang program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan

bappelitbangda

4. Menganalisis peran dan hubungan kerja multisektor dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat
5. Menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat

1.5. Metode Kegiatan

Dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan data/informasi, penelitian ini menggunakan teknik *Rapid Rural Appraisal* (RRA), namun tetap melibatkan partisipasi masyarakat dalam membantu analisis keadaan dan penilaian kebutuhan secara cepat. Teknik RRA ini juga difasilitasi oleh orang luar yang berfungsi sebagai "narasumber" atau fasilitator. *Rapid Rural Appraisal* (RRA) merupakan suatu tehnik penilaian yang menggabungkan beberapa tehnik yang terdiri dari:

a. Review/telaahan data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapang secara ringkas.
b. Observasi/ pengamatan lapang secara langsung.
c. Wawancara dengan informan kunci maupun masyarakat
d. Pemetaan dan pembuatan diagram/grafik.
e. analisis keadaan dan Kecenderungan-kecenderungan.
f. Pengisian kuesioner sederhana yang singkat,
g. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat dihandalkan (dapat dilaksanakan, efisien, dan diterima oleh sistem sosial masyarakat).
h. Merinci keberadaan *stakeholders* dan peran yang diharapkan dari para pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program/kegiatan yang akan diusulkan.
i. Analisis data (secara kualitatif) atas hasil diskusi, dan
j. Pembuatan laporan lapangan secara cepat.

bappelitbangda

Dalam mengumpulkan data untuk analisis keadaan dan pemilihan alternatif pemecahan masalah, peneliti juga melibatkan masyarakat setempat dengan melakukan diskusi yang terarah di 5 wilayah kecamatan utama (kantong kemiskinan) yaitu Kecamatan Cikalong Wetan, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Gununghalu, serta 1 kecamatan yang berkarakter perbatasan desa-kota, yakni Kecamatan Cipatat. Adapun masyarakat yang akan dilibatkan dalam menganalisis keadaan dan pemilihan alternatif pemecahan masalah, sebanyak 100 orang.

Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok yang Terarah juga dilakukan digunakan sebagai tehnik wawancara pada penelitian kualitatif yang berupa “in depth interview” kepada sekelompok informan secara terfokus. Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok yang Terarah dilakukan untuk mengevaluasi perencanaan dan program yang pernah dilakukan, serta menentukan tindak lanjut perbaikan perencanaan dan program pe ke depan. Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok yang Terarah ini melibatkan berbagai perangkat daerah dan para pemangku kepentingan yang diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman mereka tentang program penanggulangan kemiskinan yang diikuti dan atau dicermatinya.

Kegiatan penelitian menjadi bahan penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan partisipatif. Partisipasi merupakan pendekatan yang paling demokratis dan efektif untuk mewujudkan suatu tujuan pembangunan dengan cara mengadopsi strategi yang memungkinkan dan prinsip-prinsip kemitraan/partisipasi (UNCHS,1996:9). Partisipasi (dalam terminologi UNHCS disebut sebagai forum konsultasi warga) yang merupakan platform bagi semua stakeholder guna mendiskusikan berbagai isu dan menghasilkan konsensus terkait

bappelitbangda

prioritasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Pada upaya penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat, perlu diketahui lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif sehingga mampu menggerakan masyarakat, menggali modal sosial (*social capital*) masyarakat, serta mendiskusikan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan, serta upaya kemitraan masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan kelompok peduli setempat.

Pelaksanaan penelitian dengan metode-metode tersebut untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah secara partisipatif, dalam arti bahwa dalam sebuah kondisi dimana masyarakat diperlukan yang memainkan peran kunci dan memiliki informasi yang relevan tentang sistem sosial (komunitas), diharapkan masyarakat yang terlibat dapat berpartisipasi dalam rancangan dan implementasi rencana aksi.

1.6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pekerjaan Kajian Identifikasi Masalah Kemiskinan dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Minggu					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Persiapan						
2.	Koordinasi dengan lembaga /perangkat daerah terkait						
3.	Pengumpulan data						
4.	Pengolahan data						

bappelitbangda

5.	Penyusunan kajian						
6.	Pelaporan						

1.7. Output Kegiatan

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen laporan pendahuluan, dokumen laporan akhir, executive summary, policy brief dan poster.

bappelitbangda

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik (PBB, 1996). Definisi yang lebih lengkap lagi, dikemukakan oleh Cahyat (2007:4), yang berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.

Menurut Adisasmita (2006: 144) indikator kemiskinan masyarakat desa yaitu:

1. kurang kesempatan memperoleh pendidikan,
2. memiliki lahan dan modal pertanian yang terbatas,
3. tidak adanya kesempatan menikmati investasi di sektor pertanian,
4. tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar (pangan, papan, perumahan,
5. menggunakan cara-cara pertanian tradisional,
6. kurangnya produktivitas usaha,
7. tidak adanya tabungan,
8. kesehatan yang kurang terjamin,
9. tidak memiliki asuransi dan jaminan sosial,

bappelitbangda

10. terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa,
11. tidak memiliki akses untuk memperoleh air bersih, dan
12. tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya (Suharto, 2005). Menurut Kartasasmita (1996), konsep kemiskinan berdasarkan pola waktu, yaitu:

a. kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun, pada umumnya terdapat pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang kritis atau daerah yang terisolasi (*persistent poverty*)
b. kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan (*cyclical poverty*);
c. kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan (*seasonal poverty*);
d. kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (*accidental poverty*).

Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi di mana individu atau kelompok mengalami kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak mampu mendapatkan perawatan medis saat sakit, tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya, dan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini menyebabkan mereka merasa cemas menghadapi masa depan, bahkan mengalami kehilangan anggota keluarga akibat penyakit yang tidak terjangkau biaya pengobatannya. Secara umum, kemiskinan

bappelitbangda

mencerminkan ketidakberdayaan, keterpinggiran, serta kurangnya kebebasan dalam menjalani hidup. (Arsad, 2016), hal senada disampaikan oleh Bappenas (2005), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain :

1. Terpenuhnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
2. Terdapat pada lingkungan yang aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan
3. Adanya hak dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik

Merujuk dalam pengertian di atas tentang kemiskinan, Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar yang penting bagi kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan yang bermartabat, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya alam serta lingkungan yang layak. Selain itu, kemiskinan juga mencerminkan ketidakmampuan untuk menikmati hak-hak dasar lainnya, seperti kehidupan yang aman, bebas dari ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Secara keseluruhan, kemiskinan menciptakan keterpinggiran dan ketidakberdayaan, yang menghambat individu atau kelompok untuk berkembang dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Kemudian Badan Pusat Statistik mendefinisikan bahwa nilai standar kebutuhan minimum makanan ditinjau pada harga dan tingkat konsumsi dari 52 jenis bahan makanan dengan batas kecukupan energi 2.100 kalori/kapita /hari, sedangkan non makanan terdiri dari 27 paket komoditi untuk perkotaan dan 25 komoditi untuk perdesaan yang mewakili pola konsumsi penduduk

bappelitbangda

kelas bawah, sesuai batas kecukupan non makanan ditetapkan sebesar nilai rupiah yang dikeluarkan oleh penduduk kelas bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum non makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan aneka barang jasa lainnya (Badan Pusat Stastistik-SU, 1999).

2.2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Beberapa pengertian tentang kemiskinan dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Kemiskinan absolut dapat diukur dengan cara membandingkan pendapatan seseorang dengan jumlah pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Garis batas antara kondisi miskin dan tidak miskin ditentukan oleh tingkat pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan fisik dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Konsep ini bertujuan untuk menetapkan pendapatan minimum yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup individu, dan sering kali disebut sebagai garis kemiskinan.
2. Kemiskinan relatif merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi pendapatan tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar hidup masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini, meskipun mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, mereka tetap dianggap miskin karena ketimpangan yang ada antara pendapatan mereka dengan pendapatan rata-rata masyarakat sekitar.
3. Kemiskinan struktural adalah kondisi di mana suatu kelompok masyarakat menderita kemiskinan akibat struktur sosial yang ada,

bappelitbangda

yang menghalangi mereka untuk mengakses atau memanfaatkan sumber daya ekonomi yang seharusnya tersedia bagi mereka. Dalam konteks ini, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya atau kesempatan ekonomi menjadi penyebab utama kesulitan yang dihadapi oleh kelompok tersebut. (Arsyad, 2016)

Selanjutnya para ahli juga mendefinisikan macam-macam kemiskinan menjadi kemiskinan subjektif dan objektif, Dimana, kemiskinan subjektif merujuk pada kondisi kemiskinan yang bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan jumlah harta yang dimiliki atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial. Jenis kemiskinan ini lebih berhubungan dengan perasaan individu. Seseorang dianggap miskin jika ia merasa demikian, dan dianggap kaya jika ia merasa cukup, meskipun orang lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Dalam hal ini, meskipun seseorang memiliki sedikit harta, jika ia merasa sudah mencukupi kebutuhannya, ia dapat dianggap kaya. Sebaliknya, meskipun seseorang memiliki banyak harta, jika ia merasa kebutuhannya belum terpenuhi, maka ia bisa dianggap miskin.

Kemudian Kemiskinan objektif merujuk pada bentuk kemiskinan yang dapat dianalisis secara nyata karena merupakan fenomena sosial yang terlihat jelas. Jenis kemiskinan ini terkait dengan persepsi masyarakat secara umum. Artinya, seseorang dianggap miskin karena mayoritas orang melihatnya sebagai individu yang kekurangan, dan seseorang dianggap kaya karena masyarakat luas menganggapnya memiliki kekayaan. (Rosyidi, 2011)

Berpijak dalam teori di atas tentang macam-macam kemiskinan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan subjektif dan kemiskinan objektif. Kemiskinan subjektif lebih bersifat pribadi, di mana seseorang merasa miskin atau

bappelitbangda

kaya berdasarkan persepsinya sendiri, terlepas dari jumlah harta atau kemampuan finansial yang dimilikinya. Sebaliknya, kemiskinan objektif merupakan bentuk kemiskinan yang dapat diamati dan dianalisis secara nyata sebagai fenomena sosial, di mana seseorang dianggap miskin atau kaya berdasarkan pandangan masyarakat umum terhadap kondisi mereka. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan aspek material, tetapi juga dengan persepsi individu maupun kolektif.

Menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi kedalam kategori berikut :

1. kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
3. kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

2.3. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan sering diartikan sebagai kondisi di mana pendapatan individu atau kelompok tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di

bappelitbangda

Indonesia, pengukuran kemiskinan dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs). Dalam pendekatan ini, terdapat tiga indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemiskinan, yaitu: (1) headcount index, (2) indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index), dan (3) indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index). Headcount index digunakan untuk mengukur kebutuhan absolut yang mencakup dua komponen utama, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non-makanan (*non-food line*) (Yacoub, 2012)

Kemudian ukuran kemiskinan yang dijadikan sebagai dasar pengukuran oleh BPS adalah Pendekatan kemiskinan absolut diidentifikasi dengan mengukur jumlah individu yang memiliki pendapatan per kapita di bawah tingkat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini mencakup konsumsi barang dan jasa yang setara dengan 20 kilogram beras per kapita per bulan di wilayah pedesaan, 30 kilogram beras per kapita per bulan di wilayah perkotaan, serta kebutuhan energi sebesar 2.100 kilokalori per hari. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan sebagai bagian dari perhitungan. (Nurwati, 2008)

Kemudian BPS mendefinisikan untuk klister dari kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) mengukur rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan semakin besar rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index)* memberikan informasi tentang distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Ketika nilai indeks ini meningkat, hal tersebut mencerminkan semakin besar ketimpangan pengeluaran di kelompok penduduk miskin. Indikator kemiskinan menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan evaluasi upaya pengentasan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan dan organisasi.

bappelitbangda

2.4. Faktor-Faktor Timbulnya Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan sulit diatasi, karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari kenyataan bahwa sebagian besar tindak kejahatan memiliki kaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kemiskinan. Contohnya, kejahatan seperti pencurian dan perampokan berhubungan langsung dengan kondisi kemiskinan, sementara masalah seperti pengangguran dan kesehatan yang buruk, beserta dampaknya, terkait secara tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan yang layak dan asupan gizi yang memadai. Kemiskinan adalah salah satu isu mendasar yang menjadi fokus perhatian pemerintah, dengan upaya untuk mengentaskannya menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, keluarga yang tergolong miskin biasanya tinggal di wilayah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian atau aktivitas lain yang berkaitan dengan sektor tersebut. (Annur, 2013)

Selanjutnya (Tulus, 1997) dalam (Annur, 2013) menyatakan bahwa Kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, upah kerja yang tidak memadai, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kurangnya peluang kerja, kualitas sumber daya alam yang belum optimal, penggunaan teknologi yang terbatas, rendahnya etos kerja dan motivasi tenaga kerja, tradisi budaya tertentu, serta kondisi politik yang belum stabil. Semua faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga sulit untuk menentukan faktor utama atau membedakan pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kemiskinan. Faktor-faktor tersebut menciptakan sebuah lingkaran setan yang memperumit upaya untuk mengatasi kemiskinan.

bappelitbangda

Menurut Chamsyah (2008) penyebab kemiskinan adalah berupa:

a. hubungan-hubungan kompleks antara individu yang hidup dengan daya lemah dalam suatu tradisi keluarga,
b. masyarakat yang hidup dalam ruang struktur sosial (negara) yang rumit dan menganut sistem modern dalam cara produksinya. Individu sebagai penyebab kemiskinan menempati posisi pertama dalam kondisi kurang kesejahteraan ini. Keluarga sebagai penyebab lain hanya institusi sosial terkecil yang terlemahkan oleh struktur sosial yang merupakan penyebab struktural kemiskinan.

Penyebab kemiskinan menurut Suharto (2005) yaitu:

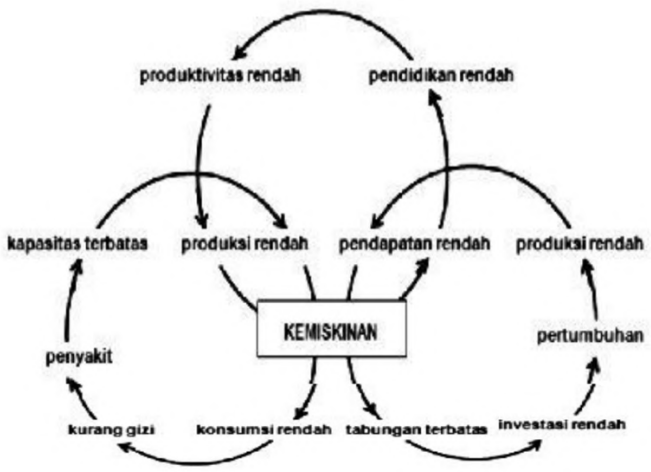
1. Faktor Individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis individu yang miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari individu yang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupan;
2. Faktor Sosial, kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga individu yang miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi;
3. Faktor Kultural, Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan budaya kemiskinan dengan kebiasaan hidup. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan tersendiri, yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan (Suharto, 2008b). Sikap-sikap “negatif” seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang

bappelitbangda

menghormati etos kerja, misalnya, sering ditemukan pada orang-orang miskin;

4. Faktor Struktural, berkaitan dengan struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neolibiralisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

Penyebab-penyebab tersebut menjadi acuan dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Menurut Nuscheler dalam Munkner (2001), penyebab utama kemiskinan dalam bentuk lingkaran-lingkaran kemiskinan yang terdiri dari tiga pola yang tidak ada ujungnya sebagai berikut:



Gambar 2.1. Lingkaran Kemiskinan (Nuscheler dalam Munkner, 2001)

bapelitbangda

Menurut Munkner dan Walter (2001), kemiskinan ditimbulkan oleh faktor-faktor penyebab dan dimensi-dimensi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung apakah kelompok yang miskin tinggal di perdesaan atau di perkotaan, dan apakah mereka hidup dalam struktur keluarga kecil, keluarga inti atau seorang diri. Beberapa sudut pandang tentang penyebab kemiskinan, yaitu :

1. apabila rendahnya sumber daya dan persyaratan-persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan dipandang sebagai penyebab utama kemiskinan, maka peningkatan produktivitas, akses ke pasar, harga yang wajar untuk produk-produk yang dihasilkan oleh kaum miskin merupakan langkah yang tepat dalam memberantas kemiskinan;
2. apabila buruknya kondisi lingkungan alam dipandang sebagai penyebab krusial dari meluasnya kemiskinan, maka penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan praktik-praktik yang berorientasi ekologis merupakan jalan keluarnya;
3. apabila rendahnya tingkat pengetahuan dan akses kepada informasi, pendidikan, pelatihan dan bimbingan sebagai penyebab kemiskinan, maka pengembangan sumber daya manusia menjadi cara untuk mengatasi kemiskinan.

Merujuk secara teoritis (Tulus, 1997) dalam (Annur, 2013), salah satu penyebab terjadinya kemeskinan adalah :

- **Rendahnya Pendidikan**

Pendidikan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki peluang pendapatan yang lebih besar, sehingga dapat membantu mereka mengatasi kondisi kemiskinan (Susanto & Pangesti, 2019)

bappelitbangda

Tingkat pendidikan yang rendah seringkali berdampak pada rendahnya produktivitas. Kondisi ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana individu dengan pendidikan yang kurang memadai kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga penghasilan mereka tetap rendah dan mereka terus berada dalam kondisi kemiskinan. Anyak orang dari keluarga kurang mampu tidak memiliki akses ke pendidikan yang bermutu akibat tingginya biaya dan keterbatasan sumber daya. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah.

Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah sering kali tidak memiliki keterampilan yang diperlukan di dunia kerja, sehingga sulit bersaing dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan terdidik. Hal ini berkontribusi pada tingginya angka pengangguran di kelompok tersebut. Selain itu, rendahnya pendidikan juga memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan secara umum. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai sering menghadapi masalah gizi dan kesehatan, yang pada akhirnya menghambat kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang secara optimal. (Maharani et al., 2024).

Berpijak dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu, terutama dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan peluang kerja yang layak. Rendahnya tingkat pendidikan tidak hanya menghambat produktivitas dan penghasilan, tetapi juga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama bagi keluarga kurang mampu, memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, rendahnya pendidikan turut memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, yang pada akhirnya menghambat kemampuan mereka untuk berkembang secara optimal.

bappelitbangda

Oleh karena itu, pendidikan yang inklusif dan terjangkau menjadi kunci dalam memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- **Rendahnya Etos Kerja dan Motivasi Tenaga Kerja**

Etos Kerja Menurut Max Weber sebagaimana dikutip oleh (Dhaniswara K. Haryono, 217) dalam (Salma et al., 2019) menyatakan bahwa Sikap masyarakat terhadap makna kerja berperan sebagai pendorong keberhasilan usaha dan pembangunan. Etos kerja, yang merupakan fenomena sosiologis, terbentuk melalui hubungan produktif yang muncul dari struktur ekonomi dalam masyarakat. Etos kerja dibagi menjadi dua jenis, yaitu etos kerja rajin dan etos kerja malas. Etos kerja rajin mengacu pada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan tekun, sedangkan etos kerja malas merujuk pada hal-hal yang menghambat kesuksesan individu. Etos kerja dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti akumulasi modal, ekspresi keagamaan, jaringan sosial, dan pemanfaatan waktu luang. Akumulasi modal atau investasi merupakan elemen penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang membutuhkan modal secara berkelanjutan untuk mencapai pembangunan yang stabil.

Berpijak dalam teori diatas dapat disimpulkan bahwa Ketika tenaga kerja kurang memiliki motivasi, mereka cenderung enggan untuk meningkatkan keterampilan atau mencari peluang baru. Akibatnya, pendapatan mereka tetap stagnan dan mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Sebaliknya, tenaga kerja yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih berupaya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan penghasilan mereka, sehingga yang mempunyai perilaku malas serta etos kerja kurang mengakibatkan kemiskinan karena sulit berkembang.

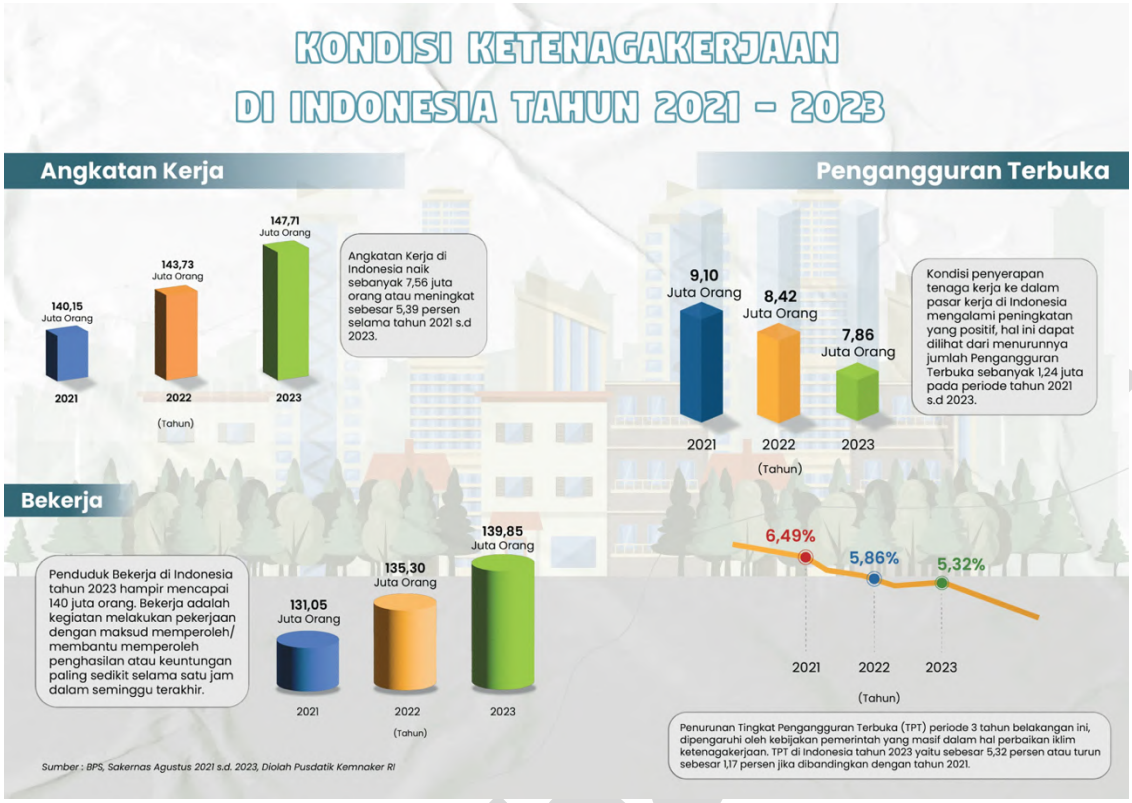
bappelitbangda

- **Ketenagakerjaan**

Persoalan ketenagakerjaan adalah isu yang sangat relevan dan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini bahkan dapat memicu munculnya tantangan baru baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran berkontribusi pada rendahnya pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya menjadi penyebab utama kemiskinan. Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kesempatan kerja meliputi pertumbuhan jumlah penduduk dan tenaga kerja, laju pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan yang mendukung perluasan kesempatan kerja. Tenaga kerja, sebagai salah satu faktor produksi utama selain sumber daya alam, modal, dan teknologi, memiliki peranan penting dalam pembangunan, yaitu sebagai aktor utama dalam proses pembangunan tersebut. (Yacoub, 2012). Hal ini memberikan gambabaran bahwa Tingkat pengangguran yang tinggi dan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak membuat banyak orang tetap terjebak dalam kemiskinan. Ketiadaan pekerjaan menyebabkan individu tidak memiliki sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya memperburuk situasi ekonomi keluarga.

Hal ini tercermin dari begitu besarnya tingkat pencari kerja dengan ketersediaan lahan pekerjaan di Indonesia, berikut adalah gambar terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia.

bappelitbangda



Gambar 2.2. Kondisi Ketengakakerjaan di Indonesia Tahun 2021-2023
Sumber : https://satudata.kemnaker.go.id/infografik/59

Berdasarkan gambar di atas bahwa angkatan kerja di Indonesia menunjukkan peningkatan dari 140,15 juta orang pada tahun 2021 menjadi 147,71 juta orang pada tahun 2023. Ini berarti terdapat kenaikan sebanyak 7,56 juta orang atau sebesar 5,39% selama periode tersebut. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah individu yang aktif di pasar kerja, yang bisa dipengaruhi oleh peningkatan populasi usia kerja atau kebijakan yang mendorong partisipasi kerja. Jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan, dari 131,05 juta orang pada tahun 2021 menjadi 139,85 juta orang pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa mayoritas tambahan angkatan kerja berhasil diserap oleh pasar kerja, yang mencerminkan perbaikan dalam penciptaan

bappelitbang

lapangan kerja. Pekerja mendekati angka 140 juta pada 2023, yang menunjukkan bahwa pasar kerja mampu menyesuaikan diri dengan pertumbuhan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan dari 9,10 juta orang pada tahun 2021 menjadi 7,86 juta orang pada tahun 2023, turun sebesar 1,24 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan signifikan dari 6,49% pada 2021 menjadi 5,32% pada 2023, turun sebesar 1,17%. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih baik telah memberikan hasil positif.

Hal tersebut di atas menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam memastikan semua penduduk usia kerja memiliki akses ke pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kemiskinan dapat di tekan.

- **Keterbatasan Modal**

Keterbatasan modal merupakan realitas yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, yang berkontribusi pada kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar masyarakatnya. Individu menjadi miskin karena tidak memiliki modal untuk melengkapi peralatan atau bahan yang diperlukan guna memanfaatkan keterampilan mereka dalam upaya memperoleh pendapatan. Di negara-negara berkembang, keterbatasan modal ini sering digambarkan sebagai lingkaran tak berujung, baik dari sisi permintaan maupun penawaran modal.

Yustika, 2013, dalam (Pujiharto, 2021) menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi dan sosial dianggap sebagai bagian yang saling berkaitan dalam kerangka pembangunan nasional. Oleh karena itu, modal sosial memiliki peran yang setara dengan jenis modal lainnya dalam mendukung pembangunan nasional. Berbeda dengan dua jenis modal

bappelitbangda

yang telah lebih dahulu dikenal dalam ilmu sosial, yaitu modal ekonomi (financial capital) dan modal manusia (human capital), modal sosial hanya dapat berfungsi ketika terintegrasi dengan struktur sosial yang ada.

- **Terbatasnya Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam bukanlah hasil dari pilihan atau buatan manusia, melainkan telah tersedia di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, tanah yang subur atau kaya akan bahan tambang tidak tercipta karena kehendak manusia. Jika sumber daya alam bisa dibuat oleh seseorang atau suatu bangsa, negara-negara yang kekurangan sumber daya alam pasti akan berupaya menciptakannya. Sumber daya alam sering menjadi salah satu indikator kekayaan suatu negara atau bangsa. Namun, memiliki banyak sumber daya alam tidak otomatis membuat sebuah bangsa lebih sejahtera. Hal ini bergantung pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola. Pengelolaan yang buruk tidak hanya mengurangi manfaatnya tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya tersebut sehingga tidak bisa diwariskan kepada generasi mendatang. (Mawardi dan Nur Hidayati, 2020).

Ketika sumberdaya alam ini tidak dikelola dengan baik, maka sumberdaya alam akan habis mengakibatkan Masyarakat tidak bisa menggunakan sumberdaya alam, dan terjadilah pengangguran yang akan berdampak pada kemiskinan.

2.5. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan dianggap sebagai tantangan yang dihadapi oleh banyak negara, dan berbagai upaya yang telah dilakukan sejauh ini terbukti belum berhasil sepenuhnya mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, persoalan ini mendorong masyarakat global untuk berkolaborasi dalam penanggulangan

bappelitbangda

kemiskinan melalui partisipasi aktif setiap negara dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana salah satu tujuan utamanya adalah menghapus kemiskinan. Konsep SDGs merupakan kelanjutan dari gerakan sebelumnya, yaitu Millenium Development Goals (MDGs). Menurut The Smeru Institute (2017), “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diakui sebagai agenda pembangunan global dengan mandat yang lebih luas dan inklusif dibandingkan dengan Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015.” Dengan penerapan gerakan pembaharuan melalui SDGs, diharapkan setiap negara dapat lebih fokus dan terkoordinasi dalam mengatasi kemiskinan. (Rasdi & Kurniawan, 2019).

Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Program pemerintah yang umum dilakukan untuk menangani kemiskinan antara lain adalah program bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Program bantuan sosial bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, sedangkan program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat miskin agar dapat mandiri secara ekonomi. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas umum seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik.

Peran sektor swasta juga penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sektor swasta dapat berperan melalui investasi sosial, seperti program tanggung jawab sosial perusahaan dan filantropi. Investasi sosial dilakukan dengan memanfaatkan perusahaan swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Contohnya adalah membangun sekolah atau rumah sakit di daerah miskin. Filantropi juga dapat dilakukan dengan memberikan sumbangan dari individu atau lembaga swasta untuk mendukung program pengentasan kemiskinan,

bappelitbangda

seperti sumbangan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, atau organisasi sosial.

Kemudian (Wilopo, 2018) dalam , (Rasdi & Kurniawan, 2019), menyebutkan bahwa Salah satu jenis kemitraan yang dikenal adalah konsep *Triple Helix*, yang melibatkan interaksi antara tiga aktor utama: akademisi, industri, dan pemerintah. Konsep ini sering disebut sebagai ABG (Academic, Business, and Government). Dalam konteks pembangunan, masing-masing aktor memiliki peran penting yang saling melengkapi. Kolaborasi sinergis antara ketiga sektor ini menjadi prinsip generatif dalam membangun ekonomi berbasis pengetahuan, yang memungkinkan terciptanya integrasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Peran masyarakat juga sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Organisasi masyarakat sipil (OMS) seperti LSM, yayasan, dan organisasi berbasis masyarakat dapat mengorganisir masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial, termasuk kemiskinan. Gerakan sosial juga dapat dimobilisasi oleh masyarakat untuk melakukan aksi sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, seperti aksi penggalangan dana dan kampanye penyadaran.

Faktor transformasi dengan menggunakan digitalisasi semua layanan menjadi suatu keharusan dan keniscayaan, hal ini agar semua akses layanan kepada Masyarakat dapat dengan mudak diakses serta dimanfaatkan, seperti layanan job fair yang disediakan oleh intansi-intansi harus terkoordinir oleh perangkat daerah yang bertugas, atas layanan lainnya yang berpeluang untuk menurunkan angka kemiskinan atau bahakan mengentaskan kemiskinan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penanggulangan kemiskinan masih menjadi tantangan besar. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain adalah kesenjangan yang semakin besar, perubahan iklim, globalisasi, birokrasi, dan kurangnya koordinasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan terpadu di mana semua pihak yang terkait harus bekerja sama secara sinergis dalam upaya penanggulangan

bappelitbangda

kemiskinan. Fokus juga harus diberikan pada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan taraf hidup mereka. Evaluasi yang berkesinambungan juga penting dilakukan untuk memastikan efektivitas dari program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan.

bappelitbangda

BAB III
GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

3.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 1287,41 km2. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Bandung Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, Kab. Subang, Purwakarta, dan Kota Cimahi. Batas wiayah tersebut, mencakup :

Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon (Kabupaten Cianjur); Kecamatan Maniis, Darang, Bojong, dan Kecamatan Wanayasa (Kab. Purwakarta); Kec. Sagalaherang, Jalancagak, Cisalak (Kab. Subang), dan Kab. Sumedang;

Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang, Kec. Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang (Kabupaten Bandung); Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari (Kota Bandung); Kec. Cimahi Utara, Kec. Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan (Kota Cimahi);

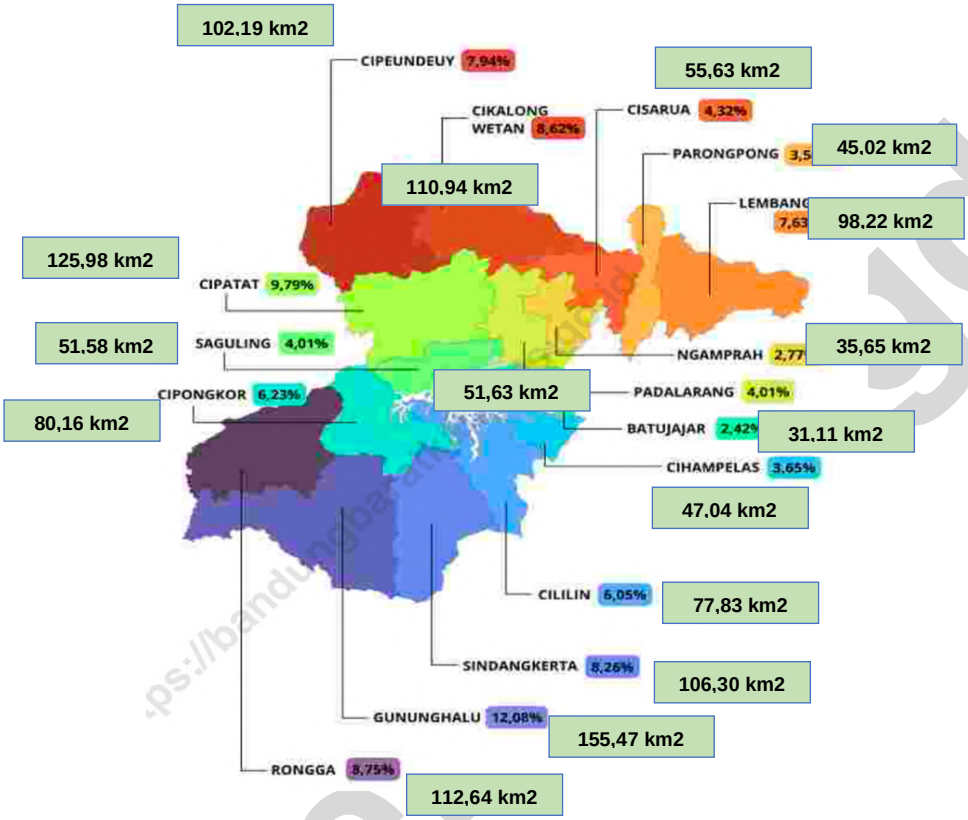
Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ciwidey dan Rancabali (Kabupaten Bandung); Kecamatan Pagelaran (Kabupaten Cianjur); dan

Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Mande (Kabupaten Cianjur).

Cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat, meliputi 16 (enam belas) kecamatan, yang terdiri dari Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, Saguling, Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor,

bappelitbangda

Cipeundeuy, Lembang, Sindangkerta, Cihampelas dan Rongga. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gunung Halu, dan luas terkecil adalah Kecamatan Batu Jajar. Jumlah total desa seluruhnya di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 165 desa.



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat
Sumber : Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2024

3.2. Topografi

Dari segi permukaan wilayah, sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh pegunungan yang potensial untuk pengembangan wisata alam dan agrowisata. Terdapat beberapa daerah dataran yang umumnya terletak di bagian selatan, cocok untuk pemukiman dan kegiatan pertanian. Dilihat dari sisi penggunaan lahan di wilayah

bappeda

Kabupaten Bandung Barat, penggunaan lahan untuk budidaya pertanian merupakan penggunaan lahan terbesar yaitu 66.500,294 HA, sedangkan yang termasuk kawasan lindung seluas 50.150,928 HA, budidaya non pertanian seluas 12.159,151 HA dan lainnya seluas 1.768,654 HA. Luas wilayah lindung di daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan isu kawasan bandung utara, disamping itu dilihat dari kondisi fisik geografis posisi wilayah Kabupaten Bandung Barat dinilai kurang menguntungkan, hal ini dikarenakan terdiri dari banyak cekungan yang berbukit-bukit dan di daerah-daerah tertentu sangat rawan dengan bencana alam.

3.3. Kondisi Demografi

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, Indikator Strategis 2023 Kabupaten Bandung Barat, memiliki jumlah penduduk 1,859 juta jiwa dengan persentase penduduk miskin sebanyak 10,52% ; Tingkat Pengangguran Terbuka 8,11% ; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,33. Dalam data Penduduk, Laju Pertumbuhan penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang dipublikasikan pada Februari 2024 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat menyebutkan laju pertumbuhan di KBB terdapat diangka 1,43 ; dengan Kepadatan Penduduk per km persegi (KM2) adalah 1445 ; dan Rasio Jenis Kelamin 104. Dengan detail sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan penduduk, dan Distribusi Persentase, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan	Persentase	Kepadatan Penduduk
Rongga	63	1.36	3,39	559
Gungnghalu	81,8	1.17	4,40	526
Sindangkerta	76,6	1,55	4,12	721
Cililin	99,4	1,48	5,34	1.277

kpoelitbangda

Cihampelas	141,5	2,38	7,61	3.009
Cipongkor	104,9	1,76	5,64	1.309
Batujajar	113,6	1,92	6,11	3.652
Saguling	35,6	1,92	1,92	691
Cipatat	145,6	1,34	7,83	1.155
Padalarang	187,7	1,26	10,09	3.636
Ngamprah	183,3	1,14	9,86	5.142
Parongpong	116,7	1,17	6,27	2.592
Lembang	203,2	1,02	10,93	2.069
Cisarua	82,3	1,43	4,43	1.479
Cikalong Wetan	133,1	1,40	7,16	1.200
Cipeundeuy	91,4	1,36	4,91	894
Total Penduduk Bandung Barat	**1.859,6**	**1,43**	**100**	**1.445**

Sumber: BPS, Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024

Penduduk Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni dengan jumlah 1 juta penduduk berusia antara 15 hingga 49 tahun. Dengan rasio kelamin hampir seimbang, dengan jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu 51% laki-laki dan 49% perempuan. Berikut adalah rincian penduduk berdasarkan kelompok umur:

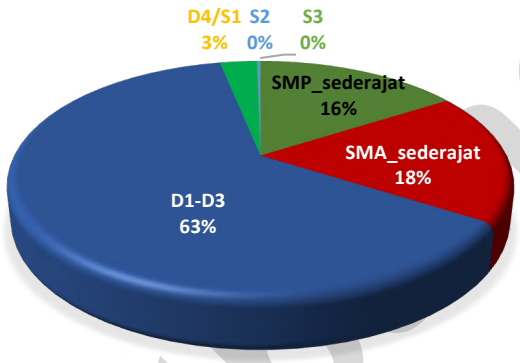
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Umur

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	78197	74881	153078
5-9	75268	71620	146888
10-14	76919	72738	149657
15-19	80707	75761	156468
20-24	81491	75664	157155
25-29	78298	73555	151853
30-34	73877	71658	145535
35-39	70168	68162	138330
40-44	69502	67535	137037

kapelitbangda

45-49	64142	62860	127002
50-54	55954	55388	111342
55-59	46646	45193	91839
60-64	37174	35695	72869
65-69	26759	25819	52578
70-74	17686	17876	35562
75+	15257	17186	32443
Jumlah Total	**948045**	**911591**	**1859636**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2024



Grafik 3.1. Tingkat Pendidikan Penduduk

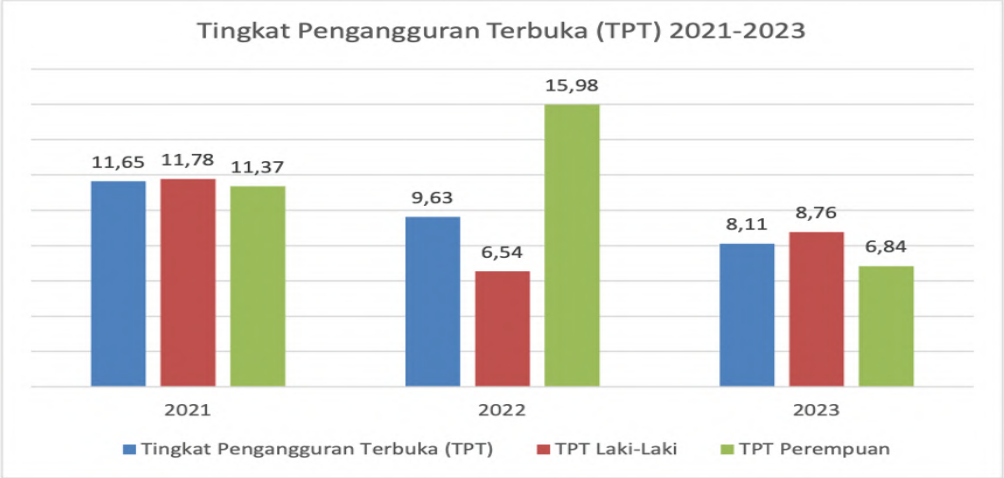
Berdasarkan data dari BPS, pendidikan penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2022, sebagian besar jenjang Diploma 3, hanya sebagian kecil yang berpendidikan D4/S1, S2 dan S3[1]. Data kependudukan berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dilihat pada grafik berikut.

[1] https://opendata.bandungbaratkab.go.id/dataset/jumlah-penduduk-menurut-tingkat-pendidikan-yang-ditamatkan-per-kecamatan-di-kabupaten-bandung-barat, diakses tanggal 7 September 2024

bappelitbangda

3.4. Kondisi Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2023 yang diselenggarakan oleh BPS[2] , Tingkat Pengangguran Terbuka per Agustus 2023 sebesar 8,11 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,52 poin dibandingkan tahun sebelumnya (sebesar 9,63% tahun 2022).



Grafik 3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bandung Barat
Sumber : Berita Resmi Statistika No. 01/12/3217/Th.II, 21 Desember 2023

Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 8,76 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,84 persen. Jika dibandingkan Agustus 2022, TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 2,22 persen poin sedangkan perempuan mengalami penurunan, sebesar 9,14 persen poin.

---

2 https://bandungbaratkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/01/05/1585/keadaan-ketenagakerjaan-bandung-barat-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--agustus-2023-turun-sebesar-1-52-persen-poin.html

bappeliti

Tabel 3.3 Karakteristik Pengangguran di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2021-Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Agt 2021–Agt 2022	Perubahan Agt 2022–Agt 2023
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	11,65	9,63	8,11	-2,02	-1,52
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	11,78	6,54	8,76	-5,24	2,22
- Perempuan	11,37	15,98	6,84	4,61	-9,14

Sumber : Berita Resmi Statistika No. 01/12/3217/Th.II, 21 Desember 2023

Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 1.413.347 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 947.124 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 466.223 orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 870.269 orang penduduk yang bekerja dan 76.855 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 129.630 orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 17,5 persen, sementara pengangguran turun sebanyak 2.065 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 67,01 persen, naik 2,64 persen poin dibandingkan Agustus 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 87,72 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 45,55 persen. Jika dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan

bappelitbangda

sebesar 2,24 persen poin (dari 85,48 persen menjadi 87,72 persen) dan yang perempuan mengalami kenaikan sebesar 2,84 persen poin (dari 42,71 persen menjadi 45,55 persen).

Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor jasa sebesar 49,47 persen; sektor manufaktur sebesar 31,51 persen; dan Pertanian sebesar 19,02 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2022.

Dibandingkan Agustus 2022, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah lapangan pekerjaan sektor jasa (92.296 orang), sektor manufaktur (24.255 orang) dan sektor pertanian (13.079 orang)

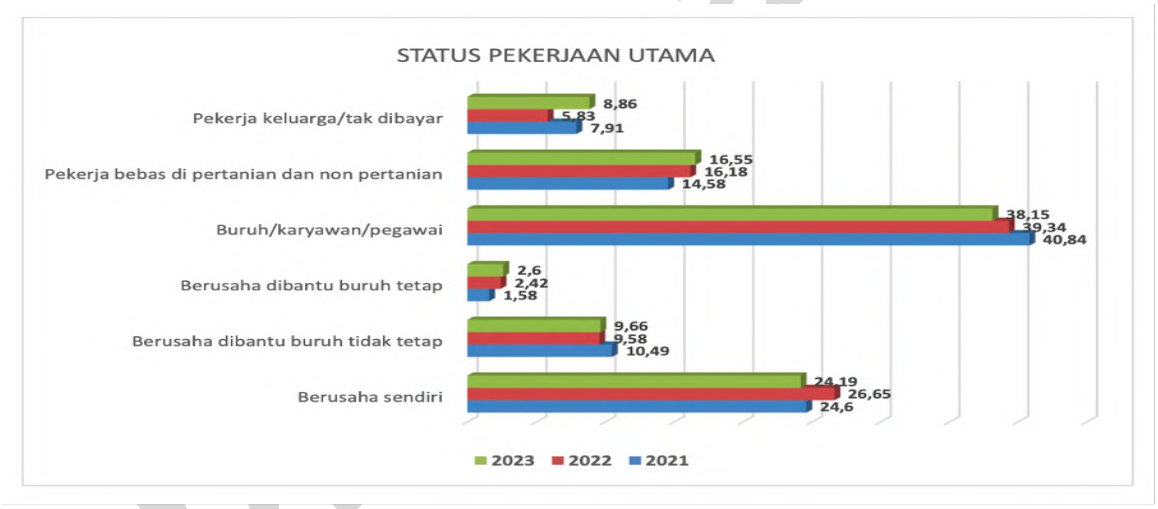


Grafik 3.3. Distribusi Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2023
Sumber : Berita Resmi Statistika No. 01/12/3217/Th.II, 21 Desember 2023

Penduduk yang bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Pada Agustus 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 38,15 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 2,59 persen. Dibandingkan Agustus 2022, status pekerjaan yang mengalami kenaikan persentase terbesar adalah status pekerjakeluarga/tak dibayar yaitu sebesar 3,03 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

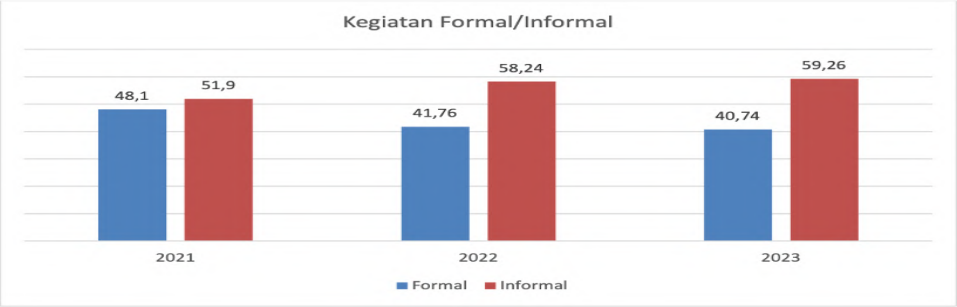


Grafik 3.4. Persentase Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan Utama

Sumber : Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2024

Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 515.696 orang (59,26 persen), sedangkan yang bekerja pada

kegiatan formal sebanyak 354.573 orang (40,74 persen). Dibandingkan Agustus 2022, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal mengalami kenaikan sebesar 84.324 orang



Grafik 3.5. Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2021-Agustus 2023

Sumber : Berita Resmi Statistika No. 01/12/3217/Th.II, 21 Desember 2023

3.5. Kondisi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Pada tahun 2024, masyarakat Kabupaten Bandung Barat termasuk pada urutan ke-22 daerah miskin dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Meskipun persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2023 persentase penduduk miskin 10,52%, pada tahun 2024 pesentase penduduk miskin di KBB menjadi 10,49%[3]. Pada tahun 2023, jumlah penduduk masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 179.430 ribu jiwa, dan pada tahun 2024, penduduk miskin di Bandung Barat menjadi 761.412 orang.

[3]sumber : https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg==/persentase-penduduk-miskin.html

bappelitbangda

Tabel 3.4. Jumlah Individu Miskin di Bandung Barat

No	Nama Kecamatan	Jumlah Individu (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
1	BATUJAJAR	5.538	8.400	6.932	8.327	29.197
2	CIHAMPELAS	17.578	18.726	13.650	13.299	63.253
3	CIKALONGWETAN	31.129	21.810	14.327	13.146	80.412
4	CILILIN	14.986	13.297	10.219	9.772	48.274
5	CIPATAT	15.736	15.463	11.875	12.523	55.597
6	CIPEUNDEUY	16.914	12.971	9.892	9.371	49.148
7	CIPONGKOR	29.392	18.490	11.472	10.463	69.817
8	CISARUA	7.211	8.434	6.690	7.691	30.026
9	GUNUNGHALU	22.988	15.054	9.555	8.491	56.088
10	LEMBANG	11.843	16.595	13.579	15.396	57.413
11	NGAMPRAH	9.849	12.264	9.938	11.327	43.378
12	PADALARANG	9.509	13.407	11.284	13.314	47.514
13	PARONGPONG	3.507	6.962	6.661	7.769	24.899
14	RONGGA	20.108	10.980	6.373	5.933	43.394
15	SAGULING	3.897	3.919	3.129	3.399	14.344
16	SINDANGKERTA	19.388	13.019	8.413	7.838	48.658
	TOTAL	**239.573**	**209.791**	**153.989**	**158.059**	**761.412**

Sumber : Dinas Sosial Bandung Barat, 2024

Angka dan jumlah masyarakat miskin sifatnya sangat dinamis, namun berdasarkan data September, jumlah masyarakat miskin Tahun 2024 berjumlah 761.412 orang atau 10,49%, dengan garis kemiskinan Rp426.355 per kapita per bulan atau nilai rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan selama sebulan.

Jumlah individu masyarakat yang termasuk kategori miskin terbanyak menurut kecamatan sebagai berikut :

1. Cikalong Wetan (80.412 jiwa),
2. Cipongkor (69.817 jiwa),
3. Cihampelas (63.253 jiwa),

bappelitbangda

4. Lembang (57.413 jiwa),
5. Gununghalu (56.088 jiwa)

Sedangkan masyarakat berdasarkan jumlah rumah tangga yang termasuk kategori miskin terbanyak menurut kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Bandung Barat

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
1	BATUJAJAR	1.100	1.925	1.686	2.372	7.083
2	CIHAMPELAS	3.616	4.460	3.547	4.095	15.718
3	CIKALONGWETAN	7.088	5.786	4.240	4.783	21.897
4	CILILIN	3.326	3.335	2.801	3.364	12.826
5	CIPATAT	3.455	3.900	3.194	4.238	14.787
6	CIPEUNDEUY	3.859	3.421	2.853	3.355	13.488
7	CIPONGKOR	6.276	4.831	3.359	3.932	18.398
8	CISARUA	1.673	2.171	1.868	2.462	8.174
9	GUNUNGHALU	5.534	4.446	3.210	3.683	16.873
10	LEMBANG	2.497	4.021	3.438	4.578	14.534
11	NGAMPRAH	2.011	2.884	2.534	3.314	10.743
12	PADALARANG	1.918	3.138	2.821	3.908	11.785
13	PARONGPONG	691	1.560	1.582	2.069	5.902
14	RONGGA	4.645	3.275	2.294	2.595	12.809
15	SAGULING	941	1.084	949	1.259	4.233
16	SINDANGKERTA	4.551	3.557	2.603	2.968	13.679
	TOTAL	**53.181**	**53.794**	**42.979**	**52.975**	**202.929**

Sumber : Dinas Sosial Bandung Barat, 2024

Jumlah rumah tangga yang termasuk kategori miskin terbanyak menurut kecamatan sebagai berikut :

1. Cikalong Wetan (21.897 RT)
2. Cipongkor (18.398 RT)
3. Gununghalu (16.873 RT)
4. Cihampelas (15.718 RT)

bappelitbangda

5. Cipatat (14.787 RT)

Kelompok miskin berdasarkan desil kewilayahan, maka kecamatan dengan RT desil 1 dan desil 2 terbanyak adalah Cikalong Wetan, Cipongkor, dan Gunung Halu. RT desil 3 terbanyak adalah Cikalong Wetan, Cihampelas, dan Lembang. RT desil 4 terbanyak adalah Cikalong Wetan, Lembang, dan Cipatat.

Kemiskinan ekstrem sendiri didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang setara dengan US$ 1,9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan konsep *absolute poverty measure* yang konsisten antar negara dan antar waktu. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, perlu peran pemerintah dalam percepatan Penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, maka tingkat kemiskinan di KBB berada di urutan 6 terbanyak masyarakat miskin dengan tingkat kemiskinan 10,52% dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat sebesar 7,62%.

Tabel 3.6. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2023

Tahun *Year*	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) *Poverty Line (rupiah/capita/month)*	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) *Number of Poor People (thousand)*	Persentase Penduduk Miskin *Percentage of Poor People*
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	294 823	192,48	11,71
2017	309 304	190,90	11,49
2018	329 415	169,00	10,06
2019	341 307	159,03	9,38
2020	362 212	179,46	10,49
2021	374 470	190,77	11,30
2022	393,956	183,67	10.82
2023	426 355	179,43	10,52

Catatan/*Note*: ...
Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/*BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey*

https://bandungbaratkab.bps.go.id

Indeks kedalaman kemiskinan yang diukur dari rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sebesar 1,54 persen. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan yaitu indeks yang mengukur penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin relatif kecil yaitu 0,34 % pada tahun 2023. Indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah KBB cukup berhasil dalam mengurangi ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan KBB tahun 2023 sebesar 0,34, yang mana pada tahun sebelumnya, 2022, sebesar 0,41. Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan selama sebulan sebagian besar relatif sama, yakni sebesar Rp426.355 per kapita per bulan.

Tabel 3.7. Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2023

Tahun *Year*	Indeks Kedalaman Kemiskinan *Poverty Gap Index*	Indeks Keparahan Kemiskinan *Poverty Severity Index*
(1)	(2)	(3)
2016	1,92	0,51
2017	2,32	0,71
2018	1,45	0,35
2019	1,54	0,33
2020	1,40	0,25
2021	1,62	0,32
2022	1,70	0,41
2023	1,54	0,34

Catatan/*Note*: ...
Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/*BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey*

s://bandungbaratkab.bps.go.id

Dari 179.430 jiwa masyarakat miskin di KBB, sebanyak 161.144 jiwa ditargetkan mendapat bantuan sebagai Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Anggaran Bantuan Sosial Pangan, dan terealisasi sebesar 98% atau sebanyak 158.386 KPM yang menerima manfaat Bantuan Sosial Pangan. Jumlah penduduk miskin yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan terbanyak di Kecamatan Lembang. Sedangkan penduduk miskin yang paling sedikit menerima bantuan merupakan penduduk di Kecamatan Saguling.

Tabel 3.8. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut (wilayah) 2023

Kecamatan *Sub District*	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) *Number of Beneficiary Family*	
	Rencana/ *Planning*	Realisasi/ *Realization*
(1)	(2)	(3)
Rongga	6974	6836
Gununghalu	6913	6711
Sindangkerta	7399	7201
Cililin	9793	9620
Cihampelas	11521	11382
Cipongkor	9504	9291
Batujajar	8873	8773
Saguling	3771	3669
Cipatat	15793	15569
Padalarang	13266	13073
Ngamprah	9241	9050
Parongpong	8038	7912
Lembang	17838	17627
Cisarua	7725	7645
Cikalong Wetan	13914	13577
Cipeundeuy	10581	10450
Bandung Barat	**161144**	**158386**

Sumber : Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024, BPS

bappeda

BAB 4
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT

4.1. Gambaran Masyarakat Kecamatan Gunung Halu

Pekerjaan masyarakat sehari-hari ada yang bertani baik padi maupn sayuran, 90% pekerjaan masyarakat pada pertanian sawah. Hasil pertanian ada yang dikonsumsi sendiri dan ada pula yang yang dijual ke daerah seperti Ciwidey dan Cianjur. Disamping bertani, masyarakat juga melakukan kegiatan perkebunan. Terdapat tiga lahan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, yaitu lahan milik Perhutani, Pekebunan Montoya, dan di tanah adat. Perkebunan yang banyak diusahakan masyarakat Gunung Halu adalah Teh, Kopi, dan Tembakau. Kopi yang dihasilkan ada dua jenis, yaitu kopi jenis arabica dan robusta. 90% masyarakat yang melakukan kegiatan perkebunan, dilakukan di lahan perhutani, sehingga ada kewajiban berbagi keuntungan, yang mana 15% keuntungan yang diperoleh petani, diberikan ke pihak pemilik lahan (Perhutani). Kopi Gunung Halu sebenarnya sudah mendunia, tetapi alat pengolahannya tidak memadai. Tidak adanya alat untuk mengolah kopi, banyak petani menjual kopi dalam bentuk biji kepada bandar, dengan harga yang murah.

Panen baik hasil pertanian padi sawah maupun perkebunan dilakukan paling banyak 2 kali setahun atau 1 kali setiap 6 bulan. Kendala pertanian diantaranya harga pupuk mahal, berbeda dengan daerah lain[4]. Meskipun ada

[4] Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan masyarakat Desa, pupuk di Gunung Halu mencapai 500 ribu, sedangkan di Ciwidey hanya 300 ribu

bappeltbangda

subsidi pupuk namun justru menambah beban petani, karena jarak yang harus ditempuh untuk memperoleh pupuk yang jauh sehingga memberatkan biaya ongkos petani ketika hendak membeli pupuk. Membeli pupuk harus ke pusat kecamatan, itupun kadang tersedia kadang tidak. Beda halnya sebelum ada program pupuk bersubsidi, petani bisa membeli dulu ke toko sekitar, kadang dapat dibayar secara kasbon. Pembelian pupuk bisa berjarak 6 Km[5].

Disamping masalah keterjangkauan mendapatkan pupuk, kendala pemasaran juga menjadi masalah yang dihadapi petani. Ketika membeli pupuk harganya mahal, ketika menjual hasilnya malah jadi murah, karena di jual ke bandar. Petani umumnya kekurangan modal, baik untuk membiayai usaha pertanian maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, tidak sedikit di antara mereka yang terjebak hutang pada Bank Keliling ataupun *Bank Emok*.

Untuk bidang perternakan dan pengembangan di sapi perah, masyarakat Gunung Halu dapat memerah susu sapi 2 kali dalam sehari. Peralatan angkut yang kurang memadai, susu sapi ketika hendak dikirim menjadi pecah, sehingga tidak layak dijual.

Lapangan pekerjaan selain bertani, masyarakat merantau keluar daerah. Bahkan lapangan pekerjaan untuk perkebunan mengalami pengurangan secara signifikan. Dulu, di PT Montoya (Perusahaan The di Gunung Halu), 1 mandor terdapat 40 pekerja, sekarang dengan penggunaan mesin, 1 mandor hanya 2 pekerja, sehingga lapangan pekerjaan di sektor perkebunan berkurang.

Kondisi infrastruktur terutama jalan desa belum bagus, disebabkan wilayah yang terlalu luas, sehingga anggaran pembangunan belum dapat

[5] Wawancara dengan kepala desa dan masyarakat Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung Halu

bappelitbangda

memenuhi kebutuhan pembenahan infrastruktur, disamping anggaran dana desa selama Covid terpangkas untuk kebutuhan bantuan masyarakat, sehingga pembenahan infrastruktur dari dana desa teralihkan.

Selama ini masyarakat mendapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) namun bantuan tersebut dianggap kurang efektif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, kurang memberdayakan masyarakat. Masyarakat lebih membutuhkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan sesuai dengan potensi desa masing-masing, sehingga masyarakat bisa mandiri dan tidak lagi tergantung pada bantuan pemerintah.

Tingkat pendidikan masyarakat sudah banyak yang lulusan SMA. Masyarakat yang lulus SMP atau SMA umumnya merantau keluar daerah menjadi kuli bangunan. Akses pendidikan SMP dan SMA pun terbilang jauh. Untuk pendidikan SD sudah banyak tersedia di Desa maupun PAUD. Anak putus sekolah juga banyak, sebagian besar tidak mampu, tidak memiliki kendaraan sendiri, dan tingginya biaya pendidikan sehari-hari. Meskipun ada bantuan dari pemerintah untuk bayaran (sekolah gratis), namun tetap tidak mempunyai uang untuk bekal jajan dan transport menuju ke sekolah. Masyarakat menganggap, lulus SMP atau SMA, hasilnya sama saja tetap jadi kuli bangunan.

Permasalahan kelembagaan desa selama ini, yang dialami adalah keberadaan BUMDES yang tidak optimal. Untuk itu diperlukan pembinaan BUMDES, termasuk pembinaan karakter dan manajemen usaha bagi pengurus BUMDES. Desa Sirnajaya misalnya, sudah mengeluarkan modal sebesar 120 juta untuk usaha kedai kopi, tapi modal tersebut tidak menunjukkan hasil apapun. Meskipun kedai kopi menunjukkan berkembang, tetapi modal dan keuntungannya dikuasai ketua BUMDES, sehingga

bappelitbangda

pemberian modal pada tahun 2023 dan 2024 tidak lagi dianggarkan sampai pengurus BUMDES memberikan rencana ajuan yang jelas berikut pertanggungjawabannya. Selama ini, setiap proposal usaha yang diajukan oleh BUMDES sudah mengikuti prosedur musyawarah desa dan mendapat persetujuan Kepala Desa, BPD (Badan Perwakilan Desa) dan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), hanya saja ketika modal sudah diberikan, dan tidak menunjukkan hasil, BUMDES suliit dimintai pertanggungjawaban. Karakter BUMDES harus terlebih dahulu dibina, sehingga jika setiap program pemerintah disalurkan melalui BUMDES, bantuan pemerintah tidak sia-sia.

Beberapa pelatihan yang diharapkan dapat memberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sesuai dengan potensi wilayah mereka. Program tersebut, diantaranya:

1. Pelatihan budidaya pertanian dan peternakan
2. Pelatihan menjahit dan Tata Rias
3. Pelatihan pengolahan kopi
4. Pelatihan sablon
5. Pembinaan organisasi bagi pengurus BUMDES dan pembinaan manajemen usaha BUMDES.

Kondisi kesehatan masyarakat. Pemenuhan gizi masyarakat sudah cukup baik, dengan jumlah stunting pun rendah. Masyarakat sangat sedikit yang memiliki penyakit berat. Namun di desa sistem pembuangan air limbah rumah tangga masih belum cukup memadai, yang menyebabkan banyak masyarakat mempunyai penyakit gatal-gatal (kapalan) dan sanitasi belum memadai. Bantuan pelita bening, yang menugaskan perangkat desa menyalurkan telur bagi masyarakat yang membutuhkan dianggap tidak efektif dan efisien, karena penyaluran pelita bening tidak disertai operasional

bappelitbangda

penyalurannya, hal ini menjadi problem bagi perangkat desa, harapan penyaluran telur tersebut dapat dibeli dari toko warga setempat. Akses kesehatan untuk beberapa desa sulit dijangkau, disamping jauh dan infrastruktur jalan yang buruk, akses infrastruktur jalan dan transportasi pun masih sangat terbatas.

Analisa Kemiskinan

1. Rendahnya pendidikan formal, menghasilkan SDM berpenghasilan rendah.
2. Minimnya pengetahuan dan ketrampilan bidang pertanian, peternakan, pariwisata, serta pemasaran produk.
3. Sempitnya lahan pekerjaan/kesempatan kerja
4. Kendala usaha karena keterbatasan modal
5. Kendala mobilitas karena infrastruktur dan kesulitan geografis (jauhnya akses ke pusat-pusat kegiatan ekonomi)
6. Rendahnya karakter dan kemampuan pengelolaan lembaga ekonomi desa (BUMDES)
7. Ketidakmampuan mencukupi kebutuhan non primer (perumahan, pendidikan, mobilitas, dan kebutuhan hidup lainnya)
8. Terbatasnya akses kesehatan

4.2. Gambaran Masyarakat Kecamatan Sindangkerta

Potensi alam yang ada di kecamatan Sindang Kerta, yaitu perkebunan teh dan kopi (kopi arabica) di Desa Mekarwangi, karena memiliki tanah dataran tinggi. Ada juga hasil produksi sayuran dan buah seperti jeruk, tomat dan sawi sebagai lapangan usaha, sumber penghasilan masyarakat.

Desa Buni Nagara memiliki potensi gula aren, madu tawon, dan kopi. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Sudah ada pembinaan untuk

bappelitbangda

sektor madu tawon dari Dinas Kehutanan provinsi, untuk kopi dalam proses kerjasama dengan salah satu perusahaan minuman olahan kopi[6], masih proses pengujian dan kelayakan kerjasama. Di Desa Buni Nagara ada potensi bank sampah Buni Asih yang mengelola sampah sehari-hari yang bisa di daur ulang dengan program sedekah sampah yang diinisiasi pesantren[7]. Bank Sampah ini sudah 1 tahun jalan yang dibentuk dari anggaran dana desa melalui Bumdes dengan modal sebesar 5 juta rupiah. Di antara 4 dusun baru ada 2 dusun terdapat tempat menghimpun sampah dengan ukuran 4x3 meter. Pengelolaan sampah ini baru sebatas sampah non organik, seperti kotak dus, gelas/botol air mineral, dan plastik yang bisa didaur ulang. Bank sampah ini bahkan sudah didukung oleh Perdes Bank Sampah. Sekarang sudah ada pelatihan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pelatihan mengelola pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat[8]. Kendala yang dihadapi yakni kekurangan peralatan (motor pengangkut sampah, bak sampah, dan alat-alat lainnya), serta masalah penjualan sampah. Saat ini, bank sampah masih menjual ke pengepul/calo sampah, namun belum mendapatkan informasi terkait pabrik yang menampung dan mengelola sampah agar harga jual lebih tinggi dibanding menjual ke calo/pengepul.

Talenta masyarakat Desa Buni Nagara adalah pertanian sawah dan kebun, talenta ini bersifat turun menurun. Masyarakat ada yang menggarap tanah Perhutani untuk menanam kopi. Hampir 60% masyarakat menggarap di tanah milik Perhutani untuk usaha perkebunan kopi[9]. Selain itu, ada juga yang menggarap tanah milik sendiri atau tanah adat untuk menanam sayur-sayuran. Untuk pertanian padi sawah, mayoritas menggarap tanah milik sendiri. Di desa ini, jarang ada pegawai/buruh pabrik, bahkan masyarakat yang bekerja

[6] starbuck
[7] Pesantren Salafiyah
[8] Universitas Islam Bandung
[9] Hasil kopi di Sindang Kerta memang tidak sebagus di Gunung Halu

bappelitbangda

menjadi PNS pun bisa dihitung jari. Kendala pertanian dan perkebunan di desa adalah ketersediaan modal. Saat bertani menggunakan pinjaman dana dari perbankan, dan ketidakstabilan harga pertanian sangat berpengaruh dalam pendapatan. Kendala pertanian juga pengetahuan cara menghadapi hama dan penyakit tanaman pertanian serta sarana teknologi pertanian. Untuk penyuluhan kepada masyarakat sudah banyak dilakukan, contohnya oleh BP3K Pertanian dan dari desa juga sempat ada bantuan bibit dan bantuan pupuk juga sudah ada.

Hasil pertanian masih dijual ke pengepul dan dipasarkan di Pasar Caringin Bandung. Untuk tanaman kontrak tahun kemarin masih ada program dengan pemerintah, namun sekarang sudah tidak ada, kemudian transisi kepemimpinan mempengaruhi berlanjut tidaknya kerjasama kontrak pertanian. Untuk petani yang menggarap di tanah milik Perhutani itu terdapat dana bagi hasil yang besarannya 2,5% dari keuntungan yang dihasilkan oleh petani.

Desa Buninagara memiliki potensi pariwisata Gunung Padang, namun objek ini diklaim oleh 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Gunung Padang merupakan pariwisata religi, saat ini Gunung Padang sudah mudah di akses karena posisinya dipinggir jalan.

Desa Buni Nagara memiliki kesenian angklung (kelompok seni buncis) dan padepokan pencak silat di semua desa ada. Kesenian angklung kelompok seni buncis, merupakan seni budaya yang khas dari Buni Nagara. Kesenian yang alat seninya terbuat dari bambu, personilnya lebih dari 10 orang. Jika ada pesta dan acara hari ulang tahun kemerdekaan, masyarakat dengan ekonomi sederhana banyak yang mengundang buncis, selain melestarikan budaya, mengundang penyanyi dangdut dari luar biayanya lebih mahal.

Minat belajar masyarakat Desa Sindang Kerta dapat dikatakan tinggi. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Buni Nagara adalah adalah SMP, namun untuk generasi Milenial di desa ini sudah banyak yang lulusan SMA. Fasilitas pendidikan di desa sudah ada jenjang SD, MI, MTS, dan SMP

bappelitbangda

Terbuka juga ada. Masyarakat yang berpendidikan S1 sudah ada 1% 1 dan beberapa orang sudah S2. Ada juga beberapa yang bersekolah di luar kecamatan yaitu Desa Nangrang dan Karyamukti Kecamatan Cililin yang sudah memiliki sekolah SMK.

Masyarakat Desa Buni Nagara, ada yang putus sekolah, berasal dari keluarga prasejahtera, namun adanya bantuan pemerintah, yaitu Program KIP dan lainnya, jumlah anak putus sekolah tidak terlalu banyak. Penyebab putus sekolah umumnya karena faktor ekonomi dan faktor keluarga yang tidak harmonis.

Setiap Dusun di Buni Nagara ada masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha. Ada beberapa wirausaha yang membuat CV seperti pengrajin gergaji, pengrajin kayu, makanan, obat-obatan pertanian, dan warung sembako. Ada beberapa pengusaha yang sudah berbadan hukum dan juga pengusaha yang sifatnya kecil-menengah sudah lumayan banyak, omset dapat mencapai 500 jutaan.

Jumlah masyarakat yang meminjam ke bank emok dan bank keliling, cukup kronis digunakan untuk konsumsi dan modal. Akibatnya banyak warung kecil yang tutup karena terjebak hutang di Bank Emok. Hal ini disebabkan, penghasilan yang tidak sesuai dengan kewajiban bunga yang harus dibayarkan, sehingga banyak usaha yang tutup. Pinjam ke bank emok/bank keliling, rata-rata awalnya untuk modal, namun beberapa juga ada yang untuk konsumsi, ketidakmampuan mengelola keuangan, dan menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi.

Untuk kesehatan, di Desa Buni Nagara sedang bergulir program stunting dari Pemda KBB, yaitu Pelita Bening, khusus di desa ada juga pembentukan tim percepatan penurunan stunting sudah 2 tahun berjalan. Angka stunting sudah tidak banyak dan masuk ke kategori rendah. Masyarakat banyak yang memahami pentingnya asupan gizi yang baik, sehingga memprioritaskan gizi anak daripada orangtuanya. Di data desa terdapat 10

bappelitbangda

anak yang terindikasi stunting. Kelompok yang rentan terhadap kebutuhan gizi itu adalah kelompok keluarga prasejahtera. Kebanyakan itu yang kekurangan asupan gizi adalah kelompok orang tua atau lansia yang kurang mampu, karena lebih memprioritaskan makanan untuk anak-anaknya.

Penyakit paling umum di masyarakat ada TBC dan paru-paru karena pola hidup yang tidak sehat (kebiasaan begadang dan kurangnya istirahat). Masyarakat ini sudah ditangani oleh puskesmas dan tenaga kesehatan selalu aktif menangani, sehingga yang memiliki penyakit paru-paru masih bisa beraktivitas dengan baik. Akses ke puskesmas hanya 15 menit menggunakan kendaraan. Terdapat juga 8 (delapan) puskesmas pembantu yang siaga 2 kali seminggu di desa. Di desa juga banyak yang berobat menggunakan BJPS dan KIS, bagi yang tidak punya, tetap bisa dijangkau, karena harga obatnya tidak mahal karena obat subsidi. Di desa Buni Nagara, sekitar 70% masyarakat sudah terdaftar BPJS dan KIS. Jika masyarakat yang tidak bisa membayar BPJS mandiri karena ekonomi menurun, pemerintah desa membuka pelaporan, yang nantinya oleh operator diakomodir untuk pengajuan beralih ke BPJS gratis/KIS ke pihak BPJS.

Analisa Kemiskinan

Akses pendidikan lebih baik, minat belajar tinggi, memiliki jiwa wirausaha, kepemimpinan masyarakat desa (pemerintah desa, BUMDES, dan pesantren) lebih proaktif memberdayakan masyarakat, masyarakat hanya terkendala keterbatasan akses modal dan pemasaran. Adanya potensi masalah ketahanan keluarga (suami tidak bekerja, istri menjadi tulang punggung keluarga dan kekurangan modal), sehingga berdampak pada anak putus sekolah. Layanan kesehatan mudah diakses. Bagi hasil dengan Perhutani, untuk perkebunan Kopi, di Sindang Kerta relatif lebih kecil dibandingkan bagi hasil kopi di Gunung Halu.

bappelitbangda

4.3. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cihampelas

Desa Mekarjaya memiliki potensi sawah, tanah darat dan perairan Saguling yang dapat dimanfaatkan. Saat ini perairan sudah dimanfaatkan menjadi kolam apung, untuk persawahan belum dapat dimaksimalkan karena irigasi tidak mengalir, masyarakat bisa bertani disawah di saat musim hujan saja. Hal ini diatasi dengan menanam tanaman lain seperti cabai, kacang panjang dan sayuran lainnya. Hasil pertanian padi hanya untuk dikonsumsi di masyarakat, namun untuk ikan dan tanaman lainnya sudah dijual ke pasar-pasar luar daerah. Untuk pertanian, belum ada bantuan (alat ataupun pupuk) dari pemerintah. Pertanian di beberapa desa terkendala pada tidak berfungsinya irigasi, padi yang harusnya bisa ditanam 3 kali setahun sekarang hanya 1 tahun sekali. Untuk perkebunan hanya sedikit, di tanami sayuran.

Lahan pertanian sudah mulai banyak beralih fungsi terkendala irigasi dari hulu tidak sampai ke Desa Cihampelas. Pertanian sudah dioptimalkan dengan program sumur pertanian. Hasil pertanian sudah dijual sebagian besarnya, 40% untuk konsumsi pribadi. Banyaknya petani menggunakan lahan hak tanah guna menyewa ke pemerintah. Infrastruktur ke pertanian sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Panjang jalan desa sekitar 19 kilometer, aksesnya sudah baik.

Desa Citapen memiliki potensi pertanian, perkebunan pisang, dan *home industri*. Home industri sale pisang yang sudah dijual ke luar daerah, dan ada yang sudah bekerjasama dengan toko Kartikasari, untuk bantuan *supply* pisang. Sebagian besar pekerjaannya pengepul pisang. Sisa sortiran pisang dari Kartikasari banyak dijadikan sale pisang.

Desa Mekarmukti memiliki potensi Bendungan Saguling sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian dan perikanan. Perikanan ada beberapa desa yang punya potensi di perikanan di Desa Mekarjaya,

bappelitbangda

Tanjungjaya, dan Singajaya yang dilewati oleh Perairan Saguling. Sudah ada komunitas budidaya ikan, ada juga wisata kuliner Saung Apung Napak Sanjang yang sedang diinisiasi untuk mewadahi pasar lokal. Sering kegiatan pembinaan melalui anggota komunitas perikanan dan dinas, pelatihan teknik dan pakan mandiri juga sering dilakukan pelatihan oleh dinas. UMKM ada juga seperti sentra pindang pemasarannya sudah keluar kabupaten.

Di Desa Cihampelas, mata pencaharian utama masyarakat umumnya bekerja keluar dan petani garapan pribadi (sawah dan kebun), ada yang menjadi pegawai negeri, ada juga pekerjaan lain, namun saat ini banyak yang sudah keluar atau menjadi pengangguran (banyak pengangguran). Sudah ada penyuluhan dari pertanian, perikanan, dan peternakan (sudah dimaksimalkan sumber dayanya). Di Desa Mekarjaya, pada umumnya masyarakat bekerja sebagai buruh tani, pekerja pabrik, banyak juga di perikanan. Untuk memenuhi kebutuhan ada juga yang bekerja di pertanian dengan pekerjaan sampingan di sektor perikanan. Di Desa Tanjungwangi, jenis pekerjaan 70% pengrajin layang-layang karena ada bandar yang menampung. Perekonomian untuk modal mengandalkan pinjaman dari bank emok, banyak kasus perceraian karena bank emok. Bumdes berjalan di bidang penanaman bunga dekor untuk berbagai acara dan pernikahan sudah 2 tahun jalan secara efisien. Belum ada koperasi di desa. Secara umum, masyarakat di Kecamatan Cihampelas, selain mata pencaharian di bidang pertanian, banyak anak muda yang menjadi buruh pabrik karena letaknya di pinggir kota. Ada juga yang menjadi pengrajin layang-layang di Desa Tanjungwangi dan Mekarmukti. Di Desa Mekarjaya, masyarakat ada yang menjadi pengrajin wajit karena ada sentral oleh-oleh Cililin. Untuk BUMDes sudah banyak berjalan meskipun kebanyakan masih merintis. Untuk peminjaman ke bank emok masih banyak karena persyaratan yang mudah tidak seperti peminjaman ke bank konvensional.

bappelitbangda

Cihampelas belum mengembangkan sektor pariwisata, padahal ada potensi yaitu Situ Wangi**.** Desa Situwangi memiliki potensi objek pariwisata Batu Gunung Buled/Batu Nini hanya saat ini belum ada tindak lanjut. Pariwisata dulu dikelola oleh desa, sekarang sedang dibenahi oleh desa karena tidak menghasilkan profit. Ada juga potensi pariwisata budaya situs yang dianggap sakral (Makam Magasena) sudah diresmikan pemasangan papan nya di dua bulan lalu. Kendalanya dari fasilitas umum dan jalan belum bisa optimal. Desa Mekarmukti belum ada potensi kesenian khusus, sekarang banyak pelaku seni yang menganggur. Karakteristik masyarakatnya tetap bertahan melakukan aktivitas sebelumnya.

60% masyarakat Desa Citapen lulus jenjang SLTA, lulusan SMP 20%. Masyarakat yang putus sekolah diarahkan ke PKBM yang sudah kerjasama dengan beberapa desa. Putus sekolah karena ekonomi, taraf hidup di keluarga tidak mampu. Akses sekolah SD, SLTP, SLTA sudah mencukupi dominan di sekolah Bina Putra. Desa Mekarjaya umumnya lulusan SMP-SMA, banyak juga yang menjadi sarjana dan ada juga yang putus sekolah. Namun sebagian besar sudah SMA. Akses pendidikan di desa ada 13 PAUD, 4 TK, 2 MI, 7 SD, 2 Tsanawiyah dan 2 Madrasah Aliyah, tidak ada SMP/SMA konvensional/negeri. Banyak yang putus sekolah karena orang tua kurang memperhatikan anak, lingkungan, dan ekonomi. Desa Cihampelas, sarana sekolah sudah mudah diakses karena titiknya ada di pusat kecamatan. Sudah 70% lulusan sma dan 30% kuliah. Terdapat 3 SD, 1 Mi, 13 Rw sudah ada Paud dan TK, SLTA ada 2 dan 1 Universitas (STAI Darul Fallah) dan pendidikan sudah cukup. Anak yang putus sekolah langsung didata dan langsung disarankan mengikuti ujian persamaan dari pemerintah desa. Secara keseluruhan, sarana pendidikan di Kecamatan Cihampelas terdapat 40 SD, 20 MI, SMP 13, MTS 10, SMA 1, SMK 8 swasta, 1 SMK Negeri, 11 Madrasah Aliyah.

bappelitbangda

Di Desa Cihampelas, masih ada masyarakat yang pinjam ke bank, pinjol dan bank emok untuk modal usaha pada umumnya, tapi ada juga yang untuk kebutuhan. Belum ada koperasi. Bumdes berjalan dengan baik hanya modalnya masih sedikit, bumdes bergerak di bidang kios-kios pedagang sudah 3 tahun dan sudah menghasilkan PAD ke desa. Ada karakteristik kewirausahaan bahkan banyak yang mengajukan izin usaha ke bank konvensional ada ribuan. Usahanya ada warung, pedagang, kolam ikan, peternakan, dan lain-lain. Di Desa Mekarmukti, Bumdes mengelola pasar desa, untuk pembangunan pasar desa sekarang masih dalam proses karena baru tuntas pembangunan tahun kemarin. Seluruh hasil pertanian, perikanan dan perkebunan akan ditampung di pasar desa tersebut. Bumdes sudah menjalankan usaha simpan pinjam dan penyertaan modal ke UMKM, warung dan pedagang untuk meminimalisir peminjaman di bank emok di kalangan warga. Kendalanya, masyarakat tidak memiliki komitmen membayar pinjaman di Bumdes, tidak seperti ke bank emok/perbankan

Desa Cihampelas ekonomi masyarakat masih golongan menengah karena sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik, jumlah petani sekitar 40%, karena sawah sudah padat dengan pemukiman, ada juga yang berprofesi sebagai guru dan PNS. Jika pendapatan tidak mencukupi, masyarakat ada yang meminjam modal ke bank, ada juga pinjam ke bank emok dan ada juga yang memiliki tabungan. Kendalanya saat ingin mengantisipasi peminjaman warga, desa tidak memiliki sumber daya untuk itu, sehingga bank emok menjamur untuk pemenuhan kebutuhan. Di desa belum ada koperasi, tapi sudah ada bank konvensional. Bumdes masih berjalan namun belum stabil, masih mengupayakan dari desa untuk menanam modal, sekarang bumdes berjalan dibidang sembako dan gudang logistic hanya masih kecil. Masyarakat sudah ada yang memiliki jiwa wirausaha namun hanya sebagian kecil, ada usaha kolam renang untuk anak kecil, UMKM,

bappelitbangda

konveksi, perajin wajit. Perekonomian masyarakat di Desa Citapen masih ada yang terjerat bank emok untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di desa belum ada koperasi. Bumdes berubah struktur kepengurusan, saat ini usaha aktivasi pengelolaan sampah di TPS 3R.

Desa Mekarjaya, asupan gizi masyarakat pada umumnya sudah baik, meskipun ada beberapa masyarakat yang tidak mampu sehingga untuk menanganinya kita melaksanakan program di posyandu terutama untuk anak-anak. Ada juga yang stunting dan penanganannya oleh posyandu. Masyarakat yang lanjut usia ada yang memiliki penyakit TBC dan Jantung. Desa Cihampelas, tidak ada masyarakat yang memiliki penyakit menular di masyarakat. Untuk asupan gizi, desa masuk fokus pada stunting melalui program PMT. Saat ini sedang diupayakan untuk pemberian makanan bergizi ke anak-anak stunting. Di Desa Citapen asupan gizi di desa dilakukan melalui Program PMT balita dan support ke posyandu. Akses Kesehatan di desa ada beberapa UGD, ada beberapa puskesmas yang jaraknya dekat sehingga dapat diakses masyarakat. Di Desa mekarmukti belum ada masyarakat yang mengidap penyakit menular, saat ini sudah bebas dari lokus stunting dan sedang menjalankan program mitigasi penyakit dengan membangun kerjasama dengan berbagai *stakeholder*. Di Kecamatan Cihampelas secara umum, akses layanan kesehatan sudah tersedia 2 puskesmas dan 4 puskesmas pembantu, posyandu 124. Masyarakat yang mengidap penyakit kronis sedang menjalankan program pemeriksaan rutin, senam rutin, dan pemeriksaan darah rutin. Ada Juga sosialisasi penyakit menular ke masyarakat di desa-desa.

Permasalahan yang dihadapi

- belum ada bantuan (alat ataupun pupuk) dari pemerintah untuk pertanian.

bappelitbangda

- Masih banyak masyarakat yang menjadi pengangguran
- Terdapat beberapa objek pariwisata (Situ Wangi dan Makam Magasena), tapi belum dikembangkan.
- Anak putus sekolah karena masalah ekonomi, taraf hidup di keluarga tidak mampu, orang tua yang kurang memperhatikan anak, lingkungan, dan ekonomi. Anak yang putus sekolah langsung didata dan disarankan mengikuti ujian persamaan dari pemerintah desa.
- sudah ada masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha namun hanya sebagian kecil, seperti usaha kolam renang untuk anak kecil, UMKM, konveksi, perajin wajit.
- Masih ada masyarakat yang pinjam ke bank, pinjol dan bank emok untuk modal usaha pada umumnya, tapi ada juga pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Unit bisnis Bumdes masih terbatas, dan belum ada koperasi desa. Bumdes sudah berjalan dengan baik hanya modalnya masih sedikit, dan sudah menghasilkan PAD ke desa. Bumdes sudah menjalankan usaha simpan pinjam dan penyertaan modal ke UMKM, warung dan pedagang untuk meminimalisir peminjaman di bank emok di kalangan warga. Kendalanya, masyarakat tidak memiliki komitmen membayar pinjaman ke bumdes

Program yang diinginkan

- pengairan ke sawah/irigasi agar pertanian tidak ditanam 1 kali setahun, dan kapasitas produksi meningkat
- bantuan modal pertanian dan perikanan bagi pelaku yang ekonominya kurang mampu
- Penyuluhan pertanian dan perikanan, serta bantuan pupuk
- Bantuan modal untuk UMKM dengan syarat administrasi yang mudah dan fasilitasi kemitraan UMKM kecil dengan UMKM yang sudah maju

bappelitbangda

- bantuan untuk di support armada untuk kebutuhan pengelolaan sampah 3R

4.4. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cililin

Potensi alam memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan wisata alam. Pertanian di bidang perkebunan menghasilkan produk cabai, tomat, cabai rawit, cabai keriting. Di perikanan menghasilkan kolam terapung. Khusus di karang anyar memproduksi jagung. Hasil perkebunan jika jumlah produksi banyak bisa dijual ke pasar induk langsung di luar kabupaten. Wisata alam ada curug sawer, air terjun cilayang, perkemahan, di desa nangrang direncanakan menjadi wisata desa religi karena ada Sejarah penyebaran agama islam serta pemakaman tokoh dan ada juga desa yang ada peninggalan sejarahnya. Untuk masuk ke tempat wisata belum dipungut biaya, karena terkendala lahan milik perhutani. Kolam terapung masih ada namun terkendala dibatasi kolam oleh PLN (Desa Karanganyar, Bongas, Cililin, Batulayang). SDM memiliki potensi kerajinan contoh desa Budiharja kerajinan dari bambu, bahan baku bambu dari desanya sendiri (masih banyak produksi bambu). Hampir 20-30% lahan pariwisata milik perhutani. Di desa Karangtanjung hampir sebagian milik tanah perhutani.

Khusus sentra oleh-oleh cililin belum ada toko yang dipusatkan oleh pemerintah, masing-masing masyarakat berjualan sendiri untuk pemilik toko dan yang bekerja asli warga cililin. Produksi oleh-oleh pengrajin wajit, gurilem, produk madu, dan lainnya. Saat ini sedang mengajukan gerai sentral untuk menjual hasil produk oleh-oleh yang dibuat oleh UMKM Cililin juga menjual semua produk hasil cililin. Sudah ada forum UMKM kecamatan Cililin untuk menampung produk-produk UMKM Cililin. Pengrajin wajit itu desa Cililin, gurilem dari desa Bongas, Budiharja dan Cililin.

bappelitbangda

Desa Karanganyar memiliki potensi di perkebunan untuk memproduksi jagung (terbanyak di KBB) dijual berupa jagung langsung dijual ke bandar. Kendalanya di peralatan dan biaya yang cukup mahal. Kendalanya banyak tanah milik TNI, contohnya gedong dalapan. Untuk pengunjung sudah banyak namun terkendala di perizinan dan akses yang belum ada hingga memerlukan modal yang besar.

Desa Budiharja banyak produk kerajinan dari bambu namun masih tradisional belum ke tingkat modern contohnya nyiru, boboko, ayakan. Untuk produk modern hanya pernah mengirimkan untuk parcel. Kerajinan bambu tidak menjadi menjadi mata pencaharian utama warga, untuk pembelian masih via permintaan, terkendala di pemasaran, namun beberapa ada yang menjual ke bandar. Terkendala di pemasaran online dan bambu masih dikirim dari desa dan kecamatan lain. Pagi-pagi mereka bertani siangnya membuat kerajinan bambu.

Desa Karangtanjung memiliki potensi pertanian sekarang banyak persawahan yang menjadi perumahan, untuk pariwisata hutan pohon pinus dan curug milik perhutani, terkendala di izin perjanjian kerjasama dengan perhutani.

Desa Batulayang terdapat potensi pariwisata pandai domas, tempat untuk camp ada juga curug cilayang, untuk SDM ada juga atlit yang sudah mendapat emas dan perunggu di PON. Untuk sekarang banyak yang berkunjung ke pandai domas terutama anak sekolah untuk perkemahan di sabtu-minggu, terutama di musim kemarau. Terkendalanya di lahan, lahannya milik perhutani. Ada juga teh tarik yang sudah dikunjungi oleh menteri, minuman kemasan harga 2000-an asli UMKM Batulayang, sudah berkembang pesan lewat online dan juga diwarung sudah banyak, sudah produksi ke luar kabupaten, teh tarik rai-raka. Kendalanya banyak yang meniru. Untuk makanannya ada rengginang yang mekarnya besar. Banyak UMKM di rengginang.

bappelitbangda

Desa Karanganyar belum ada kegiatan kesenian yang bisa digali untuk ekonomis. Desa Budiharja hanya ada pencak silat juara kabupaten berupa dua kelompok padepokan yang dibantu peralatannya oleh desa. Desa Cililin sedang digalakkan Gedung Sejarah, untuk fasilitas kebudayaan sedang difokuskan kesana. Masih proses pengembangan menuju desa wisata, kendalanya sebagian tempat wisata milik perhutani sekarang sedang proses MOU dengan Perhutani. Kecamatan Cililin memiliki wisata alam yang ada di Perhutani bahwa dari MOU dengan Perhutani terlalu singkat hanya 1 tahun, dari perhutani ada 2 kontrak kadang disuruh sewa dan bagi hasil. Kesenian yang banyak di Cililin banyaknya pencak silat. Desa karyamukti memiliki kesenian yang dilaksanakan 1 tahun sekali, jika musim kemarau panjang ada hajat lembur dilaksanakan di Gunung Walanda, kegiatannya menyembelih kambing. Sudah ada rencana untuk dibuat pagelaran kesenian untuk pencak silat, ketangkasan adu domba dan jaipong yang dikelola oleh karang taruna. Suka ada kegiatan Ketangkasan domba lebih dari 500 orang (yang terkenal domba canong dari Cililin).

Desa Karangtanjung memiliki kesenian budaya namun sulit untuk menambah nilai ekonomis. Sudah dibantu untuk alat-alat kesenian seperti calung, pencak silat, dan lainnya namun susah untuk menggali potensi ekonomi. Banyak potensi pariwisata yang terkendala dari lahan milik perhutani, juga ada beberapa desa yang terdampak pemarapan dari Waduk Saguling yang bisa dikembangkan namun terkendala dengan izin kerjasama dengan Indonesia Power. Desa Bongas terkait budaya mayoritas pencak silat sudah mendapat medali emas juga. Untuk kesenian yang menjadi ekonomi agak susah, kendalanya ada di fasilitas yang kurang memadai. Di bongas memiliki potensi pariwisata air berupa situ yang luas yang airnya tidak pernah surut, namun kendalanya ada di daerah indonesia power. Belum ada upaya karena masih bingung harus bekerjasama dengan siapa untuk mengembangkan pariwisata ini. Kendalanya juga ada di ular yang besar hingga memakan anak

bappelitbangda

domba. Ada UMKM yang memproduksi kerupuk daun bambu sudah kemasan dan produksinya sudah baik. Ada juga yang aneh itu produksi ikan pepetek yang tidak bisa di budidaya, kendalanya tidak bisa menangkap ikan pepetek menggunakan jaring besar. Banyak yang bekerja di UMKM pepetek ini sekitar 20 orang lebih.

Desa Karanganyar mengakses pendidikan cukup mudah diakses dari TK hingga perguruan tinggi. Hanya untuk perguruan tinggi terkendala biaya. Banyaknya masyarakat sudah lulusan SMA. Rata-rata bekerja menjadi buruh pabrik, lulusan SMP-SD rata rata bertani.

Desa Budiharja, 10 tahun terakhir mengalami peningkatan, sudah banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Pola pikir masyarakatnya sudah cukup berkembang. Namun untuk akses hanya ada 3 SD, 1 SMP dan 1 SMA, jadi kebanyakan warga yang bersekolah ke Desa Cililin. Lulusan SMA menjadi buruh pabrik/honor diluar daerah, ada juga yang menjadi TKI.

Desa Karangtanjung, untuk akses pendidikan sudah meningkat, namun untuk perguruan tinggi belum ada. 11 PAUD, SD ada 7, SMP dan MA ada 2, ada juga SMA/K dan Madrasah Aliyah. Ada juga program sekolah desa untuk warga yang putus sekolah untuk program kejar paket dan juga perkuliahan untuk kepala desa meskipun sistemnya masih RPL. Dari desa juga ada bantuan insentif guru PAUD dan alat peraga. Untuk yang bekerja buruh pabrik itu banyaknya pabrik textil, buruh bangunan. Putus sekolah banyaknya terkendala karena biaya, akses pendidikan yang jauh, dan biaya seragam juga mental dan lingkungan pergaulan anak-anak.

Desa Cililin, karena ada bantuan dari program pemerintah untuk anak putus sekolah sudah minim. Layanan pendidikan sudah terpenuhi. Ada juga anak-anak yang dipesantrenkan karena tidak ada biaya BOS hanya biaya untuk operasional makan.

Desa Bongas sedang menjalankan program sekolah desa. Untuk yang putus sekolah masih banyak. masyarakat banyak lulusan SMA. Setiap tahun

bappelitbangda

mengadakan program persamaan untuk warga yang putus sekolah. Banyak yang bekerja di pocil (aksesoris tni dan polisi) pemasarannya sudah hingga luar provinsi lewat online, 10% di konveksi dan banyak juga yang UMKM.

Desa Karyamukti, sudah ada peningkatan baik dari akses dan tingkat lulusan masyarakat. Saat ini sedang menjalankan sekolah desa, kendala putus sekolah banyaknya karena pernikahan dini. Banyaknya untuk yang bekerja menjadi petani meskipun masih muda. Desa Mukapayung, 40% sudah lulusan SMA. SD ada 7, SMP ada 5, dan SMA ada 4. Masyarakat ada yang bekerja sebagai pegawai pabrik, ada yang jualan online digital marketing menjual konveksi seragam perlengkapan satpam dan lainnya. Selebihnya buruh tani, karena lahan sudah mulai sempit. Desa Batulayang, rata-rata pendidikan sudah SMA. Sarana pendidikan dekat dengan desa Cililin, jadi banyak yang menempuh pendidikan ke desa Cililin. Setelah lulus sekolah, 60% sudah melanjutkan ke perguruan tinggi. Sisanya banyak menjadi buruh pabrik, berjualan seragam secara online dan offline. Desa Nanggerang, dulu hanya sampai SMP, sekarang terbantu, karena sudah ada sekolah swasta hingga rata-rata lulusannya sudah SMA.

Pekerjaan masyarakat banyak bekerja serabutan, karena pabrik juga banyak yang tutup dan PHK. Kesempatan pekerjaan/lowongan pekerjaan tidak mencukupi karena tidak ada pabrik di kecamatan. Cililin belum ada universitas.

Banyak warga yang meminjam ke bank emok. Pemerintah desa juga kesulitan menghadang bank emok, warga juga marah kalau bank emok dihadang atau dipersulit. Di desa Budiharja Bumdesnya berjalan di bidang simpan-pinjam untuk menanggulangi bank emok, perputaran uang per tahun hingga 3 Miliar di desa Budiharja, terkendalanya dalam modal namun administrasi sudah tertata. Bumdes Karangtanjung untuk kontribusi usaha di bidang penyewaan alat pesta sudah banyak namun timbal baliknya ke Bumdes belum ada, warga masih pengennya gratis. Bumdes Karanganyar berusaha di

bappelitbangda

bidang pertanian, tanah carik desa, 1 orang 1 tanah kavling. Bumdes di Desa Bongas bergerak di perikanan *supply* bibit ikan, terkendala di dana bumdes dan desa yang terbatas hingga tidak mengcover banyak hal dan tidak maksimal.

Sekarang masyarakat di Desa Karanganyar banyak berjiwa wirausaha, terutama karena perkembangan zaman meskipun tidak kemana-mana tapi mereka memiliki penghasilan secara online. Di Desa Bongas sudah banyak pelatihan UMKM, baik dari pengolahan, pengemasan dan juga mempermudah perizinan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait. Desa Karanganyar sudah ada pelatihan dalam budidaya jamur namun pemasarannya kurang, akhirnya hanya mentok di pelatihan. Ada juga pelatihan brownies kukus namun hasilnya belum maksimal.

Desa Karang Tanjung, pelatihan banyak dilaksanakan tapi tidak ada tindak lanjutnya. Untuk wirausaha banyak, namun ada berjalan, ada yang tidak. Selebihnya masyarakat jadi lebih mengandalkan bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan lainnya.

Desa Karangtanjung, untuk gizi sudah menjadi prioritas terutama untuk stunting. 10% anggaran desa itu untuk kesehatan posyandu, ambulan dan lainnya. Desa berupaya mengoptimalkan dari RT/RW dan kader untuk memantau pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa orang yang diberikan perhatian khusus untuk pemenuhan kebutuhan dari desa bahkan sampai menganggarkan. Sudah ada puskesdes untuk membantu puskesmas. Ada 14 data stunting, namun ada 1 penurunan yaitu ada penyakit penyerta yaitu TB, 8 pertumbuhan tetap tidak naik. Puskesmas di Cililin, cuma ada 2 di Mukapayung dan Cililin, namun tiap desa ada posyandu. Desa yang jauh dari puskesmas ada 4 desa. Jauhnya hingga 10 km jarak dari desa ke puskesmas. Banyak kegiatan puskesmas keliling untuk desa-desa yang jauh dari jarak puskesmas. Puskesmas banyak yang turun ke lapangan untuk melayani masyarakat yang jauh dari puskesmas. Penyakit menular banyaknya TB,

bappelitbangda

sehingga dibentuk tiap desa itu kader TB. Kader bertugas untuk melakukan *tracking* dan pemantauan bagi keluarga yang anggotanya terkena TB. Ada juga penyakit HIV pergaulan bebas namun dirahasiakan.

Permasalahan

- pengelolaan wisata belum optimal, karena terkendala lahan milik Perhutani, MOU dengan Perhutani terlalu singkat hanya 1 tahun
- UMKM pengolahan makanan dan minuman masih berjalan sendiri-sendiri, serta terkendala pada pemasaran online
- Produk UMKM juga banyak yang meniru, sehingga memperluas persaingan
- Belum memiliki akses pasar, hasil pertanian masih dijual ke Bandar. Kendala pertanian jagung terletak di peralatan dan biaya yang cukup mahal, dan lahan banyak milik TNI.
- kesenian tradisional sulit dikembangkan dan memberikan nilai tambah ekonomi, kendalanya ada di fasilitas yang kurang memadai
- masyarakat sangat terbatas mengakses pendidikan di perguruan tinggi karena terkendala biaya.
- Putus sekolah banyaknya terkendala karena biaya, akses pendidikan yang jauh, dan biaya seragam juga mental dan lingkungan pergaulan anak-anak, kendala putus sekolah juga ada yang disebabkan karena pernikahan dini (kasus ini cukup banyak)
- Kesempatan pekerjaan/lowongan pekerjaan tidak mencukupi karena tidak ada pabrik di kecamatan
- Banyak warga yang masih meminjam ke bank emok. Pemerintah desa juga kesulitan menghadang bank emok, karena warga marah jika bank emok dihadang atau dipersulit.
- Kendala UMKM simpan pinjam terkendalanya pada modal

bappeltbangda

- Bumdes Karangtanjung untuk kontribusi usaha di bidang penyewaan alat pesta sudah banyak namun timbal baliknya ke Bumdes belum ada, karena warga ingin meminjam peralatan secara gratis
- perikanan *supply* bibit ikan, terkendala di dana Bumdes dan desa yang terbatas hingga tidak mengcover, banyak hal dan tidak maksimal.
- pelatihan dalam budidaya jamur namun pemasarannya kurang, akhirnya hanya mentok di pelatihan
- pelatihan UMKM terkendala akses pasar
- masyarakat jadi lebih mengandalkan bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan lainnya.

4.5. Gambaran Masyarakat Kecamatan Rongga

Potensi yang dimiliki ada 3 yaitu pertanian dan kehutanan (pisang, madu dan kopi), makanan olahan (rengginang dan opak), pariwisata (curug malela, curug buana dan pariwisata berbasis religi). Produksi paling banyak pada pertanian adalah padi dan sayuran. Cabe, kol, dan tanaman hortikultura seperti jahe dengan produksi paling besar. Dikirim ke pasar-pasar yang di Cianjur, Bandung dan Jakarta. Desa Cicadas penghasil paling banyak di kecamatan rongga, namun desa lain pun tetap banyak hasil produksinya. Penjualan jahe masih menjual mentah belum ada produksinya. Untuk padi cenderung dikonsumsi pribadi. Petani banyak mengerjakan pertanian di lahan milik pribadi. Produksi kopi berjenis arabica karena lebih menjanjikan, namun sebagian masih ada yang bertani kopi robusta cuma harganya masih dibawah standar. Untuk hortikultura tidak hanya jahe tetapi ada kapulaga, cengkeh, dan tanaman lainnya.

Pariwisata sudah dikelola oleh pemerintah kabupaten, namun ada beberapa potensi pariwisata yang belum dibuka. Belum ada retribusi pemasukan ke kecamatan atau ke desa, retribusi Curug Malela saja yang

bappelitbangda

sudah dibuka dan dioptimalkan namun itu dikelola oleh pemda dan tidak ada pemasukan retribusi ke desa. Pertanian dan makanan olahan untuk potensinya sudah cukup optimal dapat dibuktikan dengan pemasaran nya yang sudah cukup luas, hanya untuk pariwisata bermasalah dengan biaya retribusi. Untuk pariwisata berbasis religi sudah sangat optimal, dengan sering diadakan kegiatan-kegiatan yang pesertanya banyak yang hadir, bahkan dari luar daerah pada tahun 2022 itu ada sekitar 40 ribu pengunjung. Kendala pemanfaatan potensi pariwisata adalah dari sumber daya manusia yang kurang keterampilan dan kurang pelatihan. Pariwisata terkendala untuk infrastruktur jalan, sarana dan prasarana, untuk Curug Malela saja kondisi jalanan saat ini sudah banyak yang rusak. Untuk jalan dari parkiran dan titik Curug Malela juga saat ini kurang baik. Di Kecamatan Rongga sendiri banyak titik longsor, sehingga berdampak pada sulitnya peningkatan ekonomi.

Kesenian dan kegiatan budaya/tradisi hampir ada di setiap desa seperti Pencak Silat, bahkan ada kepengurusan secara khusus untuk pencak silat. Ada yang sampai juara 1 puteri tingkat KBB dari Rongga. Budaya sosial dari masyarakat mereka menerapkan sikap gotong royong membantu jika ada bencana.

Kecamatan Rongga ada 8 desa. Mayoritasnya menjadi petani, tapi para pemuda di Kecamatan Rongga kurang berperan dan berminat di kegiatan pertanian. Kendalanya juga terdapat di sulitnya mendapatkan pupuk, untuk kopi juga warga butuh perhatian khusus untuk perkembangan petani kopi. Untuk petani jahe, itu terkendala di modal yang besar, untuk harga bibitnya saja bisa 20 ribu. Sekarang untuk mendapatkan pupuk dibatasi, bahkan pupuk sudah habis sebelum masa panen datang.

Masyarakat Rongga rata-rata masih lulusan SMP. Untuk akses pendidikan dari tingkat SD hingga SMA/sederajat cenderung sudah cukup mudah dijangkau. Untuk SMA/sederajat ada 4, SMP ada di setiap desa. Masyarakat bersekolah sampai SMP karena pola pikir masyarakat yang

bappelitbangda

mengutamakan pendidikan masih sedikit. Meskipun saat ini pola pikir masyarakat sudah mulai sedikit berubah. Kondisi ekonomi pun menjadi salah satu faktor, karena tidak semua bantuan dapat memenuhi kebutuhan lainnya di sekolah. Namun dari pihak pemerintah desa sendiri selalu menegaskan kepada masyarakat untuk pendidikan minimal sampai SMA. Untuk desa Cibodas, pendidikan terkendala di infrastruktur dan akses yang jauh sehingga masyarakat lebih memilih pendidikan ke Cianjur. Anak yang putus sekolah untuk tingkat SD sudah tidak ada, namun untuk tingkat SMP dan SMA masih ada. Namun, sekarang sudah tidak terlalu banyak anak yang putus sekolah. Penyebab utama putus sekolah infrastruktur, ekonomi, pemahaman, pola pikir dan sarana prasarana. Di kecamatan Rongga sudah banyak yang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi ke kota.

Untuk kesempatan pekerjaan itu cukup sulit, pekerjaan yang aksesnya cukup mudah mungkin hanya di pertanian sebagai buruh tani. Dari potensi-potensi yang ada warga ingin program pelatihan dan pemasaran untuk perkembangan potensi-potensi yang ada di Kecamatan Rongga. Pendapatan masyarakat itu berbasis dari pertanian, sebagai buruh tani, untuk pendapatan kurang bisa mencukupi kebutuhan, masyarakat berupaya untuk memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan. Pinjaman bank emok lebih dominan daripada pinjaman bank konvensional karena syarat persuratan lebih mudah dan hal ini menjadi masalah yang serius bagi kecamatan dan desa. Rongga ada 1 lembaga keuangan Bumdes bersama itu bergerak dibidang simpan pinjam. Banyak masyarakat yang pinjam ke bank emok untuk kebutuhan sehari-hari.

Untuk wirausaha, tingkatan ekonomi masyarakat di desa, sudah cukup baik. Meskipun tidak meningkat secara signifikan tapi belakangan ini makin banyak pelaku-pelaku usaha UMKM di Kecamatan Rongga baik di bidang pengolahan makanan, kerajinan dan lainnya. Bumdes yang ada belum optimal, yang kelihatan sudah optimal hanya ada di 1 desa yang bumdesnya

bappelitbangda

berjalan salah satu indikasinya karena dari sisi PAD dari desa itu sendiri. Untuk desa lainnya sedang didorong untuk berjalan. Kendalanya banyak masyarakat tidak paham fungsi Bumdes.

Terkait kemampuan masyarakat untuk pemenuhan gizi sudah cukup bisa memenuhi. Terdapat kasus stunting, namun tingkat stunting terendah di kabupaten, dibandingkan dengan kecamatan lain. Kecamatan rongga memiliki Puskesmas hanya ada 1, dekat dengan kecamatan itupun statusnya belum DTP dan belum bisa menangani keadaan darurat. Banyak masyarakat yang berangkat ke puskesmas Gununghalu dan RSUD yang ada di Kecamatan Cililin. Puskesmas pembantu itu ada di setiap desa.

Permasalahan

- SDM yang kurang terampil dan terlatih dalam memanfaatkan potensi pariwisata
- Pariwisata terkendala untuk infrastruktur jalan, dan sarana dan prasarana
- pemuda di Kecamatan Rongga kurang berperan dan berminat pada kegiatan pertanian
- Pertanian sulit mendapatkan pupuk
- Perkebunan (jahe), terkendala modal yang besar, harga bibitnya saja bisa 20 ribu.
- Akses pupuk dibatasi, bahkan pupuk sudah habis sebelum masa panen datang.
- Petani kopi terkendala kerjasama dengan pemilik lahan (Perhutani)
- Di Kecamatan Rongga banyak titik longsor, sehingga berdampak pada sulitnya peningkatan ekonomi.
- pola pikir masyarakat yang mengutamakan pendidikan masih sedikit, disamping masalah ekonomi, karena tidak semua bantuan KIP mengcover kebutuhan lainnya di sekolah.

bappelitbangda

- Desa Cibodas, pendidikan terkendala di infrastruktur dan akses yang jauh sehingga masyarakat lebih memilih pendidikan ke Cianjur
- Bumdes yang ada belum optimal

Program yang diinginkan Kecamatan Rongga dari pemerintah

- Perbaikan sarana prasarana infrastruktur untuk mempermudah kegiatan ekonomi ataupun sektor pariwisata
- pembinaan untuk masyarakat di kegiatan ekonomi baik dari UMKM atau pelaku usaha, dan pelatihan dibidang-bidang lainnya
- Pelatihan yang dapat menggali potensi masyarakat karena banyak potensi yang belum tergali
- Perhatian kepada infrastruktur irigasi di Kecamatan Rongga
- Pendampingan untuk pembentukan dan kepengurusan Bumdes, serta pelatihan manajemen usaha.

4.6. Gambaran Masyarakat Kecamatan Saguling

Memiliki potensi sumber daya alam untuk pertanian seperti Jagung, Palawija, dan Padi, diantaranya di Desa Jati dan Desa Giri Mukti. Di Kecamatan Saguling terdapat desa wisata, sedangkan desa dengan karakter perkotaan yaitu Desa Bojong Haleuang, Desa Cikande, Desa Cipangeran (lokasi ibu kota Kecamatan). Hasil pertanian yang paling banyak yaitu jagung, yang sudah dipasarkan ke luar daerah. Lahan pertanian kebanyakan lahan pribadi namun ada juga yang menggarap tanah milik desa atau tanah milik orang lain. Selain pertanian, potensi lainnya yaitu peternakan (paling banyak domba dan kambing). Banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan/produktif. Petani masih banyak yang menjual hasil tani ke bandar. Pisang dan singkong juga banyak, tetapi kurang inovatif dalam pengolahannya.

bappelitbangda

Untuk potensi ikan jaring terapung saat ini, dibatasi karena adanya program strategis nasional PLTS Indonesia Power. Masyarakat banyak yang mengembangkan usaha jaring apung. Namun saat ini penghasilannya sedang menurun karena banyak dialihkan ke bioflok. Potensi pariwisata di kecamatan terdapat berbagai curug, Curug Bandi di Cipangeran, Curug Halimun di Saguling, dan ada 3 curug lainnya. Curug ini belum dijadikan sumber pendapatan desa (retribusi tiket masuk). Masyarakat mendapatkan penghasilan dari jasa penitipan barang dan parkir. Kendala pariwisata yaitu legalitas formal yang mengharuskan adanya kerjasama dengan pihak perhutani. Pembangunan Indonesia power yang menghambat banyak potensi pariwisata di berbagai desa. Selain itu pembangunan IP atau Indonesia Power banyak menutup akses jalan warga masyarakat sehingga warga harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk akses jalan. Kendala secara menyeluruh adalah modal, pemasaran, akses infrastruktur jalan untuk usaha pertanian di jalan kabupaten. Potensi belum termanfaatkan secara optimal. Upaya yang sudah dilakukan desa, yakni membangun jalan usaha untuk pertanian yang didanai APBDes dan membentuk kelompok tani.

Potensi Desa Jati terletak pada pertanian jagung dan hortikultura. Di desa hampir 80% warga bekerja dibidang pertanian dan perikanan. Kendala yang dirasakan warga masyarakat bidang pertanian & perikanan adalah sulitnya mendapatkan pupuk, harga pakan ikan mahal, sulitnya akses transportasi dan infrastruktur jalan kabupaten masih kecil dan rusak, sehingga mobil besar yang mengangkut produk susah masuk. Jalan yang sudah cukup bagus hanya dekat komplek Kota Baru Parahyangan. Meskipun akses internet sudah memadai, tapi untuk bisnis online, terkendala jauhnya jarak untuk mengakses jasa ekspedisi ketika ingin mengirim barang. Dana desa untuk pertanian dan ketahanan pangan sebesar 20% sudah berjalan beberapa tahun dan fokusnya ke usaha tani, jadi anggaran untuk infrastruktur masih belum tercukupi dan kurang.

bappelitbangda

Jalan yang sudah bagus yaitu Jalan Cihalueang dan Cikande karena dekat dengan kota baru. Masyarakat sekitar saat ini masih menggarap lahan milik kota baru. Tapi nanti, jika lahan garapan tersebut akan dipakai oleh developer Kota Baru, masyarakat mau tidak mau harus mengganti pekerjaan.

Bantuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat untuk pengembangan potensi pariwisata Curug Halimun berupa alat bantu pelampung renang untuk permainan wahana arum jeram. Bantuan lainnya yang didapatkan ada di desa jati berupa bantuan memberikan 15.000 biji kopi arabika.

Potensi budaya kesenian tradisional di Kecamatan Saguling antara lain pencak silat, kesenian wayang golek dan Calung, itupun sudah mulai tergerus karena perkembangan zaman. Untuk kegiatan upacara adat atau pernikahan juga sudah tidak dilaksanakan, sehingga pelaku seni menjadi sedikit. Di Desa Jati ada 3 kelompok pencak silat, 1 kelompok calung, dan 1 kelompok wayang golek. untuk pencak silat sudah meraih juara provinsi. untuk pesta-pesta di masyarakat lebih banyak mengundang dangdut dari luar daerah desa daripada seni tradisional.

Pendidikan masyarakat, rata-rata lulusan SMA/SLTA. 100% warga sudah bersekolah minimal 9 tahun. Akses pendidikan seperti sekolah sudah ada, kendalanya setiap tahun adalah kekurangan murid. Ada 15 SD Negeri, MI ada 8, SLTA ada 1, SMPN ada 3 dan MTS ada 6. Pendidikan dari RA hingga SLTA sudah ada. Akses pendidikan di Desa Jati ada 1 SMK, 1 MA, 1 SMP, SLTP 1, dan SD ada 2. Beberapa anak yang putus sekolah dikarenakan rasa malas/motivasi kurang, namun jumlahnya hanya sedikit. Anak yang putus sekolah, umumnya lebih senang main dan mancing, daripada belajar di sekolah. Tidak ada anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi, karena sekolah sudah gratis.

Mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh tani (sekitar 70%), sisanya sebagai karyawan pabrik dan PNS/ASN. Pekerjaan petani biasanya

bappelitbangda

suami-istri, keduanya menjadi petani. Belum ada petani milenial, pernah dilaksanakan pelatihan-pelatihan, tetapi tidak ada perkembangan. Generasi muda lebih banyak memilih menjadi buruh pabrik ke luar daerah (pabrik tekstil). Untuk akses pekerjaan, jika pekerjaan kasar itu mudah didapatkan dan letaknya ada di kota baru, ada yang kerja jadi satpam, caddy dan menjaga toko. Namun masyarakat yang bekerja di bagian administrasi atau manajerial masih sedikit. kebanyakan bekerja sebagai kuli bangunan. Masyarakat juga umumnya tidak mempunyai pekerjaan sampingan, jika penghasilan kurang maka warga akan meminjam ke pihak bank emok. Hutang tersebut banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari dan membayar hutang. Masyarakat juga kurang memiliki jiwa kewirausahaan. Karakteristik masyarakat sebetulnya cenderung ulet, namun kebanyakan warga masih banyak yang meniru (ikut-ikutan) dan mudah menyerah jika tidak berhasil atau kekurangan modal. Masyarakat sebenarnya memiliki ketrampilan menjahit, karena sebagian ada merupakan eks-pegawai konveksi dan tekstil.

Hanya sebagian yang mampu memenuhi gizi (sehingga terbantu oleh program stunting Pelita Bening). Banyaknya jumlah anak stunting, karena masyarakat jarang hadir ke Posyandu. Upaya yang saat ini dilakukan adalah menjemput bola ke keluarga yang tidak datang ke Posyandu. Penyakit yang dialami masyarakat umumnya TBC, ISPA, dan Influenza. Akses kesehatan ada di 6 desa, hanya ada 1 puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan) di Cipageran yang cukup bagus dan terjangkau oleh warga dan sudah ada fasilitas rawat inap.

Harapan untuk kegiatan/program pemerintah adalah pelaksanaan pelatihan, terutama untuk pelatihan bagi para petani agar panen bisa maksimal, pelatihan menangani hama penyakit tanaman, pelatihan pemasaran digital, dan pelatihan mengembangkan inovasi ragam jenis baru usaha masyarakat.

bappelitbangda

Analisa Kemiskinan

1. Terdapat proyek strategis nasional yang menutup akses jalan warga masyarakat, sehingga berpotensi menghambat mobilitas karena semakin jauhnya jarak tempuh ke pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sosial.
2. Dalam hal usaha ekonomi, masyarakat terkendala modal, pemasaran, akses infrastruktur jalan kabupaten menuju tempat usaha pertanian yang kecil dan rusak.
3. Hampir 80% warga bekerja dibidang pertanian dan perikanan, terkendala sulitnya mendapatkan pupuk, harga pakan ikan yang mahal, akses transportasi dan infrastruktur jalan.
4. Masyarakat berpotensi kehilangan mata pencaharian pertanian, jika lahan pertanian yang digarap milik Kota Baru, jika sewaktu-waktu akan digunakan.
5. Pisang dan singkong juga banyak, tetapi kurang inovatif dalam pengolahannya.
6. Minimnya pengetahuan manajemen usaha pariwisata dan belum adanya kerjasama secara legal formal dengan Perhutani untuk mengelola objek wisata
7. Meskipun pendidikan mudah diakses, namun ada anak putus sekolah karena motivasi belajar rendah
8. Warga masyarakat banyak yang berpendidikan hingga SMA. Masyarakat bekerja sebagai kuli bangunan, buruh pabrik, dan pekerja kasar lainnya. Masyarakat yang bekerja di bagian administrasi atau manajerial masih sedikit.
9. Jiwa wirausaha dan kreativitas masih rendah, jika usaha cenderung meniru, dan mudah menyerah.

bappelitbangda

10. Masyarakat tidak mempunyai pekerjaan sampingan, jika penghasilan kurang maka warga akan meminjam ke pihak bank emok.
11. Kesadaran terhadap pemenuhan gizi masih kurang, jarang datang ke posyandu. Menderita penyakit cukup berat yang berkaitan dengan pernafasan, seperti TBC dan ISPA.

4.7. Gambaran Masyarakat Kecamatan Padalarang

Kecamatan Padalarang terdiri 10 desa dengan jumlah penduduk 179.542 jiwa. Kondisi jumlah penduduk padat dan menjadi wajah dari Kabupaten Bandung Barat. Kondisi wilayah sudah dataran perkotaan. Terdapat beberapa desa yang tipologi daerahnya seperti perbukitan dari Ciburuy, Tagog Apu, dan Campaka Mekar, selebihnya bentuk dataran perkotaan. Gunung Hawu Pabeasan dapat menjadi satu sektor wisata alam, namun saat ini pengelolaannya belum maksimal, perkembangan saat ini wilayah Padalarang sedang dikembangkan menjadi wilayah pemukiman, banyak sekali perumahan baru contohnya Desa Jaya Mekar. Imbasnya meningkatnya jumlah penduduk, darurat sampah dan peningkatan ekonomi karena pembangunan di Padalarang.

Desa Campaka Mekar masuk dalam kawasan Gunung Kapur memiliki potensi terkait batu kapur dan pasir. Dulu pernah dijadikan tambang, namun sekarang sudah tidak ada kegiatan penambangan. Kendalanya terdapat pada perizinan. Potensi SDM bidang perekonomian, banyak yang menjalankan usaha berupa olahan makanan seperti makanan ringan elot (olahan singkong), kerupuk, kembang ros, opak dan lain sebagainya. Pemasarannya belum luas dan kemasan masih dibungkus plastik biasa belum ada brand/label. Produk yang dijual ada yang masih mentah dan harus digoreng dulu dan ada olahan yang sudah jadi (siap makan). Pemasaran online sebatas melalui whatsapp di wilayah RW, belum melalui platform online shop.

bappelitbangda

Pelaku UMKM di Padalarang terbilang banyak sekali di satu desa bisa mencapai 2000 orang. Di Desa Kertajaya, UMKM sudah lebih modern dan aktif menggunakan medsos untuk pemasarannya. UMKM itu banyak namun terdapat gap (kesenjangan) antara pelaku UMKM di setiap daerahnya.

Potensi pertanian masih ada di Desa Campaka Mekar dan Tagog Apu saja, karena daerah yang lainnya sudah beralih lahan menjadi perkotaan akibat dari pembangunan tol Padalarang dan KCIC. Di Padalarang, ada juga potensi Kampung Coet di Desa Jayamekar, Kampung Kupat di Desa Kertamulya[10],

Di Padalarang, hampir rata di 10 desa ada kesenian Barongsai, Kecapi Suling, Singa Depok, Degung, Pencak Silat berupa Paguron macan tutul, yang sudah mendapat berbagai prestasi piala di tingkat provinsi. Yang berbeda hanya di Desa Tagog Apung ada Tutunggulang Lesung. Seni pencak silat selain tampil pada undangan, Paguron juga mandiri mengikuti festival dan event lainnya. Selain itu, ada juga yang melaksanakan acara penampilan pentas secara mandiri. Karakteristik masyarakat di Kecamatan Padalarang dan Desa Campaka Mekar kuat mempertahankan budaya dan tidak menyerah, selain itu di Desa Jaya Mekar juga terdapat Kampung Coet yang menggali inovasi cindera mata dan tidak mudah menyerah.

Pendidikan masyarakat sudah ada hingga perguruan tinggi. Sarana pendidikan mudah diakses[11], hanya Desa Tagog Apung yang cukup terkendala dalam mengakses pendidikan. Masyarakat sudah banyak yang lulus jenjang SMP-SMA, setelah lulus SMA mereka langsung bekerja ke industri karena di Padalarang sendiri sudah ada desa yang khusus menjadi kawasan industri dan menjadi pegawai di Kota Baru. Di Desa Campaka Mekar

[10] ada 1 rw pembuat kupat untuk dikirim ke penjual-penjual kupat khas padalarang. terlebih untuk hari raya itu mereka akan menghasilkan penghasilan yang besar

[11] 69 SDN, SMP 22, SMA 6, SMK 11, 1 universitas dan 1 STAI

bappelitbangda

untuk sarana pendidikan tersedia 1 SMP, 6 SD, 1 MI, dan 1 SMK. Namun di tingkat SMA dirasa kurang untuk sekolah negeri, sehingga banyak yang sekolah di sekolah swasta, terlebih dengan sistem zonasi sekarang makin sulit untuk masuk ke sekolah SMAN di Kabupaten Bandung Barat. Anak putus sekolah karena lebih disebabkan masalah ekonomi (besarnya biaya pendidikan), namun demikian di Kabupaten Padalarang sudah ada program persamaan kejar paket.

Pekerjaan utama masyarakat menjadi buruh pabrik, pekerja kantoran, wiraswasta, ASN dan pegawai industri. Masyarakat yang menjadi petani masih ada, tapi bukan mayoritas, kebanyakan petani tersebut sudah lanjut usia. Dominan petani adalah buruh tani yang menggarap di tanah milik orang lain. Banyak lokasi desa dijadikan lokasi industri, jadi setelah lulus sekolah langsung target bekerja di industri, ada juga yang menjadi pegawai penjaga toko. Selain pekerja industri banyak yang berdagang. Lapangan pekerjaan sudah mencukupi karena banyak bidang industri yang berkembang di kecamatan Padalarang terutama Desa Cimerang. Dalam hal pendapatan, jika melihat UMR sudah mencukupi kebutuhan hidup. Namun, dengan melihat gaya hidup yang tinggi sekarang ini, banyak masyarakat yang terjerat pinjol untuk kebutuhan gaya hidup. Tetapi, ada juga yang pendapatannya jauh di bawah UMR[12], namun mereka masih mampu mencukupi hidup hingga menyekolahkan anaknya. Saat ini masyarakat rata-rata memiliki pekerjaan sampingan tidak mengandalkan 1 pekerjaan. Sebagian mereka berwirausaha UMKM di bidang kuliner (olahan makanan dan minuman).

Layanan akses kesehatan sudah memadai, memiliki 3 puskesmas. Prevalensi Stunting di tahun 2023, sempat mengalami penurunan. Di tahun 2024, kembali mengalami kenaikan jumlah, namun belum dapat tervalidasi datanya oleh puskesmas dan intervensi dari pemerintah sedang berjalan

[12] UMR di Padalarang sebesar 3,5 juta

bappelitbangda

berupa pemberian makanan pendamping dan banyak program lainnya yg sedang berjalan. Di Desa Campaka Mekar juga stunting meningkat dari 17 bayi menjadi 54 bayi saat ini. Layanan posyandu memiliki kendala, seperti alat ukur banyak yang *error*, namun saat kader mau memperbaiki itu agak sulit karena harus menghubungi Perusahaan langsung, tata cara penimbangan, solusi puskesmas adalah mendatangi langsung anak stunting namun kebanyakan anak tersebut tidak stunting dan banyak terdapat kekeliruan data. Riwayat penyakit menular di Padalarang sebagian besar adalah TB, kendalanya banyak warga yang menutupi bahwa dia menderita TB hingga sulit melakukan skrining.

Desa Campaka Mekar sedang memproses pembentukan Bumdes baru, karena sebelumnya terdapat permasalahan yang menyebabkan tidak berjalannya Bumdes. Satuan usaha Bumdes bergerak dibidang alat ATK dan photocopy. Kelembagaannya hampir semuanya ada namun banyak yang tidak berjalan. Terkait Bumdes di Kecamatan Padalarang, banyak yang tidak aktif, dari DPMD juga sedang melakukan pendataan dan perankingan Bumdes untuk dilaksanakan penyegaran.

Selama ini, banyak program pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas. Tapi program-program tersebut seperti yang penting terlaksana, namun tidak ada keberlanjutannya. Program yang diinginkan untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya

- Peningkatan ketahanan pangan
- Pelatihan umkm untuk latihan pengemasan dan bantuan peralatan
- Bantuan operasional untuk pelestarian sosial budaya
- Memperbanyak lapangan pekerjaan
- Koordinasi dan fasilitasi untuk semua anggaran yang turun di desa yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dengan hasil yang sesuai dibutuhkan oleh desa dengan kegiatan yang jelas.

bappelitbangda

- Pelatihan BUMDES dari aspek manajemen organisasi, kepemimpinan dan manajemen usaha

Analisa

- Kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pergeseran, dari pertanian ke sektor industri, jasa, dan perdagangan.
- Memiliki jiwa wirausaha yang tinggi, terbukti dari Pelaku UMKM (olahan makanan) yang sangat banyak, sudah memasarkan secara modern melalui platform digital, tapi UMKM berjalan sendiri-sendiri, sehingga terdapat kesenjangan usaha dan ekonominya. Usaha UMKM, sebagian menjadi pekerjaan sampingan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup. Masyarakat pun cukup inovatif mengembangkan produk berbasis potensi wilayah (inovasi cindera mata coet)
- Kesenian tradisional masih dipertahankan dan sudah meraih prestasi. Akses pendidikan dan minat belajar tinggi
- Masyarakat relatif konsumtif dan hedonis, mengikuti gaya hidup perkotaan, jika perekonomian tidak mampu sebagian terjerat pinjol.
- Bumdes di Kecamatan Padalarang, banyak yang tidak aktif dan manajemen usahanya bermasalah

4.8. Gambaran Masyarakat Kecamatan Ngamprah

Potensi yang ada di wilayah Gado Bangkong kebanyakan sebagai petani sawah, buah, dan sayuran. Saat ini, masyarakat sedang membangun *greenhouse* untuk buah anggur dan sudah berjalan 3 bulan. Selain itu kebanyakan lahan menjadi bangunan sudah dibeli oleh pihak lain. Potensi di Kecamatan Ngamprah, terutama di Desa Cimanggu lebih banyak pertanian labu siam. Di daerah-daerah dataran tinggi juga ada Curug Cimanggu, namun

bappelitbangda

karena statusnya bukan tanah desa pengajuannya butuh waktu yang agak lama. Terdapat juga objek wisata Cipanas.

Di Desa Bojong Koneng, mayoritas pertanian dan perkebunan. Di desa ini juga menonjol kebudayaan. Ada juga waterboom Tani Mulya (Waterboom Tirtamulya). Desa Paku Haji juga sektor pertanian dan perkebunan karena wilayahnya terletak dataran tinggi, ada juga pariwisata pacuan kuda. Pariwisata dikelola oleh swasta namun untuk Curug Cimanggu dikelola oleh swadaya masyarakat sekitar. Belum banyak wisatawan yang datang ke Curug Cimanggu, hanya beberapa orang yang tahu saja. Desa Suka Tani, Desa Ngamprah dan Desa Bojong Koneng merupakan desa yang banyak bergerak di bidang pertanian. Untuk Perkebunan ada di Desa Cimanggu dan Paku Haji.

Perusahaan terdapat di dua desa yaitu Gado Bangkong dan Desa Cimareme. Perusahaan besar banyak di Cimareme yang memperkerjakan masyarakat setempat. Letak dua desa tersebut ada di jalan utama sehingga banyak perusahaan didaerah tersebut dan menarik pekerja di daerah sekitar. Tidak ada intervensi dari kecamatan untuk perusahaan-perusahaan. Potensi alam yang ada di desa-desa sudah dimanfaatkan secara optimal, petani sudah diberikan bantuan pupuk dan irigasi. Desa Cimanggu 2 tahun lalu memperoleh program desa digitalisasi. Pelatihan yang terakhir dilaksanakan di Desa Margajaya. Pelatihan Desa Sicantik untuk mengurangi angka pengangguran.

Kesenian tradisional dikembangkan di Kecamatan Ngamprah yakni Pencak Silat di Desa Tani Mulya dan Paku Haji. Di Bojongkoneng ada pengrajin wayang golek yang sudah dipasarkan, bahkan satu kampung menjadi pengrajin wayang golek. Karakteristik masyarakat tekun dalam bekerja. Desa Gado Bangkong, terdapat kesenian berupa grup calung sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan utamanya sebagai satpam dan lain-lainnya. Grup kesenian tersebut, sebulan bisa 2-3 kali tampil (tergantung panggilan). Karakteristik masyarakat di desa tekun dan tidak mengikuti orang lain (ikut-ikutan).

bappelitbangda

Rata-rata pendidikan masyarakat di Kecamatan Ngamprah, paling banyak sudah lulusan SMA. Saat ini, sedang mengajukan pembangunan SMAN 2 Ngamprah, lokasinya diantara Desa Cilame atau Mekarsari sedang proses pengajuan ke Dinas pendidikan tingkat provinsi. Juga sedang mengajukan permohonan pembangunan SMPN 5 di Desa Bojongkoneng. Di Desa Gado Bangkong sudah banyak, masyarakat lulusan SMA tetapi masih ada yang lulusan SMP. Akses pendidikan ada 3 SDN, 1 MTS, untuk SMA banyaknya warga melanjutan ke SMA yang ada di Padalarang karena belum ada SMA di desa. Anak putus sekolah banyak di tingkat SMP, faktornya karena ekonomi dan kurang motivasi belajar karena ingin bekerja atau bermain. Desa Mekarsari, masyarakat banyak yang lulus jenjang SMA/SLTA. Akses pendidikan di Mekarsari mudah dijangkau, hanya tidak ada SMA di desa. Sedangkan PAUD hingga SMP sudah ada di desa. Masih ada anak yang putus sekolah faktornya karena lingkungan keluarga dan ekonomi. Putus sekolah itu kebanyakan putus saat mau SMP. Di Mekarsari sudah ada sekolah paket A, B, dan C untuk memfasilitasi masyarakat yang butuh pendidikan lagi dan ingin memperbaiki kehidupannya. Untuk akses pendidikan mudah dijangkau dan yang sulit sekolah SMA karena jarak yang jauh. Desa Sukatani baru ada 3 SD dan 1 MI, PAUD dan TK tiap RW sudah ada namun sarana pendidikan tingkat SMA/SLTA tidak ada. Ada juga anak putus sekolah, sebagian besar putus sekolah dijenjang SMP karena faktor ekonomi dan kenakalan. Di Kecamatan Ngamprah dalam rumusan musrembang tahun 2025 harus ada usulan untuk kejar paket bagi yang tidak mendapatkan pendidikan contohnya di tingkat SD dan SMP. Dimohon untuk kedepannya diadakan usulan ini karena didesa sangat dibutuhkan apalagi untuk tingkatan SMP hingga SMA.

Di Desa Sukatani kebanyakan bekerja menjadi petani sawah dan karyawan swasta/buruh pabrik. Infrastruktur jalan untuk usaha pertanian 80% sudah bagus, dari bantuan ketahanan pangan sudah 3 tahun berjalan sekarang sedang dibangun pusat pertaniannya. Bantuan lainnya datang dari

bappelitbangda

kementerian. Jika pendapatan masyarakat di Desa Tanimulya tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, cenderung kebanyakan pinjam untuk usaha modal. Untuk peminjaman ke bank emok ada yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari, namun tidak banyak.

Usaha Bumdes sudah ada dari tahun 2019 bergerak di bidang usaha pembukaan kios dan sewa *sound*. Terdapat juga koperasi simpan pinjam juga di RW 2 anggotanya sudah ada dari luar daerah juga. Ada masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan contohnya di RW 3 dia mengelola ikan lele hidup sekarang sudah mulai maju. Jika dilihat di lapangan banyak UMKM yang maju seperti rengginang dan keripik. Usaha keripik sudah sampai Kota Bandung dan menjual lewat online dan pemesanan kirim pesan, sudah partai besar sudah memiliki karyawan juga.

Di Desa Gadobangkong masih ada anak stunting namun tidak terlalu tinggi sekitar 10%. Untuk kebutuhan gizi sudah tercukupi namun untuk spesifiknya harus mendata ulang. Tapi pastinya ada yang kekurangan makanan terutama di daerah perkotaan, namun untuk didesa sudah ada kegiatan tani yang bisa memenuhi kebutuhan makanan. Namun dari pendampingan PKH belum ada laporan masyarakat yang kelaparan tidak bisa makan. Namun untuk stunting, resiko nya pasti ada. Riwayat kesehatan di masyarakat Kecamatan Ngamprah ada DBD terutama di Desa Cilame sudah ada 10 orang, di Desa Ngamprah beberapa orang terkena Cikungunya.

Program yang diinginkan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan, yaitu :

1. Penambahan modal untuk UMKM
2. Penambahan peralatan untuk UMKM seperti alat untuk produksi keripik
3. Pelatihan wirausaha dan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, serta

bappelitbangda

4. Mewajibkan untuk usulan untuk kejar paket di RPJMDesa bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan.

Diagnosa Kemiskinan

- Pekerjaan masyarakat sebagian besar masih petani sawah, buah, dan sayuran. Infrastruktur jalan untuk usaha pertanian 80% sudah bagus
- Masyarakat sudah mendapatkan bantuan pupuk dan pelatihan digital
- objek wisata tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena lahannya bukan milik tanah desa, sehingga butuh perijinan dan kerjasama dalam pengelolaannya
- Karakteristik masyarakat memiliki jiwa wirausaha, tekun dan tidak mengikuti orang lain (ikut-ikutan). UMKM banyak yang maju dan menjalankan bisnis secara online
- Anak putus sekolah banyak di tingkat SMP, disebabkan faktor ekonomi, kurang motivasi belajar, ingin segera bekerja, bermain, dan faktor kenakalan
- Jika pendapatan masyarakat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari maupun modal, kebanyakan pinjam ke bank emok

4.9. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cisarua

Desa Sadang Mekar memiliki potensi di pertanian, untuk pemanfaatannya hanya sebatas menanam saja kemudian menjualnya, untuk pengolahannya belum ada karena tingkat pengetahuan SDM nya kurang. Jika harga sayur turun tidak ada upaya pengolahan, jika gagal panen pun dibiarkan saja hal tersebut sangat disayangkan. Hasil tani adalah sayur kol, tomat, dan cabai yang jika harganya turun dan gagal panen hasil tersebut diberikan ke tetangga atau dibuang. Untuk Perkebunan ada cengkeh dan palawija. Dusun 1 dan 3 cenderung pertanian dan dusun 2 cenderung di perkebunan cengkeh

bappelitbangda

dan palawija. Hasil tani dan kebun kebanyakan sudah dijual sekitaran Padalarang, namun untuk sayuran sudah dijual ke luar daerah. Untuk kebun cengkeh masyarakat hanya menanam, menuai dan menjual ke tengkulak belum ada Kerjasama dengan Perusahaan/pihak lain. Kebanyakan petani di desa menggarap lahan milik sendiri. Ada juga pabrik kayu, tapi tidak ada pabrik besar. Untuk potensi wisata di desa ada Curug Buntung tapi belum di maksimalkan karena lahannya masih milik warga. Potensi yang ada di desa belum optimal karena pemanfaatan jika sayur murah tidak ada proses pengolahan dan cenderung membuang.

Desa Jambudipa memiliki potensi yang tidak berbeda dengan Sadang Mekar, yakni pertanian, pariwisata dan peternakan. Mayoritas masyarakat menjadi petani. Petani kebanyakan di hasil sayur seperti brokoli, labu, dan selada air. Ada juga perkebunan cengkeh namun belum ada kerjasama dengan perusahaan/pihak lain. Pariwisata ada Nice Park (mini zoo dan permainan anak) sudah berjalan dan dibuka untuk umum hanya belum ramai padahal infrastruktur sudah bagus. Nice park dikelola oleh perusahaan swasta dan tidak kerjasama dengan pemda.

Kecamatan Cisarua memiliki banyak potensi di bidang pariwisata. Sektor pertanian, mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh tani dan menggarap lahan milik orang lain. Sektor yang mendongkrak ekonomi sebagian besar dari sektor pariwisata seperti *Nice Park*, *Natural Hills* (Desa Kertawangi), Dusun Bambu (Desa Kertawangi), dan masih banyak lainnya. Lahan usaha pertanian sebagian besar di Desa Pasir Langu, memproduksi paprika dan bunga potong. Hasil tani didominasi oleh produk sayuran.

Desa Kertawangi banyak memiliki potensi di pertanian, peternakan, dan pariwisata, desa wisata sudah menjadi *branding* desa. Di Desa Mekarwangi sudah ada *big farmer* yaitu agrowisata. Untuk potensi wisata ada Dusun Bambu, Natural Hills, Curug Pelangi, dan Curug Putrilayung. Bumdes mengelola Big Farmer sudah berjalan 3 tahun, kunjungan juga sudah banyak,

bappelitbangda

yang diutamakan wisata edukasi pertanian dan peternakan (pembibitan, penebangan dan panen). Ada juga wisata budaya yaitu Kampung Karuhun ada Singa Depok, pencak silat yang akan ditampilkan saat ada tamu, dan itu disesuaikan dengan paket. Untuk potensi peternakan ada kelinci, sapi, dan domba. Potensi peternakan itu adalah susu yang sudah di pasarkan ke Parongpong dan Cisarua itu hasil dari susu Desa Kertawangi.

Desa Cipada memiliki potensi alamnya dominan sebagai kawasan pertanian, untuk potensi wisata agak kurang jika dibandingkan desa lainnya. Rencana desa akan membuka embung desa untuk ketahanan pangan. Sering juga dijadikan wilayah touring motor tujuan ke mata air yang sudah bisa mengaliri beberapa RW didesa. Disamping kantor desa juga ada potensi pariwisata Bukit Senyum, namun kendalanya lahan tersebut milik perhutani sehingga kesulitan untuk mengelolanya menjadi potensi wisata. Hasil sayuran Desa Cipada bisa mencapai ribuan ton yang dipasarkan ke daerah lain. Untuk potensi yang ada di desa belum optimal dimanfaatkan karena meskipun dengan budaya yang ada sekarang memang ada spot bagusnya hanya saja terkait penganggaran, untuk membuka lahan pariwisata akan sulit jika dianggarkan oleh APBD.

Desa Teguhmukti memiliki potensi pariwisata tapi belum banyak dikenal dan belum banyak pengunjung, potensi ini baru dirintis. Untuk tempat wisatanya ada Curug Cipalasari, pendakian Gunung Burangrang melalui Legok Haji, dan perkemahan. Untuk wisata desa bekerjasama dengan perhutani dan LMDH karena posisinya terletak di tanah Perhutani untuk Curug Cipalasari. Kedepannya ingin menjadi desa wisata, sudah koordinasi dengan pihak LMDH dan membuat pokdarwis serta melapor ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KBB. Untuk potensi pertanian banyak hasil tani seperti sayuran, lemon, dan bunga potong (bunga krisan dan mawar) kebanyakannya untuk dekor pesta penjualannya pun sudah sampai luar daerah. Potensi peternakan ada sapi perah, sapi potong, dan domba daging. Hasil sapi perah macam-

bappelitbangda

macam ada yang sudah kerjasama ada juga yang pribadi, namun kebanyakan yang sudah kerjasama. Untuk pemasaran domba daging kebanyakannya untuk hari Idul Adha kalau hari biasa itu jarang kecuali untuk aqiqah (sesuai permintaan). Untuk potensi alam yang ada di desa sudah dimanfaatkan, namun dari segi lahan masih belum optimal karena masih luas lahan yang belum dimanfaatkan, karena pihak pengelola belum bisa mengembangkan karena keterbatasan anggaran. Padal banyak potensi yang belum dikembangkan, ada juga potensi air namun hanya dimanfaatkan oleh 1 RW saja (RW 10) padahal dulu sempat dimanfaatkan airnya ditarik menggunakan pipa, kebanyakan warga tidak mengerti jadi warga banyak yang menolak untuk pemasangan pipa.

Desa Pasir Langu memiliki potensi alam untuk pariwisata camping untuk kawasan kehutanan dikelola oleh LMDH. Untuk perkebunan ada cabai, paprika, bunga potong dan agro. Untuk pertanian tinggal 10 hektar tanah di warga dan untuk peternakan sudah tidak ada kelompok hanya ada satu dua orang saja. Hasil tani untuk dijual keluar daerah dan pemasarannya sudah bagus penjualannya sudah ke luar provinsi dan itu petani mandiri yang memiliki lahan pribadi. Sudah ada intervensi dari pemerintah seperti dibentuknya kelompok wanita tani, pembinaan, dan ada 1 kleompok ternak domba garut, bantuan pupuk dari perusahaan pupuk.

Kecamatan Cisarua memiliki anggaran yang terbatas untuk mengoptimalkan potensi desa, sementara ada beberapa fokus yang wajib dialokasikan oleh pemerintah desa. Secara umum potensi kecamatan itu di pariwisata, tapi jika berbicara teknis dari dinas untuk mengidentifikasi potensi pariwisata belum ada. Bahkan konsep pengembangan potensi pariwisata dari dinas pun belum ada gambaran, karena sulit jika mengandalkan anggaran desa. Belum ada kolaborasi antara pemerintah kabupaten, dinas terkait dan desa dalam meningkatkan potensi pariwisata untuk menambah pendapatan desa. Untuk pertanian di kecamatan masih fokus dalam bagaimana membuat

bappelitbangda

hasil tani yang baik, tapi tantangan kita itu masih dalam pemasaran produknya.

Kecamatan Cisarua untuk event budaya di kecamatan yang spesifik khusus tidak ada, namun di setiap desa sering dilaksanakan hajat lembur. Belum ada yang bisa ditonjolkan dari kebudayaan. Di Desa Teguh Mukti kesenian pencak silat, ada beberapa paguron pencak silat dan adu domba ketangkasan. Paguron pencak silat juga sudah mendapat panggilan-panggilan sampai ke luar desa. Desa Cipada terdapat kesenian Jaipong namanya Rosani Grup, ditahun 2015 mendapat bantuan alat untuk jaipongan namun karena manjemen yang kurang bagus jadi usahanya menurun. Ada juga kesenian angklung, ada tokoh kesenian pak Elan Jaenawan yang membuat karatagan di berbagai desa. Hanya saja sentuhan dari pemerintah kurang bisa memfasilitasi sehingga potensinya belum bisa dioptimalkan. Desa Sadang Mekar sendiri ada kesenian jaipongan, pencak silat, dan angklung tapi belum bisa dijadikan mata pencaharian utama hanya sebagai kerja sampingan. Untuk penampilan sesuai dengan permintaan/panggilan ke luar desa namun banyaknya tampil di desa. Desa Pasir Langu ada grup Kelininган dan Singa Depok tapi jangkauannya belum luas hanya sebatas pesta didalam desa. Karakteristik masyarakat tekun karena untuk panen paprika dan bunga potong itu memerlukan waktu yang lama, jika mereka ingin berganti maka mereka akan terkendala modal. Desa Kertawangi ada kesenian singa depok dan pencak silat yang tampil saat acara kemerdekaan, kesenian tersebut belum bisa ditampilkan secara maksimal karena kekurangan dana dan tidak memiliki kesempatan tampil, kecuali didalam desa. Ada juga kesenian jaipongan kurawa merdeka yang sudah mendunia dan mewakili Bandung Barat. Untuk tahun 2025 kecamatan sudah menganggarkan untuk festival Cisarua untuk menampilkan budaya dan UMKM yang diharapkan bisa menjadi agenda rutin setiap tahun dalam rangka memperingati HUT KBB. Target kebudayaan pihak desa bisa lebih mengedukasi warganya untuk mencintai budaya lokal.

bappelitbangda

Kendalanya saat ini mulai terkikisnya kecintaan generasi mudah terhadap kebudyaan lokal di kecamatan Cisarua. Semua desa harus mengembangkan *one village one product* untuk mengantisipasi harga sayur/hasil tani tidak turun. Setiap desa memaksimalkan potensi yang unggul didesanya.

Tingkat pendidikan masyarakat di desa Cipada mayoritas lulusan SMA/K, namun sekarang banyak yang menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi. Jika dilihat dari data desa mengalami kenaikan untuk tingkat pendidikan. Akses pendidikan sudah mudah dan sudah ada 3 SD, 1 SMP, dan 1 SMA swasta. Namun, masih ada beberapa anak yang putus sekolah di jenjang SD karena faktor rendahnya motivasi belajar. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Teguhmukti kebanyakan lulusan SMA. Sekarang sudah mulai berkembang sehingga sudah banyak lulusan SMA dan banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Fasilitas pendidikan sudah ada 2 SD, 2 MI, SMP swasta ada 1, SMA swasta ada 1. Anak putus sekolah dan lulusan SMP masih ada namun hanya sedikit, putus sekolah karena faktor ekonomi dan ketidaktahuan. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sadang Mekar sudah berangsur-angsur meningkat rata-rata lulusan sudah SMA. Masih ada warga yang putus sekolah dari SD/SMP karena kurangnya dorongan dari keluarga dan faktor ekonomi. akses pendidikan ada PAUD dan TK, 2 SD, 1 MI, dan ada MTS. Belum ada sekolah SMP dan SMA. Untuk melanjutkan pendidikan masyarakat memilih melanjutkan ke daerah Cipada, Padalarang, dan Cimahi. Tingkat pendidikan masyarakat di desa Pasir Halang dalam 10 tahun terakhir mengalami peningkatan yang asalnya lulusan hanya sampai SMP , seiring berkembangnya waktu dan mindset warga saat ini rata-rata 85%-90% masyarakat lulusan SMA. Untuk yang melanjutkan ke perguruan tinggi mengalami peningkatan sebesar 35%-40%. Di desa belum ada SMP dan SMA negeri hanya ada SMK dan Aliyah. Karena dengan hadirnya sistem zonasi menjadi kesulitan bagi orang tua menyekolahkan anaknya. Anak putus sekolah masih ada 3-4% karena pola pikir masyarakatnya, karena di Pasir Halang

bappelitbangda

sudah disediakan fasilitas pesantren dan beberapa pilihan solusi lainnya. Selebihnya tidak meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi banyaknya perempuan yang masih memandang pendidikan tinggi bukan kebutuhan utama. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Jambudipa, masyarakat rata-rata lulusan SMA dan Sarjana. Anak putus sekolah masih banyak ada 3 RW faktornya karena rendahnya tingkat kesadaran orang tua, kurangnya dorongan dari keluarga, dan faktor ekonomi. Untuk sekarang sudah beberapa anak yang mau melanjutkan kembali sekolahnya. Sarana pendidikan ada SMAN, SMK, Aliyah dan 5 SD. Yang belum ada itu bangunan sekolah SMPN. Tingkat pendidikan masyarakat di desa Padaasih masyarakat sudah 90% lulusan SMA. Sarana pendidikan ada 4 SD, 1 SMP, dan 1 MA. Untuk jenjang yang lebih tinggi kebanyakan melanjutkan ke daerah Cimahi. Anak putus sekolah belum ada laporan, dan 100% anak sudah bersekolah. Tingkat pendidikan masyarakat di desa Kertawangi ada PAUD RA ada 10, 4 SDN, 2 SMPN, MTS, MA, dan Pesantren. Terdapat juga BKBM untuk persamaan dan mendapatkan ijazah. Tahun ini, sudah 90% sudah kuliah dan masyarakat sudah melek pendidikan. Tingkat penndidikan masyarakat di desa Kendala di pendidikan adalah karena sistem zonasi. Tingkat pendidikan masyarakat di desa Pasirlangu ada 6 PAUD, 4 SDN, 3 MTS, Pesantren, dan 1 MA. Tidak ada anak yang putus sekolah, namun adanya anak yang tidak mau sekolah namun jumlahnya hanya sedikit. Untuk yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sudah banyak. Melihat dari tenaga pendidik di sekolah juga itu merupakan warga dari daerah sekitar. Kecamatan Cisarua, jika melihat data dari BPS tingkat pendidikan mayoritas masih di tingkat SMP. Untuk kecamatan Cisarua terdapat dua karakter yang berbeda yaitu karakter perdesaan dan perkotaan, untuk karakter pedesaan tingkat pendidikan tidak setinggi karakter yang perkotaan. Faktornya karena aksesibilitas, sarana prasarana, dan pendekatan sosiologis, seperti yang menjadi kuli bangunan yang menganggap pendidikan

bappelitbangda

bukan hal penting. Di daerah barat tingkat pendidikan itu kurang, maka dibutuhnya memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Desa Pasirlangu mayoritas warga menjadi petani. Meskipun jika dilihat dari penghasilan yang diperoleh masih kurang. Akses pekerjaan untuk masyarakat sudah mudah dan sudah ada pembukaan lahan untuk akses pertanian. Jika pendapatan masyarakat tidak mencukupi ada warga yang meminjam ke bank emok. Bumdes di desa kemarin baru penyegaran kepengurusan, bergerak di bidang air bersih dan pasar mingguan. 90% masyarakat bergerak dipertanian dan tidak ada koperasi. Masyarakat ada yang memiliki jiwa wirausaha.

Desa Sadang Mekar jumlah masyarakat yang bekerja 52% dengan mayoritas petani, meskipun tidak semua menggarap lahan sendiri dan ada yang menjadi buruh tani, sisanya pekerja bangunan, beberapa ASN dan buruh tani. Akses pekerjaan membutuhkan pelatihan ketenagakerjaan untuk anak baru lulus sekolah. Pendapatan sehari-hari apabila tidak cukup ada masyarakat yang menabung dan ada juga meminjam bank emok, tapi ada juga yang pekerjaan sampingan seperti IRT memiliki pekerjaan jasa pasang payet, warung, jual pulsa, dan lainnya. Bumdes baru pembentukan dan penyertaan modal di tahun ini, karena tahun sebelumnya mengundurkan diri dan tidak ada kepastian. Karakter kewirausahaan sudah ada banyak, namun butuh pelatiah lagi untuk lebih mendongkrak kewirausahaan seperti pelatihan pengembangan usaha.

Desa Teguhmukti jenis pekerjaan utama heterogen ada yang bekerja di swasta, wirausaha, namun mayoritas di pertanian dan peternakan dan ada lagi pekerjaan lainnya namun hanya sebagain kecil jumlahnya. Akses jalan 80% sudah mulai bagus untuk akses ke sekolah, pertanian, dan lainnya. Kendalanya di beberapa jalan akses mobil belum bisa masuk tapi untuk motor sudah aman. Ada juga pengangguran dan serabutan tapi tidak banyak. Masyarakat sebagian sudah banyak yang memiliki jiwa kewirausahaan. Di

bappelitbangda

desa juga sudah banyak produk unggulan yang desa bina seperti produksi UMKM kerupuk tulang, abon sapi, dan ali agrem yang setiap tahun dibina dan dipromosikan saat event. Jika pendapatan tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat masih ada yang memiliki tabungan yang tidak punya juga ada dan ada juga yang meminjam ke bank emok, bank keliling dan pinjol untuk modal ataupun kebutuhan sehari-hari. Koperasi sudah ada namun tidak berkembang dan banyak hambatan jadi sekarang sudah tidak berjalan. Bumdes di desa seperti mati suri, kemarin sempet aktif berkembang tetapi redup lagi.

Desa Pasirhalang mayoritas masyarakat petani dan peternakan, perekonomian cukup stabil. Di bidang pertanian mengalami sedikit kendala karena pendapatan dan pengeluaran tidak stabil, terutama di pertanian sayuran yang modalnya besar tapi pasarnya minim, jadi tidak seimbang. Pengangguran di desa sedikit jumlahnya karena diberikan contoh dari awal oleh orang tuanya yang petani dan peternak sambil membantu orang tua selagi masih sekolah. Untuk pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat memiliki tabungan, untuk peminjaman modal ke bank emok/bank keliling tidak ada. Namun ada beberapa persen pinjam ke bank emok/bank keliling untuk kebutuhan konsumtif. Ada koperasi khusus untuk peternak, beberapa tahun terakhir ada virus bagi sapi sehingga peternak mengalami kesulitan yang berdampak ke hasil produksi susu. Pekerjaan sampingan ada beberapa bagian diantaranya di bidang wirausaha dan dikembangkan dari susu ada yang membuat youghurt memanfaatkan sumber daya yang ada. Ada juga pengolahan basreng untuk ibu-ibu sebagai pekerjaan sampingan.

Desa Jambudipa jenis pekerjaan mayoritas di pertanian diangka 40% peternakan 20-25%, pekerja bangunan 10%, buruh/pekerja swasta 10%, dan pekerja pabrik 15%. untuk petani ada petani menggarap tanah sendiri dan buruh tani. Untuk akses ke pertanian sudah baik, ada beberapa PR tapi sekarang 70% untuk akses sudah lumayan bagus. Jika pendapatan masyarakat tidak mencukupi kebutuhan masyarakat ada yang memiliki

bappelitbangda

tabungan, untuk pinjaman ke bank emok/bank keliling/pinjol masih ada untuk kebutuhan konsumtif. Di desa ada yang memiliki deposito tetapi persentasenya masih kecil. Untuk yang bekerja ASN/TNI/POLRI masih sedikit. Untuk Bumdes tahun ini sedang berjalan lagi, tahun ini ada pengurus baru dan ada fokus di sarana air bersih untuk rumah-rumah yang bekerjasama dengan desa Kertawangi.

Desa Cipada mayoritas pekerjaan masyarakat menjadi petani, ada yang jadi ASN/tenaga pendidik. Namun mayoritas masyarakat menjadi petani yang keuntungannya sudah bisa dirasakan untuk membeli kendaraan/rumah. Jika pendapatan tidak mencukupi kebutuhan itu variatif di masyarakat ada yang memiliki tabungan dan banyak juga yang meminjam untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif. Bumdes secara operasional masih berjalan di bidang sumber air bersih, hanya saja Ketua Bumdesnya mengundurkan diri.

Desa Kertawangi mayoritas pertanian dan pertanian ada 50% didalamnya ada buruh tani juga, 50% ada PNS, wiraswasta. Dan akses ke pertanian dan peternakan sudah baik, tahun depan juga ada rencana memperbaiki akses jalan yang sudah rusak. Pertanian peternakan di tahun ini mendapatkan bantuan di daerah cilayung untuk memperlebar masyarakat agar bisa masuk mobil. Jika pendapatan masyarakat tidka mencukupi kebutuhan untuk bandar ataupun petani mereka miliki tabungan tapi ada juga yang tidak memiliki tabungan, untuk yang pinjam bank emok itu banyaknya untuk keperluan konsumtif. Di desa sudah membuat gerakan menolak bank emok tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa pinjaman konsumtif itu tidak akan terbayar. Ada juga yang mempunyai pekerjaan sampingan di saat kebutuhan utama tidak mencukupi. Untuk ibu-ibu sudah banyak yang memproduksi olahan makanan ataupun jasa payet dan kerajinan dari bekas bungkus kopi. Di desa juga sudah ada pembinaan untuk memasarkan hasil ibu-ibu dengan bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Untuk kewirausahaan banyak juga UMKM kami yang menjadi

bappelitbangda

perwakilan KBB dan Provinsi contohnya dian bambu. Pemanfaatan susu, kami juga menjual es krim dan youghurt itu yang memproduksi UMKM yang dipasarkan ke Koperasi desa lain, karena dari desa tidak punya koperasi. Untuk bumdes di desa sudah terbentuk dan bergerak di bidang pariwisata, air minum, pengolahan sampah, dan perdagangan jasa dan ekonomi.

Untuk pemenuhan gizi masyarakat sudah cukup baik, kecamatan juga menjalankan program pelita bening dan dari setiap desa memberikan makanan tambahan. Untuk Riwayat penyakit kronis kecamatan tidak ada data, namun kecamatan fokusnya di stunting, untuk TBC juga kami masih fokus di sosialisasi.

Permasalahan

- Pengolahan hasil produk pertanian belum ada karena tingkat pengetahuan SDM yang kurang
- potensi wisata di desa belum di maksimalkan karena lahannya masih milik warga luar, ada yang milik Perhutani, dan terkendala penganggaran
- perkebunan cengkeh belum ada kerjasama dengan perusahaan/pihak lain
- tantangan yang dihadapi petani dan UMKM terletak pada pemasaran produk.
- Masyarakat yang ekonominya rendah terkendala modal sambil menunggu panen
- anak yang putus sekolah karena faktor rendahnya motivasi belajar, kurangnya dorongan dari keluarga, faktor ekonomi, dan adanya anggapan bahwa perempuan berpendidikan tinggi bukan kebutuhan utama.
- Belum ada koperasi desa
- masih ada masyarakat yang terjebak pinjaman ke bank emok, bank keliling dan pinjaman online untuk modal ataupun kebutuhan sehari-hari.

bappelitbangda

- Bumdes di desa seperti mati suri, bahkan ada Ketua Bumdes yang mengundurkan diri.

Harapan program

- Pelatihan manajemen usaha (pengelolaan dan keuangan) pariwisata dan kewirausahaan
- Bantuan modal untuk pariwisata dari pemerintah kabupaten.
- Kolaborasi antara pemerintah, dinas dan desa dalam mengembangkan pariwisata
- Mengadakan Roadshow melihat potensi desa untuk dikembangkan
- Pelatihan pengelolaan hasil pertanian dan kewirausahaan
- Intervensi dinas pertanian/industri memasarkan hasil pertanian
- tersedianya fasilitas pendidikan sekolah SMP dan SMA di desa
- Pelatihan keterampilan bagi anak yang baru lulus sekolah

4.10. Gambaran Masyarakat Kecamatan Lembang

Desa Gudang Kahuripan memiliki potensi alam pertanian sayuran dan sebagian peternakan sapi bekerjasama dengan KPSBU, sebagian lagi merupakan pelaku UMKM di bidang olahan makanan dan pariwisata. Untuk bahan baku kebanyakan dari desa namun untuk bahan seperti singkong mengambil dari daerah lain, seperti Subang. Potensi di desa sudah cukup dimanfaatkan dengan baik, kendalanya Desa tidak memiliki Bumdes untuk mengelola UMKM. Bumdesnya baru masa pergantian dan belum optimal[13]. Desa Cikidang memiliki potensi pertanian, peternakan, dan ada potensi 400 hektar perkebunan kopi robusta di kawasan hutan. Ada juga petani jeruk lemon

[13] Pembinaan terhadap Bumdes dilakukan dengan Pengawasan dan pertanggungjawaban berupa LPJ juga ada pendamping dari desa. Saat ini Bumdes mengelola UMKM dan lapangan untuk senam dan pasar UMKM di minggu pagi.

bappelitbangda

dan sumber air bersih dari mata air yang memiliki PH yang baik untuk air minum, yang saat ini belum mulai dikelola. Untuk kopi sementara produksinya per tahun sudah cukup banyak dan sudah mulai dijual. Kendalanya adalah terbatasnya sarana dan prasarana juga sulitnya koordinasi desa dengan LMDH dan perhutani. Intervensi yang dibutuhkan dari pemerintah adalah kerjasama dengan pihak LMDH dan Perhutani juga pelatihan pemasaran. Bumdes belum berjalan, baru di tahap memulai dan mendorong untuk menggali potensi di desa.

Infrastruktur pertanian desa memerlukan saluran irigasi ke lahan pertanian, untuk petani kopi memerlukan alat giling kopi juga pelatihan agar masyarakat paham pemasaran digital. Kendala petani lemon adalah murahnya harga jual lemon, membutuhkan inovasi untuk produk olahan lemon agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Desa Cikole memiliki potensi dibidang pertanian dan peternakan juga memiliki potensi hutan seperti wisata. Pengembangan sekarang fokus untuk penarikan sampah di tempat wisata setiap hari untuk kemudian diolah menjadi produk jadi seperti kompos dan paving block. Di RW 10 sudah berjalan pembangunan 1 tungku sampah yang bisa mengambil dan mendapatkan penghasilan dari sampah-sampah dari 3 RW. Di desa memiliki 1 kelompok tani yang memiliki harga yang bagus sehingga mendapatkan penghasilan yang relatif terus menerus. Infrastruktur mulai berjalan seperti pembenahan drainase untuk antisipasi musim hujan.

Desa Sukajaya memiliki potensi perhutanan milik Perhutani yang dikelola oleh koperasi namanya Nyawang Bandung. Kendalanya belum ada legalitas dan sekarang kontraknya sudah habis dengan koperasi dan saat ini dikelola langsung oleh Perhutani. Kemarin banyak keluhan tentang sharing dengan Perhutani dengan sistem 40:60. 40% untuk pengelola dan 60% untuk Perhutani sedangkan pembangunan di area tersebut dari koperasi. Potensi lainnya ada di pertanian sayuran dan bunga juga ada peternakan. UMKM sedang berjalan pembinaan pemasaran digital dengan pihak ketiga yang

bappelitbangda

diawasi langsung oleh Bumdes. Meminta intervensi dari pemerintah untuk pelatihan pemasaran digital dan koordinasi kerjasama antara koperasi dan pihak Perhutani. Terkait infrastruktur masih banyak jalan desa yang belum baik. Objek wisata Cipanas Nagreg yang saat ini buka 24 jam dan kawasan tersebut melintasi jalanan desa dan dampaknya tidak semua warga merasa diuntungkan karena jalan desa juga belum baik, kemarin baru dilakukan pengaspalan sebagian jalan oleh Pihak Cipanas Nagreg. Meminta intervensi pemerintah untuk meninjau ulang kembali terkait perizinan wisata cipanas nagreg. Warga merasa dirugikan karena hanya sebagian warung-warung warga yang bisa masuk memasarkan produk di Cipanas Nagreg dan warga tidak setuju wisata tersebut dibuka 24 jam karena aktivitas masyarakat sekitar terganggu. UMKM bidang pengolahan makanan seperti keripik, yoghurt dan pengolahan kopi.

Desa Cibodas memiliki potensi pengembangan pariwisata, sudah ada daerah garapan dengan Perhutani, kemarin sudah membangun jalan usaha tani, tahun depan akan dibuka *jogging track* dan lahan *camping* yang akan dikelola oleh karang taruna yang bekerjasama dengan desa. Potensi lainnya adalah agrowisata. Di Desa juga ada kelompok tani yang menerima mahasiswa magang seperti kelompok Budi Rahayu. UMKM sudah ada beberapa rumah kemas sekitar 20 rumah. Potensi wisata alam belum ada, adapun wisata alam buatan yaitu ada maribaya yang menyerap tenaga kerja warga desa. Kendala dalam memanfaatkan potensi adalah kemauan masyarakat yang merasa gengsi jika lulusan SMA memegang cangkul/bekerja di bidang pertanian. Ada beberapa pemuda yang berhasil di perbengkelan namun saat ini karang taruna anggotanya bekerja di EO yang ada di Lembang.

Desa Kayuambon memiliki potensi alam yang tidak terlalu banyak, karena 60% wilayah ditempati oleh instansi pemerintah. Terdapat lahan pertanian hanya saja tidak terlalu luas. Masyarakat sudah mengembangkan 2 kelompok tani yang bergerak di bidang hidroponik sayuran dan pembibitan

bappelitbangda

kentang granola. UMKM ada beberapa namun tidak banyak, contohnya seperti industri rumahan pengolahan makanan keripik, rumah batik, dan sepatu yang pengrajinnya asli dari warga desa. Aktivitas pekerjaan masyarakat sebagian besar pekerja swasta, tukang ojek dan PNS. Kendala meningkatkan kesejahteraan adalah ketika penyerapan tenaga kerja di pembangunan hotel/tempat pariwisata tidak memberikan CSR. Selain itu, banyak tenaga kerja hotel atau objek pariwisata tersebut berasal dari luar daerah desa dan tidak menyerap warga desa dan kendala kelompok tani yang kesulitan menemukan akses CSR.

Desa Cikahuripan memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan. Untuk pertanian ada hidroponik, sayuran, dan buah-buahan. Potensi peternakan ada sapi perah, domba dan kelinci. UMKM di desa ada tapi yang dibawah BP2K hanya sebagian. Tempat wisata ada yang bekerjasama dengan Perhutani namun terkendala di akses infrastruktur jalannya masih licin. Bumdes sudah berjalan namun terkendala di peningkatan SDM pengurusnya. Air bersih sudah meterisasi sistemnya tapi perlu perkembangan lebih lanjut. Kendala pertanian ada di pemasaran yang didominasi tengkulak. Memerlukan pembenahan gapoktan yang berjalan tetapi belum maksimal, subsidi pupuk sulit untuk didapatkan, masyarakat tidak tahu siapa yang mengelolanya sehingga warga membeli pupuk subsidi sampai daerah Cikalong. Hasil susu perah hanya menjual ke KPSBU tidak ada inovasi olahan produk dari susu. Desa memerlukan bimtek/pelatihan pemasaran digital untuk bidang pertanian dan peternakan. Ada juga masyarakat di buruh harian lepas namun yang mendominasi itu pertanian, peternakan dan UMKM. Kendala infrastruktur untuk jalan desa 80% sudah bagus, namun desa terkendala di jalan kabupaten yang melintasi desa seperti tidak diurus dan kurang bagus, contohnya jalan Cikaramat Lembang. Masyarakat sudah melaporkan selama 4 tahun tetapi tidak ada tindak lanjut.

bappelitbangda

Desa Mekarwangi memiliki potensi di wilayah pertanian dan peternakan. Namun sudah 2 tahun ini ada alih fungsi lahan, 70% tanah di desa sudah milik orang luar. Untuk pertanian pun banyaknya menyewa lahan dan pindah garapan. Untuk wisata adanya cafe dan penginapan villa. Potensi di wilayah 50% pertanian dan 50% objek wisata. Juga ada potensi Tahura yang akan membuka wisatanya. Ada juga beberapa gapoktan, yang disinkronkan dengan program ketahanan pangan. Selain sayur mayur ada produk unggulan pisang yang lahannya menggunakan aset desa. Potensi di desa lebih ke pertanian, kendalanya ada di infrastruktur jalan, ada hampir 7 kilo jalan kabupaten yang rusak padahal akses jalannya banyak dilewati. Tenaga kerja di cafe dan villa, sebagian ada yang dari warga desa. Desa membutuhkan pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat agar SDM bisa masuk ke wilayah manajerial. Cafe dan villa bekerjasama dengan pihak desa sudah memberikan bantuan perbaikan jalan meskipun tidak optimal. Jalan yang rusak jalan Sindang Wangi hingga kampung Sukaresmi yang berbatasan dengan Kota Bandung. UMKM ada di industri pengelolaan makanan seperti arumanis dan wajit, yang sudah besar itu produksi arumanis yang mengelola dan produksi warga sekitar desa. Ada juga beberapa wilayah yang ke dekorasi, makanan, dan industri. Bumdes bergerak di bidang pengelolaan air yang bekerjasama dengan 4 desa. Kendala bumdes baru fokus ke 1 kegiatan belum bisa mengembangkan ke unit bisnis lainnya.

Desa Wangunharja memiliki potensi 90% dari pertanian, belum ada pihak lain yang masuk seperti cafe/villa, masyarakat masih menolak untuk hal itu. Ada juga potensi wisata alam Giri Wening dan Puncak Geurat namun terkendala di pengembangan batas wilayah yang belum selesai masih saling klaim antar desa. Jadi belum bisa maksimal dalam mengembangkannya. Kendala pertanian adalah infrastruktur jalan kabupaten Maribaya-Puncak Geurat sepanjang 6 kilometer yang menjadi jalan utama untuk mengantarkan hasil tani. Sudah mengajukan dari tahun 2014/2015 sampai sekarang belum

bappelitbangda

ada tindak lanjut. Keterampilan masyarakat ada UMKM olahan makanan simping, aromanis tetapi masih di perorangan sehingga kendala masih di pemasaran yang belum stabil dan belum secara online. Belum menerapkan pemasaran online karena ekspedisi jauh dan banyaknya hasil bahan baku namun produk olahan belum variatif, meskipun sinyal internet sudah bagus. Desa memiliki tempat sampah namun sebatas di RW masing-masing padahal jika dikembangkan bisa menjadi potensi ekonomi, sampah juga sudah ada yang dipilah dan dibuat pupuk namun terkendala di lahan yang terbatas untuk penyimpanan sampah. Sampah yang dijual baru sampah yang dipilah dan dijual ke pengepul. Bumdes sedang pembenahan, utamanya bergerak di bidang pertanian namun belum stabil untuk pemasarannya karena kurang relasi. Untuk pupuk bagi petani tidak susah namun yang susah itu daya belinya karena pupuk subsidi terbatas sehingga selalu kekurangan. Pupuk pun dibatasi dari jenis tanaman dan luas lahan, juga kuota tiap orang berbeda.

Desa Langensari memiliki potensi alam di bidang pertanian, peternakan dan sedikit wisata yang perlu dikembangkan. Potensi di masyarakat bersifat variatif, usaha juga pekerjaan juga variatif mulai dari petani, hingga buruh harian lepas dan pegawai swasta. Desa ada pengembangan bunga antik/bunga hias kaktus dan masyarakat banyak bergerak untuk membudidayakan bunga tersebut. Masyarakat juga ada yang melakukan usaha pertanian sayuran. Peternakan ada sapi perah dan kambing. Hingga saat ini, desa belum mengembangkan sektor pariwisata karena letak desa di sekitar sesar lembang, sehingga adanya kekhawatiran potensi bencana alam. Selain itu belum ada kemauan masyarakat untuk mengembangkan potensi, belum ada CSR dan kerjasama dengan pihak lain. Kendala pertanian maupun peternakan ada pada pemasaran, ketika kemarau lahan tidak bisa difungsikan untuk pertanian. Potensi masyarakat ada UMKM yang membudidayakan lebah madu dan keripik. Kendala UMKM adalah SDM. Masyarakat menginginkan mendapatkan uang secara instan sehingga banyak potensi belum bisa

bappelitbangda

dikembangkan. Pekerjaan seperti buruh dan kuli bangunan menjadi mayoritas karena warga ingin pekerjaan yang langsung menghasilkan uang. Untuk bumdes dan badan hukum sudah ada hanya akan dilakukan restrukturisasi di tahun 2025 karena bumdes tidak berjalan. Kendala lainnya ada dari segi infrastruktur untuk jalan desa sudah dialokasikan dengan baik, namun jalan kabupaten yaitu jalan dago giri yang menjadi akses perekonomian sudah rusak parah. Pangan ternak tidak terlalu sulit diakses kecuali terkendala di pupuk subsidi. Aktivitas ekonomi saat kemarau itu banyak yang alih pekerjaan ke kuli bangunan karena tidak bisa bertani. Terkait sampah sementara ini masih mengandalkan membuang ke mekarsari, dibantu oleh pihak kabupaten, di desa sudah ada bank sampah. Kendalanya sama masih pada kompetensi SDM. Untuk cafe, restoran dan rumah makan sudah ada, dan sampah dikelola sendiri oleh mereka karena tidak ada koordinasi dan sinergitas denga pihak desa.

Desa Suntenjaya memiliki potensi SDM dengan mata pencaharian adalah pertanian dan peternakan, detailnya petani sayuran dan peternak sapi perah yang bekerjasama dengan KPSBU Lembang. Untuk tanaman lainnya ada tanaman kopi yang ditanam di desa. Untuk potensi alam, wilayah desa dikelilingi oleh hutan baik dari perum perhutani ataupun PTPN 8. kendala dalam mengembangkan pertanian adalah dari segi pemasaran karena di desa masih banyak tengkulak dan bandar, petani lokal belum bisa mengolah dan memanfaatkan hasil panennya. Tidak ada akses ke pasar jadi harga yang dijual pun belum bisa maksimal. Kendala di peternakan adalah dalam pakan penyediaan konsentrat, tapi untuk pakan rumput masih bisa terpenuhi. Kebanyakan setelah sapi sudah diperah susu, langsung disetor ke koperasi KPSBU, hanya beberapa yang mengolah susu sendiri, contoh di kampung Pasir Angling mengolah sebagian hasil susu menjadi permen susu karamel. UMKM ada beberapa wilayah yang fokusnya sudah sampai legacy, tapi belum tersebar di seluruh daerah desa, hanya ada beberapa kampung saja,

bappelitbangda

contohnya kampung Pasir Angling, di kampung lain belum terlalu maksimal untuk potensi UMKM. Kampung wisata berbasis alam (kampung pasir angling) di desa ada bumi perkemahan Cijarung namun areanya di lahan Perhutani jadi harus ada PKS. Angling The Rest yang dikelola oleh masyarakat desa, untuk tematiknya ada Live in (penginapan) yang berbasis wisata edukasi. Potensi ATR selain menyediakan homestay, ada kegiatan edukasi terkait pengelolaan limbah kotoran hewan menjadi pupuk, edukasi pertanian, edukasi pengelolaan domba, dan edukasi kopi. Untuk pengembangan pariwisata masih berproses, desa fokus di sarana prasarana yang belum menunjang sepenuhnya. ATR ini sekarang dikelola oleh Bumdes. Pengembangan pariwisata terkendala pada aspek amenity, yakni sarana prasarana kebutuhan MCK di homestay yang belum menunjang, jalan menuju kawasan masih tahap pembangunan jalan. Jalan kabupaten sebagai jalan akses utama kondisinya rusak berat, yaitu Jalan Maribaya. Sudah mengajukan perbaikan ke dinas dengan bekerjasama dengan Desa Cibodas tapi sampai tahun ini belum ada tindak lanjut. Di desa Suntenjaya sedang mengembangkan pariwisata karena sudah mendapatkan SK menjadi Desa Wisata. Di desa ada jalan *touring offroad* sudah mulai banyak dikunjungi.

Desa Cibogo memiliki potensi pertanian dan peternakan. Peternakan salah satu desa penyuplai susu sapi KPSBU sekitar 60%. Pertanian fokus pada sayur dan hortikultura, ada juga pengepakan yang sudah ke luar wilayah. Bumdes sudah berjalan meskipun sebelum-sebelumnya stagnan atau jalan di tempat. Desa Cibogo ada peternakan domba, pertanian singkong dan pengolahan sampah yang nanti akan dibangun atau kawasan untuk mengumpulkan hasil tani. Untuk bantuan pemberdayaan dan perbaikan sudah diberi bantuan dalam pengolahan pohek.

Desa Gudang Kahuripan setiap tahun sering mengadakan *ruwatan lembur*, yang dikembangkan di setiap desa. Sebulan sekali ada kegiatan-kegiatan tari Jaipongan, sekarang pelatihnya sudah dikelola oleh Yayasan

bappelitbangda

budaya seni. Kendala dalam kesenian adalah kekurangan biaya untuk memfasilitas pelatih dan kegiatan anak-anak, karena dibayar oleh desa. Di yayasan ada juga kesenian wayang golek ke RW-RW dan sudah banyak dipakai di desa namun belum tampil ke luar karena belum ada promosi dan kendala pada peralatan yang terbatas. Nama yayasannya adalah Kamandaka milik pihak ketiga namun sudah kerjasama dengan desa. Kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis adalah UMKM, kita membuat lahan untuk UMKM berjualan dan dari desa lain sudah muncul. Salah satu kegiatannya kita mengundang perusahaan-perusahaan untuk kegiatan tersebut. Kegiatan ruwatan lembur ini sudah masuk ke televisi nasional (SCTV). Harapan desa ingin masyarakat memunculkan budayanya masing-masing, tempat untuk berlatih dan mereka akan datang dan tidak dipungut biaya.

Desa Sukajaya ada kegiatan pencak silat di RPJMDes sendiri ada bantuan untuk alat penunjang kegiatan pencak silat, selanjutnya ada kesenian Singa Depok ada 3 grup yang sering diundang saat pesta sunatan. Kendalanya ada pada alat untuk menunjang kegiatan karena alat yang dipakai sudah kurang layak.

Desa Cikole, seni budaya yang sudah berjalan yakni kesenian debus, gembyung, grup pencak silat, dan lengser. Minat masyarakat untuk mengundang grup seni budaya masih tinggi terutama di kesenian debus dan gembyung yang masih sering diundang dan ditampilkan di masyarakat baik dalam pesta atau acara HUT. Kendala mengembangkan kesenian yaitu kebutuhan tempat untuk sanggar seni dan peralatan (*sound system*). Untuk pencak silat sudah masuk program-program sekolah, namun pengembangan seni tradisional di lingkungan desa belum ada, karena terkendala tempat dan biaya.

Desa Wangunharja, terdapat kesenian budaya sepert dalang wayang golek, singa depok, tari jaipong dan gembyung. Masyarakat desa masih sangat berminat untuk penampilan seni tersebut dan sudah ditampilkan ke setiap RW.

bappelitbangda

Kendalanya adalah membutuhkan bantuan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan. Wayang juga sudah mulai tampil di desa lain namun untuk alat-alat mereka masih menyewa.

Desa Langensari untuk seni budaya memiliki potensi wisata dan budaya, yakni situs Gunung Batu dan kegiatan hajat lembur. Kesenian ada beberapa grup di sisingaan, pencak silat, seni tari jaipong, dan calung. Untuk modern ada dangdut. Kendalanya ada pada sarana prasarana, belum ada sanggar kesenian. Sudah ada pelaku yang melestarikannya, saat ini membutuhkan tempat sanggar, sosialisasi, sinergitas antara pemerintah, pengadaan alat (gamelan dan alat lainnya).

Desa Cikidang, terdapat beberapa kegiatan salah satunya adalah Perang Tomat yang sudah mendapatkan kunjungan dari Spanyol awal tahun 2024. Perang tomat lebih memberatkan kepada budaya, sudah terjadi sekitar 8-10 tahun yang lalu awalnya saat harga tomat turun dan saat acara ruwatan lembur sehingga sekarang mennjadi kebiasaan yang dilaksanakan setiap tahun.

Saat ini, desa sedang mengoptimalkan kegiatan tersebut agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Dari desa sudah memberikan sisipan anggaran, untuk potensi anak-anak yang rajin mengikuti kegiatan pencak silat dan seni tradisional. Kendalanya ada pada pemenuhan kebutuhan alat seperti gamelan dan sound system yang layak. Harapannya, dinas-dinas ketika menyelenggarakan event/kegiatan bisa mengundang kelompok kesenian yang ada di desa. Untuk singa depok juga sudah ada, namun terkendala pada jam terbang yang masing kurang banyak. Desa Cikahuripan sekarang terdapat beberapa grup yang menghasilkan nilai tambah ekonomi, namun pekerjaan utama para pelaku tetap sebagai petani dan peternak. Ada beberapa kegiatan yaitu pencak silat, wayang golek, kuda lumping, jaipong, dan kegiatan lainnya untuk menyalurkan hobi dan melestarikan budaya. Kendalanya tiap-tiap grup memang berbeda-beda

bappelitbangda

kebutuhannya, ada yang butuh alat, kurang job panggung, SDM yang monoton di kesenian sehingga memerlukan kolaborasi dengan pihak seperti ISBI untuk pelatihan inovasi budaya, ada juga masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan lain selain kesenian tersebut, sehingga ketika jarang/kurang job untuk tampil di panggung, tidak memperoleh penghasilan.

Desa Cibogo untuk seni budaya ada 2 jenis yang sudah cukup membanggakan yaitu tari jaipong yang sudah memiliki sanggar dan pencak silat yang sudah menjuarai beberapa kategori di tingkat nasional, kemarin juara 2 di tingkat Kodam Siliwangi dan tingkat nasional. Jaipong sudah *go internasional* dan ekspor. Kegiatan tersebut sudah menghasilkan nilai ekonomi bagi anak-anak dan remaja.

Desa Mekarwangi terdapat beberapa kelompok kesenian, seperti 2 kelompok gamelan, singa depok dan calung. Kendalanya dalam peningkatan seni budaya adalah kekurangan perlengkapan gamelan karena gamelan desa hanya ada 1. Desa sudah bekerjasama dengan pelatih SMPN 2 untuk kegiatan masuk ke sekolah. Kendala berikutnya adalah belum adanya sanggar untuk pelatihan dan tidak ada *sound system* dan perlu pelatihan-pelatihan dari dinas untuk edukasi grup kesenian. Ada grup calung yang inovatif membuat konten tiktok dan sosial media sehingga menghasilkan penghasilan tambahan.

Desa Suntenjaya memiliki kesenian, ada pergosi sisingaan, tari jaipong, benjang, calung, wayang juga ada 2 dalang lokal, ada juga di desa pasir angling ada kegiatan atraksi budaya pada kebudayaan lokal kaulinan barudak kadaplak yang memanfaatkan area track memakai kayu dengan tenaga manual, kaulinan barudak galah, dan menampilkan budaya kaulinan barudak lainnya. Kendalanya adalah kelompok budayanya banyak sehingga perlu sosialisasi dan edukasi kembali terkait budaya lokal di desa, terhambatnya kegiatan festival budaya karena covid sebelumnya sudah menjadi kegiatan rutinan dari tahun 2014. yang diharapkan adalah bantuan dana atau sarana prasarana untuk mendukung keberlangsungan kegiatan budaya. Skala

bappelitbangda

kesenian masyarakat masih skala mandiri belum ada sanggar/yayasan yang menampung.

Desa Gudangkahuripan untuk pendidikan desa memiliki 4 SD, 1 SMP jika ada anak putus sekolah langsung didatangi rumahnya. Kurang lebih sekitar 5% putus sekolah jenjang SMP karena yatim piatu dan fakir miskin, tapi minat sekolah pada masyarakat masih tinggi.

Desa Cikahuripan memiliki kendala infrastruktur pendidikan, tidak tersedianya SMP negeri dan SMA/K terlebih sekarang ada sistem zonasi yang akhirnya membuat masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk ongkos transportasi ke sekolah. Tingkat kemauan masyarakat untuk sekolah masih tinggi. Rata-rata masyarakat yang lulusan SD masih mendominasi tapi di kalangan lanjut usia, sisanya sudah lulusan SMP dan SMA. Untuk anak putus sekolah terkendala karena tidak mau sekolah karena ingin mencari uang tetapi jumlahnya sedikit. Ada juga program penyetaraan untuk kejar paket A,B,C.

Desa Wangunharja terdapat 4 SD, 1 SMPN, 1 MTS dan 1 Madrasah Aliyah. Tingkat pendidikan masyarakat umumnya sudah jenjang SMP/SMA. Anak putus sekolah karena faktor pernikahan dini dan ekonomi meskipun jumlahnya sedikit. Setiap tahun mengadakan penyuluhan pernikahan dini, ada juga anak yang memutuskan langsung berjualan daripada sekolah, untuk tahun ini kita mengadakan paket di desa bagi masyarakat yang putus sekolah.

Desa Langensari untuk akses pendidikan tidak terlalu sulit, letak desa di wilayah strategis, terdapat sarana pendidikan dari TK hingga SMA. Persentase pendidikan penduduk masih didominasi oleh pendidikan tingkat SMP sebesar 31%, SMA di urutan kedua dan SD di urutan paling akhir. Ada juga anak yang putus sekolah faktornya karena motivasi belajar yang rendah.

Desa Mekarwangi untuk pendidikan hanya ada 3 SDN. Kendalanya karena kebijakan zonasi, sekolah banyak diisi oleh desa tetangga, sehingga banyak keluhan dari warga. Kebijakan zonasi, menyebabkan banyak warga yang tidak bisa sekolah di tempat yang mereka inginkan, sehingga ada

bappelitbangda

beberapa anak yang tidak ingin melanjutkan. Tingkat pendidikan mayoritas SMP/SMA, di umur 90 keatas itu masih SMP. Minat belajar masih tinggi di masyarakat.

Desa Kayuambon untuk akses pendidikan sudah cukup memadai, terdapat 2 SDN, 1 SMAN, 1 SMP swasta, dan 1 SMA swasta. Terkait akses kesehatan, terdapat poliklinik dan klinik yang dekat dengan pemukiman. Untuk minat belajar di desa masih tinggi. Angka putus sekolah di desa masih kecil, terkait pendidikan tidak ada masalah.

Desa Sukajaya akses pendidikan terdapat 4 SD, 1 MTS, dan 1 SMA Swasta. Kendalanya di SMP tidak masuk zonasi Parongpong dan zonasi Lembang sehingga banyak keluhan dari masyarakat terlebih dari yang anaknya yang kurang berprestasi. Tetapi motivasi belajar dari anak-anak tinggi. Terdapat fasilitas perpustakaan desa dan fasilitas belajar komputer di desa. Anak yang putus sekolah itu terbilang rendah, di desa tergantung dari pengawasan orang tuanya. Dengan adanya KIP kadang-kadang masyarakat terlalu bergantung, karena orang yang mampu pun ingin masuk DTKS untuk KIP Kuliah padahal KIP Kuliah bisa di akses mandiri lewat website.

Akses pendidikan di Desa Suntenjaya terdapat 3 SDN, 1 Sekolah binaan, dan TK-PAUD. Akses SMP dan SMA itu menginduk ke desa sebelah yang terdekat, untuk SMAN itu aksesnya sekitar 13 km di SMAN 1 dan SMAN 2 Lembang dan itu terkendala di sistem zonasi sehingga jarang yang bisa masuk ke SMAN tersebut. Anak putus sekolah karena faktor ekonomi itu tidak ada, anak yang putus sekolah karena disabilitas seperti *down syndrome*. 2 tahun belakang ini minat belajar cukup berkembang, dilihat dari lulusan sekolah di kurun waktu 5 tahun ini berkembang dominan menjadi SMP dan SMA, untuk yang sarjana masih minim. Harapannya ingin punya sekolah negeri di tingkat SMP dan SMA terutama di SMA karena akses ke SMAN itu sulit karena tidak masuk zonasi sekolah negeri. Banyak anak lulus SMP itu melanjutkan SMK karena kendala zonasi padahal minat ke SMAN tinggi.

bappelitbangda

Desa Cikidang tingkat pendidikan di masyarakat desa dari tahun ke tahun membaik. Memang cenderung masih banyak yang tamata SD, namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya jauh ada peningkatan. Akses pendidikan bisa terjangkau untuk sebagian masyarakat, sebagian lagi tidak terjangkau karena faktor ekonomi sehingga berdampak banyak siswa yang putus sekolah karena orang tua tidak mampu menyediakan ongkos ke sekolah.

Desa Cibogo, akses kesehatan posyandu sudah ada dan sesuai jadwal, untuk puskesmas desa bersatu dengan Cikole. Desa memiliki 5 SD, 1 SMA, dan SMP swasta. Anak putus sekolah sudah tidak banyak, kebanyakan dikarenakan orang tuanya suka meminta tolong untuk anak-anak membantu pekerjaan orang tua. Minat belajar sudah tinggi dilihat dari PAUD yang selalu penuh.

Di Desa Gudangkahuripan relatif tidak mengalami masalah pangan. Masyarakat desa mendapat bantuan beras Bulog melalui kantor pos dan selalu dibagikan setiap bulan kepada masyarakat miskin yang terdata KIP/data DTKS, juga mendapat bantuan untuk stunting berupa telur ayam, dan mendapatkan makanan program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dari posyandu.

Desa Cikahuripan, masalah ketahanan pangan desa tidak ada masalah, banyaknya bantuan dari pemerintah tidak ada yang kelaparan. Balita yang teridentifikasi stunting disebabkan karena anaknya memang tidak mau makan. Penyakit di masyarakat itu tidak punya uang, meminjam ke lembaga pinjol, dan warung narkoba.

Desa Langensari, untuk ketahanan pangan sudah 2 tahun terakhir sudah melakukan kegiatan sesuai arahan dari Kemendes agar bisa mencukupi kebutuhan pangan di masyarakat desa.

Di Desa Gudang Kahuripan ada masyarakat yang terindikasi HIV, stroke, jantung, chikungunya dan DBD. Masyarakat yang tidak mengaktifkan

bappelitbangda

PBI bisa dibantu oleh pihak puskesmas. Desa Cikahuripan menghendaki layanan kesehatan diusahakan jangan ada kelas-kelas BPJS gratis, karena banyak masyarakat baik yang mampu ataupun yang terdaftar DTKS ingin mendapatkan BPJS gratis, dan itu menjadi kendala. Penyakit didesa yang menular ada dikalangan yang sudah tua. Di Desa Wangunharja, masyarakat yang berpenyakit, umumnya karena sudah tua dan penangananya itu dari program ketahanan pangan. Ketahanan pangan sudah mencukupi sehingga masyarakat tidak ada yang kelaparan. Desa Langensari, masyarakat dapat dengan mudah mengakses kesehatan. Puskesmas ada di Cibodas agak jauh, namun karena infrastruktur jalan sudah baik, sehingga tidak ada kendala untuk mengakses sarana kesehatan, selain tersedia juga puskesmas pembantu, dokter umum, dan klinik bersalin. Penyakit umumnya didominasi oleh demam, cacar, dan lainnya. Untuk penyakit jantung stroke, kanker ada namun persentasenya tidak banyak.

Desa Mekarwangi sudah tersedia sarana dan prasarana kesehatan yang berdekatan dengan Kota Bandung, namun permasalahannya fasilitas kesehatan terbilang masih jauh juga. Untuk BPJS, pemerintah desa hanya bisa membantu mendaftarkan. Riwayat penyakit banyak yang terkena DBD, penyakit tersebut banyak dibawa oleh masyarakat luar sehingga menyerang warga desa. Kepedulian untuk mengaktifkan BPJS/PBI masih kurang. Warga yang menggunakan BPJS/PBI kebanyakan digunakan untuk berobat ke rumah sakit besar saja, sedangkan untuk layanan kesehatan di puskesmas, sebagian besar masyarakat tidak menggunakan PBI. BPJS/PBI jarang digunakan lama tidak terpakai, BPJS/PBI yang lama tidak terpakai langsung tidak aktif. Fasilitas kesehatan masih jauh sekitar 7 km untuk ke rumah sakit/puskesmas Lembang. Di desa ada puskesmas pembantu namun aktifnya untuk posyandu.

Di Desa Kayuambon, untuk kebutuhan bantuan kesehatan tidak terlalu tinggi karena masyarakat bisa memenuhi fasilitas kesehatan tersebut secara mandiri. Desa Sukajaya, terdapat fasilitas Kesehatan ada puskesmas

bappelitbangda

pembantu yang seminggu sekali keliling, ada puskesmas dan klinik, saat ini tidak ada kendala. Masyarakat yang sakit sudah difasilitasi desa untuk membantu ongkos dari dana desa dengan alokasi 3%. Desa Suntenjaya, akses kesehatan puskesmas terdekat itu berada di Desa Cibodas, polines di tahun ini tidak ada, tahun depan sudah bermitra dengan puskesmas akan disediakan pustu. Penyakit jantung, diabet dan lainnya ada beberapa namun skalanya di desa tidak banyak. Dominan hanya penyakit umum musiman yang disebabkan oleh faktor cuaca. Desa Cikidang, Kesehatan warga masih umum, untuk DBD itu musiman paling hanya 1 atau 2 orang, sedangkan masyarakat yang memiliki penyakit berat itu tidak banyak. Putus sekolah itu kesadaran orang tua masih kurang bahwa pendidikan itu penting. Minat belajarnya beberapa tahun ini sudah meningkat. Kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan terutama gizi sudah dianggap penting untuk masyarakat. Di Desa Cibog, penyakit yang dialami masyarakat kebanyakan penyakit lambung, panas, TBC meskipun jumlahnya sedikit.

Permasalahan yang dihadapi

- Kendala petani kopi terletak pada terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan kopi dan sulitnya koordinasi desa dengan LMDH dan Perhutani. Sharing dengan perhutani (40: 60) dianggap tidak menguntungkan.
- Untuk pertanian, infrastruktur jalan dan irigasi belum menunjang. Pemasaran hasil pertanian masih dikuasai tengkulak/bandar.
- Gapoktan yang yang ada belum berfungsi secara maksimal, selain itu ada juga kendala memperoleh pupuk bersubsidi. 70% tanah yang dapat digarap untuk pertanian sudah dikuasai orang luar. Disaat kemarau, lahan tidak difungsikan untuk pertanian. Petani beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan. Jika hasil pertanian tidak laku di

bappelitbangda

pasaran, petani belum bisa mengolah dan memanfaatkan hasil panennya.

- Untuk peternakan, Hasil susu perah hanya dijual ke KPSBU tidak ada inovasi olahan produk dari susu, atau pasar lain yang menampung susu. Selain itu, kendala penyediaan pakan konsentrat
- Manajemen usaha Bumdes belum optimal termasuk karakter SDM pengurusnya masih lemah, serta relasi untuk pemasaran masih terbatas.
- Memiliki potensi sumber air bersih yang belum mulai dikelola
- Pengelolaan sampah dapat menjadi potensi, tetapi kendaraan pengangkutan, tempat penyimpanan, dan alat pengelolaan sampah masih terbatas. Café/restoran/tempat wisata mengelola sampah sendiri karena tidak ada koordinasi dan sinergitas dengan pihak desa
- Anak muda lulusan SMA tidak mengoptimalkan sumber daya yang ada karena merasa gengsi jika memegang cangkul/bekerja di bidang pertanian. Beberapa pemuda lebih memilih usaha perbengkelan atau usaha jasa sebagai EO yang ada di Lembang
- hotel/tempat pariwisata yang dikelola swasta tidak memberikan CSR, kesempatan kerja banyak untuk tenaga kerja dari luar daerah dan tidak menyerap tenaga kerja warga desa
- Pengembangan wisata alam Giri Wening dan Puncak Geurat terkendala pengembangan batas wilayah yang belum selesai masih adanya saling klaim antar desa.
- UMKM masih berjalan secara prorangan perorangan, kendala pada pemasaran yang belum stabil dan belum secara online.
- Pengembangan UMKM juga terkendala pada SDM, masyarakat umumnya menginginkan mendapatkan uang secara instan sehingga

bappelitbangda

meskipun banyak potensi yang belum bisa dikembangkan. Pekerjaan seperti buruh dan kuli bangunan menjadi mayoritas karena warga ingin pekerjaan yang langsung menghasilkan uang.

- Jarak yang ditempuh untuk Jasa ekspedisi sangat jauh, dan masyarakat belum memiliki pengetahuan mengolah produk hasil pertanian dan potensi alam secara variatif.
- Sebagian desa sudah kreatif dan inovatif mengelola sumber daya, tapi sebagian besar belum. Pengembangan pariwisata masih berproses, berdasarkan 4 aspek manajemen pariwisata, aspek atraksi banyak tersedia di Lembang, tetapi tidak ditunjang oleh aspek amenity, aksesibility, dan anxiliary.
- Minat masyarakat mengundang grup seni budaya tradisional masih tinggi, tapi pengembangan seni tradisional di lingkungan terkendala fasilitas sanggar dan pembaharuan alat-alat penunjang kesenian. Terdapat pelaku seni yang tidak memiliki pekerjaan lain, sehingga ketika sepi job manggung, tidak memperoleh penghasilan.
- Minat belajar sesungguhnya tinggi, tetapi anak putus sekolah banyak disebabkan faktor ekonomi (yatim piatu dan fakir miskin), sistem zonasi yang akhirnya membuat masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk ongkos transportasi ke sekolah (karena tidak masuk zonasi di sekolah negeri terdekat, dan terpaksa sekolah di swasta yang tidak sesuai dengan harapan, lebih jauh dan mahal), keinginan segera bekerja dan mencari uang, pernikahan dini, faktor disabilitas seperti down syndrome, dan ada orang tua yang meminta anak membantu pekerjaan orang tuanya.
- Tingginya angka masyarakat miskin, salah satunya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah masih sangat tinggi,

bappelitbangda

masyarakat yang mampu ingin masuk DTKS untuk mendapatkan KIP Kuliah.

- Penyakit di masyarakat itu tidak punya uang, meminjam ke lembaga pinjol, dan warung narkoba.
- BPJS-PBI yang jarang digunakan/lama tidak terpakai, langsung tidak aktif tanpa pemberitahuan, sehingga masyarakat terkendala akses layanan kesehatan ketika masyarakat membutuhkan.

Program yang dibutuhkan

- Intervensi pemerintah untuk memfasilitasi kerjasama desa dengan pihak LMDH dan Perhutani
- perbaikan Infrastruktur jalan kabupaten yang rusak (jalan kabupaten Maribaya-Puncak geurat, jalan Sindang Wangi hingga kampung Sukaresmi yang berbatasan dengan Kota Bandung, Jalan Dago Giri, dan Jalan Maribaya) dan saluran irigasi.
- Dukungan sarana prasarana (tempat penampungan sampah dan alat pengolahan sampah) dan kendaraan pengangkutan sampah, serta dukungan regulasi agar desa dapat menarik sampah di tempat wisata.
- intervensi pemerintah untuk meninjau ulang kembali perizinan wisata cipanas nagreg yang tidak memberikan dampak pada masyarakat, tetapi aktivitas 24 jam mengganggu ketertiban di masyarakat.
- pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat agar SDM bisa masuk ke wilayah manajerial.
- pelatihan pemasaran, perluasan pasar dan pemasaran digital
- pelatihan inovasi produk olahan produk-produk pertanian
- pelatihan manajemen pariwisata

bappelitbangda

- Pelatihan membuat konten-konten di media sosial untuk penghasilan tambahan
- Setiap event/kegiatan pemerintahan bisa mengundang kelompok kesenian yang ada di desa, dan perlu pelatihan-pelatihan untuk edukasi grup kesenian yang inovatif
- Mendukung program penyetaraan untuk kejar paket A,B,C bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan
- Sosialisasi, sinergitas, dan koordinasi antara BPJS, Pemda KBB, dan pemerintah desa terkait BPJS-PBI

4.11. Gambaran Masyarakat Kecamatan Parongpong

Potensi desa-desa yang ada di Kecamatan Parongpong kaya akan potensi alamnya. Desa Cihanjuang Rahayu, Karyawangi, dan Cihideung sudah masuk desa wisata. Di dataran yang lebih tinggi terdapat potensi perkebunan yang dikelola oleh swasta. Ada juga wisata bobo cabin, penginapan yang dikelola oleh Eager yang ada di Desa Karyawangi. Di Desa Cihideung terdapat desa wisata bunga yang dikelola masyarakat dan *park zoo* (swasta). Pertanian sayur mayur, masih ada yang memanfaatkan sebagian tanah milik warga sendiri tapi hasilnya tidak banyak. Selain pertanian, ada juga kegiatan peternakan. Ada juga wisata petik jeruk. Dahulu sempat mau dibangun objek wisata Curug Cibebreg, namun karena ada penemuan mayat sehingga objek tersebut tidak dimanfaatkan. Pemerintah desa sudah mengajukan permohonan bantuan kepada Pemda KBB untuk bisa membuka kembali objek wisata tersebut, karena memiliki potensi yang bagus jika dikembangkan. Untuk kampung warga sekarang dimanfaatkan lahannya oleh warga setiap minggu sekali, dijadikan pasar oleh masyarakat, hingga yang berjualannya sudah dari berbagai desa luar Kecamatan Parongpong.

bappelitbangda

Desa Cigugur Girang memiliki potensi di bidang ekonomi yaitu komoditas pertanian sayuran, bunga potong, bunga bibit yang dibagi menjadi beberapa zona.

- Zona 1 untuk peternakan sapi dan kambing,
- zona 2 untuk petani greenhouse bunga potong, pabrik bunga mawar,
- zona 3 ada pertanian, campur ada juga greenhouse, bunga bibit dan tanaman hias,
- zona 4 pertanian di wilayah sekitar sebelum ciwaruga namun sedikit menggunakan lahan pemda,
- zona 5 untuk UMKM dan pekerja buruh kasar.

Di beberapa zona memiliki ciri khas masing-masing, ada yang produksi yoghurt, rengginang dan rangining. Untuk hasil susu ada yang diolah jadi yoghurt dan disetorkan ke koperasi. Di desa juga ada gastronomi yaitu makanan khas sunda yang diolah oleh ibu-ibu dan diawasi oleh dosen UPI. Desa Cihideung memiliki potensi wisata bunga Cihideung yang sangat dominan di bidang ekonomi, sebagian masyarakat Cihideung adalah petani tanaman hias dan peternak.

Beberapa tahun terakhir, biasanya ada untuk bantuan pupuk dan lainnya untuk kelompok tani. Namun kemarin mendapatkan bantuan alat membajak sawah, padahal petani di desa tersebut merupakan petani tanaman hias. Dinas memberikan bantuan yang tidak sesuai dengan masyarakat. Desa Cihanjuang Rahayu ada kelompok tani dan sudah ada bantuan pupuk juga ada penyuluhan dari dinas pertanian.

Kesenian di Kecamatan Parongpong, ada beberapa kelompok seni lengser yang sudah menghasilkan nilai ekonomi, ada juga tari jaipong. Ada juga kearifan lokal, karnaval tahunan seperti kegiatan sasapian yang dipentaskan setiap agustus yang sudah menjadi agenda tahunan di KBB. Ada

bappelitbangda

juga kegiatan melestarikan budaya hajat air yang disebut *irung-irung* yang dilaksanakan di sumber mata air yang dilaksanakan setahun sekali.

Desa Cigugur Girang tiap tahunnya, diadakan hajat lembur dan hajat bumi yang mengangkat kelompok pencak silat (kini sudah masuk PSSI). Remaja karang taruna melakukan kegiatan khusus anyaman bambu dan sudah mendunia. Desa Cigugur Girang sekarang sedang menginisiasi untuk menjadi desa yang memanfaatkan bambu, juga ada tanah carik sekitar 2 Ha ditanami bambu, semua bambu dimanfaatkan oleh remaja/anak muda.

Masyarakat di Kecamatan Parongpong memiliki karakteristik usaha utama tetap berjalan, biasanya ibu-bapaknya petani namun anaknya punya inovatif tersendiri mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat fokus dan tekun pada usaha peternakan dan pertanian. Terdapat 3 desa yang heterogen seperti desa Ciwaruga, Cihanjuang, dan Sariwangi yang berbatasan dengan kota, sehingga usaha pertaniannya sudah tidak ada. Di desa-desa ini berkembang sektor jasa dan perdagangan (warung dan jualan online). Masyarakat di Parongpong juga banyak yang bekerja menjadi TNI/POLRI/ASN.

Seiring dengan perkembangan zaman, ada peningkatan dari lulusan SD, sekarang sudah ada perubahan, target kecamatan itu lulusan SMA. Orang lanjut usia itu masih banyak lulusan SD/SR, namun sekarang paling rendah masyarakat berpendidikan SMA. Bahkan, banyak siswa yang tidak tertampung di SMA karena tingginya keinginan untuk untuk melanjutkan sekolah. Akses sekolah adanya dipinggir jalan sehingga bisa mudah dilalui oleh transportasi. Kendalanya adalah di sarana yang masih kurang, peminat banyak namun sarana SMA dan SMP tidak mencukupi.

Desa Cihanjuang Rahayu, akses masyarakat ke sekolah SMA tidak mencakup seluruh masyarakat, karena terkendala kebijakan zonasi, jadi banyak yang ke swasta. Rata-rata masyarakat sudah banyak lulusan SMA, namun lulusan SMP masih tinggi. Harapannya menambah dan memperbanyak

bappelitbangda

sarana sekolah untuk menampung warga dari berbagai RW. Ada anak putus sekolah namun tidak terlalu banyak, disebabkan faktor ekonomi seperti ongkos dan biaya bekal sekolah. Ada beberapa yang stunting, tapi sudah sedikit karena banyak program pemerintah. Desa Cihideung secara umum hampir sama karena zonasi, tidak bisa masuk kemana-mana terutama untuk akses sekolah SMA. Untuk akses jalan ke Bandung dan ke Lembang dekat, tetapi untuk sarana pendidikan sangat kurang. Rata-rata pendidikan SMP-SMA. Anak muda banyak yang kuliah. Tidak ada yang putus sekolah karena faktor ekonomi, masyarakat sudah melek pendidikan, orang tua banyak mendorong anaknya untuk melanjutkan pendidikan.

Desa Cihanjuang Rahayu hampir 85% warga bekerja sebagai petani dan peternak sapi perah untuk susu. Masyarakat lebih banyak yang bekerja dibandingkan pengangguran. Saat ini, justru susah mencari pekerja untuk menggarap pertanian karena sudah banyak yang bekerja. Akses infrastruktur untuk pertanian dan pendidikan di desa sudah baik. Masih ada masyarakat yang mengandalkan bank emok, jika pendapatan tidak mencukupi karena proses lebih mudah. Bumdes sudah berjalan, tetapi hanya untuk mencukupi kebutuhan karyawan. Terdapat koperasi susu namun milik swasta perorangan.

Desa Cihideung mayoritas warga menjadi petani dan peternak.

- Dusun 1 banyak petani sayur,
- Dusun 2 banyak petani sayur, petani bunga dan sebagian besar petani buah dalam pot,
- Dusun 3 petani tanaman hias yang ekspor ke amerika,
- Dusun 4 petani sayur, peternak sapi perah dan pedagang.

Untuk akses jalan sudah banyak yang bagus. Masyarakat yang meminjam uang ke bank emok memang masih ada tapi sekarang sudah berkurang. Masih ada yang punya tabungan, tapi ada juga yang mengandalkan

bappelitbangda

bank emok. Bumdes sedang menjalankan usaha Perusahaan Air Minum (PAM Desa). Kendalanya pada debit air, karena rebutan dengan PT. Tirtawening Kota Bandung. Terdapat koperasi unit mekar yang menjalankan usaha susu dan koperasi dana bersama.

Kecamatan Parongpong, sebagian besar infrastruktur jalan sudah banyak bagus sekarang sedang fokus pada pemeliharaan. Bumdes Desa Cihideung sudah ada bantuan dari mahasiswa Telkom untuk pemasaran digital, namun dari Bumdes ditekankan untuk pembuatan website sehingga perlu bimbingan agar masyarakat bisa menggunakannya[14]. Kecamatan Parongpong merencanakan 7 desa diarahkan untuk mengikuti kegiatan pendampingan manajemen, pemasaran dengan pemanfaatan teknologi modern untuk memasarkan produk. Masyarakat Desa Cihideung, ada yang menjadi pengusaha yang sudah berkembang hingga bisa ke Amerika untuk budidaya tanaman-tanaman langka, hingga diundang untuk menjadi narasumber ke Amerika.

Prevalensi stunting di kecamatan sudah banyak penurunan. Masyarakat juga banyak yang sedang menjalankan program stunting. Desa juga kompak fokus ke penanganan stunting. Selalu ada kerjasama antara puskesmas dan Dinas kesehatan untuk penanganan stunting ini, Desa selalu melakukan pemantauan sehingga angka stunting sudah dapat ditekan. Di Desa Cihideung menjadi lokus stunting, realita dilapangan banyak kondisi tumbuh kembang anak yang sangat aktif karena faktor genetis, tetapi banyak dianggap stunting. Asupan gizi di Kecamatan Parongpong, pemberian vitamin berjalan lancar. Banyak anak yang dianggap stunting karena genetis, tetapi sebenarnya untuk asupan gizi sudah baik. Desa Cihideung ada beberapa dibawah garis kemiskinan, tetapi secara umum untuk asupan gizi sudah meningkat. Desa

[14] Saat ini, rutin mahasiswa dan dosen Telkom intensif mengajari teknologi di Bumdes

bappelitbangda

Cihanjuang Rahayu sudah banyak angka penurunan stunting dan secara gizi sudah baik.

Program yang diharapkan dari pemerintah

- Bantuan permodalan bergulir ekonomi keuangan untuk meminimalisir masyarakat meminjam ke bank emok
- Pendampingan di bidang tata Kelola keuangan dan pemasaran digital untuk UMKM
- Pelatihan pengelolaan sampah untuk masyarakat Desa Cihideung dan Desa Cihanjuang Rahayu, termasuk bantuan lahan untuk membuat TPS
- Pembangunan sarana pendidikan sekolah di desa terutama di SMA dan SMP

Diagnosa Kemiskinan

- Secara umum, modal sosial di Kecamatan Parongpong relatif sudah baik. Masyarakat yang kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada berbasis potensi wilayah. Masyarakat lebih banyak yang bekerja dibandingkan pengangguran
- Remaja karang taruna berjiwa kreatif, inovatif, dan memiliki jiwa wirausaha (anyaman bambu dan mendunia)
- Kesenian dan budaya tradisional mendapat apresiasi untuk dilestarikan
- Bumdes sedang menjalankan usaha Perusahaan Air Minum (PAM Desa), serta terdapat koperasi unit mekar yang menjalankan usaha susu dan koperasi dana bersama

bappelitbangda

- Minat belajar dan kesadaran masyarakat sudah tinggi akan pentingnya pendidikan. Sayangnya tidak didukung oleh ketersediaan sarana pendidikan SMA dan SMP yang tidak mencukupi. Sehingga ada yang masuk ke sekolah swasta. Ada anak putus sekolah mesi tidak terlalu banyak, disebabkan faktor ekonomi seperti ongkos dan biaya bekal sekolah yang lumayan besar.
- Pemahaman pentingnya asupan gizi sudah baik. Pemerintah desa dan masyarakat desa proaktif menangani masalah stunting.
- Penyuluhan kepada masyarakat sudah cukup sering baik dari pemerintah maupun perguruan tinggi, dan bantuan pemerintah pun kerap diberikan, sehingga usaha pertaniannya relatif maju. Hanya saja ada salah satu bantuan alsintan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran (petani bunga diberikan alat traktor pembajak sawah), serta akses jalan sudah banyak yang bagus.
- Kekuatan ini juga didukung oleh lokasi alam yang sejuk dan indah, sehingga banyak tempat-tempat menarik yang dijadikan objek wisata.

4.12. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cikalong Wetan

Pekerjaan masyarakat sebagian besar buruh harian lepas, buruh tani, buruh pabrik garmen, dan pelaku UMKM pengolahan makanan. UMKM olahan keripik singkong. Bahan baku singkong dibeli dari petani masyarakat sendiri. Untuk penjualan keripik belum memanfaatkan e-commerce maupun pemasaran secara online. Olahan singkong juga belum masuk ke supermarket. Tetapi penjualan keripik singkong oleh UMKM tersebut, sudah

bappeltbangda

lintas kabupaten, hanya saja pemasaranya memang belum digitalisasi. Selain keripik singkong, ada juga yang diolah menjadi tepung, dari tepung ini bisa dibuat berbagai macam olahan. Cuma masyarakat terkendala modal, selanjutnya tepung mocaf juga belum familiar, masyarakat masih mengkonsumsi tepung biasa, lalu harga jualnya pun tinggi. Meskipun produksi tepung Mocaf sudah pernah dicoba, namun usaha ini memang tidak berlanjut. Untuk olahan singkong, bahan baku masih banyak tersedia, hanya saja belum ada variasi baru, baru sebatas olahan keripik singkong.

Selain pengrajin singkong, ada juga masyarakat yang menjadi pandai besi, seperti membuat bedog, parang, dan cangkul. Kapasitas produksi sesuai pesanan. Sebagian besar lagi masyarakat menjadi petani sawah, dan masih menjadi kegiatan utama, hanya saja sumber airnya sudah mulai berkurang. Pembangunan Kereta Api Cepat (KCIC) salah satu diantaranya yang menyebabkan semakin berkurangnya sumber air. Dahulu desa-desa di Cikalong Wetan, banyak kegiatan masyarakat di bidang peternakan, namun sejak pembangunan kereta cepat, kebun karet jadi tidak ada, karena ditebang habis. Rumput pun berkurang, sehingga peternak kambing mengalami penurunan karena susah mencari pakan. Sungai dan sumber mata air menjadi rusak akibat pembangunan KCIC[15], padahal sungai tersebut sudah lama menjadi sumber air oleh warga untuk keperluan peternakan dan pertanian. Dekat terowongan KCIC, dulu airnya banyak, tapi sejak pembangunan KCIC, sekarang airnya menjadi berkurang. Selain singkong, Kecamatan Cikalong Wetan juga memiliki sumber daya bambu dan kayu.

Untuk pertanian, subsidi pupuk saat ini sulit didapat, bahkan tidak ada. Petani minim informasi. Dulu pernah ada kartu tapi tidak ada gunanya,

[15] ada 3 sumber mata air di RW 9 Desa Rende (sungai2 rusak) terkena jalur lintasan kereta api cepat.

bappelitbangda

bantuan yang diberikan hanya satu kali. Subsidi pupuk, benih, dan obat pertanian dapat mengurangi pengeluaran para petani. Untuk cara pengolahan dari pertanian, masyarakat membutuhkan pelatihan tersebut, pelatihan pemupukan atau penanaman yang baik. Bagi masyarakat Desa Rendeh, segala macam bentuk bantuan dari sektor pertanian saat ini minim informasi, masyarakat banyak yang tidak tahu. Masalah pertanian juga dihadapi, ketika panen, petani membutuhkan mesin agar panen bisa lebih cepat karena sekarang panen masih dilakukan secara manual.

Masyarakat juga ada yang memiliki potensi membuat kerajinan, namun pemasaran dan modalnya yang kurang. Beberapa masyarakat pengrajin, membuat kerajinan dari bambu, seperti membuat "boboko"[16]Untuk saat ini ada pembuatan boboko, dan lainnya namun susah pemasarannya. Begitupula dengan pengrajin hiasan dari bambu, selain kendala modal juga terkendala pasar. Sedikitnya minat pasar, karena produk kurang memiliki daya tarik, selain pengerjaannya lama, karena belum menggunakan alat. Di Kecamatan Cikalong Wetan, banyak komoditas singkong, bambu dan pisang.

Masyarakat juga memiliki ketrampilan menjahit, karena ibu rumah tangga di Cikalong Wetan dulu eks- pegawai garmen. Umumnya, perempuan yang usianya lebih dari 40 tahun. Disamping karena usia, warga pekerja garmen banyak juga yang keluar, meskipun belum berusia 40 tahun. Hal itu disebabkan karena jam kerja tidak teratur. Meskipun jam masuk kerja pukul 7.45 namun pekerja harus sudah mulai kerja dari jam 7. Pulang kerja seharusnya jam 4, tapi pekerja seringkali diharuskan lembur sampai jam 8, dan uang lemburan tidak dibayar. Masyarakat yang bertahan bekerja di Garmen tersebut, dalam keadaan terpaksa karena didesak kebutuhan meskipun perlakuannya tidak manusiawi. Setiap audit atau Sidak dari Dinas

[16] Produk kerajinan bahan bambu untuk peralatan rumah tangga pengganti tempat nasi.

bappelitbangda

Ketenagakerjaan, pekerja harus berbohong. Pekerja garmen merasa tidak ada tempat untuk menyampaikan keluh kesah, sehingga perlakuan seperti apapun pekerja harus menerima. Bagi pekerja yang sakit, hanya diijinkan ke klinik, 1 jam setelah dari klinik harus kerja lagi. Untuk warga desa yang bekerja di garmen tetap banyak karena kebutuhan dan penghasilan dari garmen dianggap lebih dari cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian masyarakat di Cikalong Wetan yang tidak lagi bekerja di Garmen, sudah mendapat bantuan mesin jahit dari Dinas Sosial, namun masyarakat di RW lainnya belum ada bantuan tersebut.

Selain menjahit, ada juga yang punya usaha pengolahan produk pupuk dari kotoran sapi, bahan bakunya bekerjasama dengan peternak kandang sapi. Namun terkendala dengan fasilitas pengolahan, seperti bangunan tempat pengolahan dan mesin. Pengolahan ini hingga sekarang masih berlanjut dengan fasilitas seadanya, namun juga terkendala pasar karena persaingan dengan sesama pengelola pupuk. Di Dusun Cigeublik ada sekitar 20 orang yang mengelola produk pupuk dari kandang sapi tersebut. Pengolahan sampah daun kering juga dapat dijadikan potensi ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya, masyarakat Desa Rendeh pernah memberikan jasa pengolahan sampah daun kering dari Perumahan Kota Baru Parahyangan.

Lapangan pekerjaan di Kecamatan Cikalong Wetan masih terbatas, wilayah belum ada lapangan pekerjaan baru maupun menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hal yang dilakukan Pemerintah Desa sebatas pembinaan, pemberdayaan, dan pelatihan, diantaranya pembinaan ternak, berikut bantuan ternak secara berkelompok. Hanya saja, program ini belum efektif, karena dari kelompok ternak sendiri hanya sedikit yang berhasil, sebagian lagi ternaknya tidak berkembang atau bahkan usaha peternakannya hilang.

bappelitbangda

Di Desa Rende, misalnya memiliki modal tanah adat, hanya saja ketika ingin diusahakan menjadi desa wisata, program tersebut tidak berkembang. Sampai saat, ini pemerintah desa masih mencari cara bagaimana memajukan desa dan mensejahteraan masyarakatnya. Setiap program yang digagas pemerintah, kurang mendapat respon dari masyarakat, karena masyarakat umumnya ingin program yang dapat dirasakan langsung oleh mereka. Selain itu, masyarakat juga kurang konsisten, ketika harga turun, semangat mereka pun menjadi turun. Program-program desa tidak berlanjut juga sangat tergantung pada kepemimpinan desa, ganti kepala desa ganti program, dan meninggalkan program sebelumnya, meskipun program tersebut bagus untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Peran kelembagaan seperti Bumdes, belum berdampak ke ekonomi masyarakat. Bumdes banyak yang vakum karena manajemen usaha tidak berjalan dengan baik. Pengelolanya merupakan tim sukses dari kepala desa, bahkan ada keterlibatan masyarakat daerah lain (yang bukan dari warga desa tersebut). Koperasi belum ada di desa. Rembug desa selalu dilakukan, masyarakat pun menyampaikan aspirasi tapi belum ada realisasi. Dalam mengatasi masalah kemiskinan, masyarakat merasa adanya kebuntuan[17]. Sesungguhnya masyarakat memiliki banyak keluh kesah dari sektor, pertanian, peternakan, perikanan, dan pengairan, hanya saja jembatan aspirasi dan penghubung aspirasi ini belum ada.

Untuk pendidikan, sebagian besar berpendidikan SMA, bahkan ada yang lulus dari perguruan tinggi. Kendala pendidikan umumnya jarak tempuh, untuk masuk ke sekolah negeri dianggap sulit, karena ada kebijakan zonasi. Biaya sekolah di swasta itu lebih berat karena banyak biaya seperti PKL, biaya

[17] Dinyatakan oleh salah satu masyarakat Dusun Cigeublik, Desa Rendeh Kecamatan Cikalong Wetan, pada wawancara 9 November 2024

bappelitbangda

bulanan, transportasi dan lainnya. Rata rata pendidikan masyarakat usia sekolah sudah di jenjang SMA/SMK, meskipun baru sedikit masyarakat yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kebanyakan masyarakat masuk ke SMK negeri atau swasta. Tetapi bantuan untuk pendidikan di SMK realtif tidak ada. Biaya Uang iuran pembangunan SMK berkisar 2 juta sampai 2,7 juta.

Setiap kesempatan kerja atau bursa kerja selalu disampaikan melalui forum komunikasi RT/RW melalui media komunikasi digital. Terdapat perubahan sosial di masyarakat, jika dulu setiap rumah pasti punya kambing, karena rumput untuk pakan ternak itu tersedia banyak. Sekarang, masyarakat yang memelihara kambing hanya sedikit[18]. Kegiatan sehari-hari masyarakat pasti ke kebun, sawah, atau ladang, untuk generasi sekarang masyarakat beralih ke Handphone.

Layanan kesehatan sudah bagus dan prosedur berobat pun mudah, namun masih terkendala jarak yang jauh. Layanan kesehatan relatif tidak ada masalah, karena iuran BPJS banyak dicover oleh perusahaan maupun pemerintah.

Program yang diinginkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya menghendaki pelatihan dan pembinaan. Pemerintah pernah memberikan bantuan traktor yang dikelola oleh karang taruna, namun pelatihan tidak sering diberikan, bahkan beberapa desa belum pernah mendapatkan pelatihan. Mayoritas pekerjaan masyarakat desa itu sebagai petani dan peternak, sehingga bantuan yang mereka inginkan adalah peningkatan usaha peternakan karena potensinya sudah ada, seperti :

- Pelatihan penanggulangan penyakit ternak,

[18] Di pemukiman masyarakat desa, dari sekian banyak rumah tangga, paling masih 5 RT yang mengurus dan memelihara ternak kambing.

bappelitbangda

- Pelatihan pembuatan pakan ternak,
- fasilitasi pengolahan pupuk dari hasil kotoran ternak,
- Bantuan pengairan,
- Bantuan mesin panen dan mesin rontok, sehingga dapat meringankan beban dan waktu petani
- Bantuan benih berkualitas
- penyuluhan budi daya pertanian yang baik, karena saat ini masyarakat masih menggunakan teknik pertanian tradisional.
- Penyuluhan penggunaan pupuk pertanian, benih, dan pemanfaatan teknologi pertanian
- Pelatihan pemasaran
- Bantuan modal untuk pertanian, peternakan, maupun kelompok pengrajin, serta
- Pelatihan manajemen usaha bagi BUMDES
- Pelatihan pengelolaan organisasi BUMDES (Tugas, Fungsi, dan Pertanggungjawaban BUMDES)

Diagnosa kemiskinan

- Keterbatasan akses pendidikan
- Sempitnya lahan pekerjaan dan kesempatan kerja
- Berkurangnya Sumber daya (air dan pakan ternak)
- Minimnya pengetahuan dan ketrampilan bidang peternakan dan pertanian
- Minimnya pengetahuan dan daya kreasi untuk meningkatkan daya tarik produk
- Keterbatasan modal dan kemampuan menembus pasar

bappelitbangda

4.13. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cipendeuy

Potensi SDA pertanian, terdapat persawahan yang dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya Desa Nengleng dan Desa Jatimekar. Di Kecamatan Cipeundeuy sudah ada kelompok tani. Produksi hasil pertanian berupa Palawija, Jagung, Beras Timun, Terong Ungu, Dan Cabai. Tanah yang digarap kebanyakan tanah milik pribadi. Untuk potensi pariwisata terdapat juga potensi pariwisata Waduk Cirata, terdapat tempat makan/ kuliner, namun belum ada harga tiket masuk untuk ke Waduk Cirata. Pariwisata di waduk Cirata menyerap tenaga kerja warga Desa Ciroyom, yang mengelola Desa. Sumber daya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Di Kecamatan Cipeundeuy sering melaksanakan Hajat Bumi untuk merayakan hasil sawah, namun perayaan-perayaan tersebut belum menghasilkan uang. Kesenian tradisional yang bernilai ekonomis adalah kesenian Kuda Renggong di Desa Cinarag dan Desa Nangleng, pencak silat di desa Bojong Mekar berupa padepokan. Masyarakat cenderung tekun dan fokus pada kegiatan taninya masing-masing (setiap petani memiliki fokus tanamannya masing-masing).

Rata rata pendidikan masyarakat sudah jenjang SMA. Pekerjaan masyarakat ada bekerja di pabrik dan yang lainnya banyak juga ke luar kota untuk jualan di pasar. Jumlah sekolah memadai dan akses ke sekolah sudah mudah. Ada beberapa yang putus sekolah karena faktor ekonomi keluarga, kondisi keluarga (ada anggota keluarga yang sakit/memilih membantu keluarga), tetapi motivasi untuk sekolah masih ada di kalangan anak sekolah.

Jumlah masyarakat yang sudah bekerja. Jenis pekerjaan utama buruh harian lepas dan bertani. Masyarakat yang bekerja menjadi buruh pabrik biasanya di pabrik Cikalong (Kwangdook). Akses pekerjaan dan lapangan pekerjaan masih kurang di Desa Cipeundeuy. Banyak yang pinjam ke bank emok biasanya untuk kebutuhan sehari-hari dan modal usaha. Kendala di masyarakat untuk membangun usaha adalah kendala dalam modal.

bappelitbangda

Masyarakat yang memiliki usaha adalah usaha kolam jaring terapung, namun sekarang usaha tersebut dibatasi oleh PLN dan usaha lainnya kebanyakan menjadi pedagang dan warung sembako.

Untuk daya masyarakat mencukupi kebutuhan hidupnya sudah bisa mencukupi sehari-hari. Masyarakat bisa makan 2 kali sehari. Riwayat penyakitnya adalah diabetes, rata-rata penyakit diabetes yang sudah lansia. Akses kesehatan sudah ada dua puskesmas di Kecamatan Cipeundeuy. BPJS sudah hampir semua terdaftar dan dapat dipakai di puskesmas.

Permasalahan

- Anak putus sekolah karena faktor ekonomi dan dukungan keluarga
- Banyak yang pinjam ke bank emok biasanya untuk kebutuhan sehari-hari dan modal usaha
- Kendala di masyarakat untuk membangun usaha adalah kendala dalam modal

Program yang dibutuhkan

1. Bantuan alat pertanian seperti pupuk
2. Bantuan modal pertanian
3. Pelatihan pertanian

4.14. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cipatat

Pekerjaan masyarakat sebagai pengrajin Batu, salah satunya membuat batu jadi asbak. Sudah ada masyarakat yang mengelola Sampah Organik (menjadi kompos), bantuan yang sudah diberikan motor pengangkut sampah, harapan kedepannya ingin mendirikan bank sampah. Masyarakat juga ada yang bekerja sebagai petani dan pedagang (eks PHK covid). Usaha UMKM membuat keset berbahan baku sisa kaos kaki yang disambung-sambung jadi keset (tapi kapasitas kecil, profit sedikit), tapi bahan baku keset, impor dari

bappelitbangda

daerah lain. Waktu membuat keset terlalu lama, bahan membuat keset terbatas. Bahan bakunya semula gratis dari Cijerah, tetapi sekarang jadi mahal (per bal nya 150 ribu), bahannya pun campur, jd harus disortir lagi.

Pekerjaan sampingan masyarakat adalah berdagang. Pedagang kuliner (Rangining), bahannya susah, pemasaran sudah bagus di Pasar Tagog, pemasaran online melalui WA, belum melakukan pemasaran di e-commerce, karena jika menjual di Toped dan Shopee terkendala syarat batas minimal produksi (min 1000).

Masalah pertanian adalah pupuk, dan sarpras/alat pertanian/ALSINTAN, bantuan pupuk diberikan pemerintah, dengan syarat masuk kelompok tani, meskipun tidak memiliki kartu tani, tapi bisa mengakses bantuan subsidi pupuk (diagnosa terkait pupuk, kurang informasi), untuk traktor sudah ada bantuan dari pemdes. Jualan kuliner, hambatan harga bahan baku naik, tapi hasil penjualan sepi (jualan kuliner basah). Mayoritas petani (perkebunan) memanfaatkan lahan perhutani, mengembangkan kopi. Permasalahan pada pemasaran, modal, dan alat penggilingan. Menggiling ke bandar dan dijual ke bandar, tapi selisih rugi 1kg hampir 20k. Selama ini terkenal kopi pangalengan, tapi ambil dari Cipatat. Robusta lebih bagus, tapi masyarakat memilih arabica, karena teknik memanen robusta berbeda, masy tidak memiliki pengetahuan tekniknya, padahal robusta nilai jualnya lebih bagus. Masyarakat menghendaki ampas kopi pun dapat bernilai ekonomi.

Masyarakat umumnya di pertanian, pertambangan dan perdagangan, tapi keberlanjutannya jatuh bangun, pembinaan, permodalan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari bahkan untuk modal, masyarakat ke Bank keliling, bank emok (terjerat hutang), syarat bank emok/bank keliling syaratnya harus punya usaha. Untuk kuliner, bahan baku mahal, seperti terigu, minyak goreng, gas, dll, jika harganya dinaikan, sedangkan masyarakat daya belinya rendah, sehingga pedagang kuliner tidak

bappelitbangda

berkelanjutan karena pasarnya habis. Untuk pertambangan, masyarakat mengais sisa-sisa pertambangan.

Pertanian banyak memproduksi singkong, padi, dan sayuran. Untuk pertanian, masyarakat tidak semangat karena keterbatasan pupuk, modal, bahan baku, dan hasilnya yang tidak signifikan (masyarakat semangat berusaha jika hasilnya dapat dirasakan langsung dan cepat). Untuk kuliner sudah kreatif, karena mengikuti *demand* pasar .

Pendidikan, mayoritas SD, jarak tempuh SD jauh naik turun gunung, SMP terbuka, kendala di biaya dan jarak tempuh, putus sekolah SD banyak . Masyarakat yang dekat dengan jalan banyak yang sampai Universitas. Sekolah persamaan banyak dan mudah diakses, dan ada pesantren sambil sekolah, sekolahnya sabtu minggu. SMP di daerah Margaluyu, utk SMA di Padalarang, Cipatat. Banyaknya kuli di pabrik (Pemerintah Desa memberikan memo untuk bekerja, sehingga kesempatan kerja terbuka). Dulu ada koperasi, karena kurang koordinasi, tapi kendala modal dan kepatuhan bayar, sehingga ke bank emok.

Masyarakat sudah produktif, perlu pendampingan secara mutu dan perluasan pasar. Harga bahan baku yang terus naik, kadang pedagang/petani merugi. Sebagian besar tidak memiliki usaha/pekerjaan sampingan.

Jaminan kesehatan tidak dibayar, karena tidak punya uang. Ada kader kesehatan yang membantu masyarakat untuk mendapatkan KIS. Untuk penanganan sampah, DLH sudah turun membantu bank sampah, masyarakat diminta membuat struktur bank sampah

Permasalahan

1. minimnya informasi tentang pupuk bersubsidi
2. masalah pada pemasaran, modal, dan alat penggilingan kopi
3. minimnya pengetahuan budidaya dan teknik memanen robusta

bappelitbangda

4. Masyarakat umumnya di pertanian, pertambangan dan perdagangan, tapi keberlanjutannya jatuh bangun
5. Untuk kuliner, bahan baku mahal, seperti terigu, minyak goreng, gas, dll, jika harganya dinaikan, sedangkan masyarakat daya belinya rendah, sehingga pedagang kuliner tidak berkelanjutan karena tidak ada pembeli
6. Pendidikan, mayoritas SD, jarak tempuh SD jauh naik turun gunung, sudah SMP terbuka, kendala di biaya dan jarak tempuh, putus sekolah SD cukup banyak
7. Dulu ada koperasi, karena kurang koordinasi, tapi kendala modal dan kepatuhan masyarakat membayar, sehingga masyarakat kembali ke bank emok
8. Sebagian besar masyarakat, tidak memiliki usaha/pekerjaan sampingan

Program yang diinginkan

- Bantuan pengolahan sampah dan Lahan tempat pengolahan (mendirikan bank sampah)
- Pelatihan dan Pendampingan
- Bantuan pembinaan dan permodalan untuk pertanian dan UMKM
- Bantuan Peralatan (alat pertanian, kopi, kerajinan, pupuk, benih)
- Kemitraan (bahan baku dan pemasaran)
- Menggalakkan Program pendidikan persamaan

4.15. Gambaran Masyarakat Kecamatan Cipongkor

Jiwa wirausaha masyarakat desa Cinta Asih masih sedikit, minat masyarakat pada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan desa juga masih rendah. Bagi wirausaha yang sudah ada melalui jasa aplikasi belanja juga

bappelitbangda

terhambat oleh promosi iklan, yang mana pada aplikasi tersebut, terlebih dahulu memiliki biaya kurang lebih 10 juta agar produk ditampilkan di pencarian paling atas.

Masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah sudah banyak, namun bantuan tersebut justru membuat mental masyarakat menjadi tergantung kepada bantuan pemerintah. Masyarakat yang mendapatkan bantuan hanya orang-orang itu saja, seperti bantuan beras dan bantuan lainnya. Data orang yang mendapatkan bantuan masih belum diperbaharui, masih ada beberapa yang salah sasaran. Contoh kasus ada orang yang membuat SKTM namun datang ke kantor desa menggunakan mobil pribadi.

Data bayi stunting masih terdapat perbedaan dari data 155 bayi yang terindikasi stunting hanya 6 bayi yang mendapatkan bantuan program pelita bening. Ketahanan pangan di desa Cinta Asih sudah 25%. di tahun 2023 desa inisiatif untuk membeli telur ayam kampung di jual kemana-mana, namun 2024 kita usahakan untuk kepentingan manfaat masyarakat secara langsung. Namun akhirnya, masyarakat tidak memiliki kemandirian. Sehingga akhirnya saat ini desa lebih fokus pada lansia dan bayi stunting. Untuk bantuan PKH sistem graduasi di masyarakat masih ada, namun hanya beberapa yang melakukan graduasi, rata-rata 99% masyarakat masih mempertahankan bantuan PKH meskipun sudah dirasa cukup mampu

Bank emok banyak digunakan oleh masyarakat. Banyak kasus dimasyarakat meminjam bank emok menggunakan data orang lain untuk meminjam (seperti tetangga). Pendidikan dimulai dari PAUD, RA, SD, SMP, MAN hingga STM (jurusan pertanian) sudah ada. Ada juga bangunan sekolah yang dibangun oleh ITB. Ada juga Listrik PLTA dibangun oleh anak-anak dari ITB. Lulusan STM dan MA jarang ada yang langsung bekerja karena nanggung, kecuali orang-orang yang memiliki kemampuan. Di desa masih ada anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya.

bappelitbangda

Untuk tingkat pendidikan di masyarakat sudah mencapai SMA, jarang ada anak putus sekolah. Hal ini juga didorong oleh banyaknya bangunan gedung sekolah dari sekolah dasar hingga menengah atas. Untuk pekerjaan masyarakat yang menjadi PNS hanya beberapa tidak banyak.

Pada tahun 2019 banyak jalan desa yang diperbaiki. Saat pandemi tidak ada warga masyarakat yang terkena covid, untuk pencegahan masyarakat yang dirasa mengalami gejala melaksanakan karantina.

Riwayat penyakit masyarakat ada yang terjangkit TB, yang ditangani langsung oleh puskesmas. Ada anak di salah satu pondok yang pulang dan terkena TB hingga menyebarkan ke satu keluarga. Banyaknya penyakit bawaan dari luar daerah, selebihnya tidak ada penyakit yang berasal dari asli desa. Ada juga masyarakat yang memiliki penyakit jantung, diabetes, dan banyak juga penyakit darah tinggi.

Puskesmas hanya ada di kecamatan. Rencananya akan dibangun puskesmas pembantu di desa cinta asih dan sudah ditentukan lokasinya. Produksi yang banyak di des aitu tanaman herbal, jahe, gula, gula aren, opak kolontong, untuk pertanian paling padi dan hewan ternak. Di desa kebanyakan lahan menjadi sawah dibanding kebun.

Tradisi kesenian di desa ada banyak, ada kesenian dangdut, jaipong, band, pancaksilat, dan calung. Sudah diundang juga ke desa- desa lain, siangnya menjadi petani malamnya bisa tampil memenuhi undangnya. Kesenian yang banyak diundang adalah dangdut dan pencak silat yang sudah sampai mendapatkan juara di kecamatan. Ada juga acara adat di desa, berupa acara adat sunda. Banyak anak-anak muda yang bekerja menjadi seller setelahnya Latihan band. Minat masyarakat di desa cukup tinggi dan sudah ada beberapa yang menjadi pekerjaan sampingan. Namun, hanya paling tinggi tampil di kecamatan belum sampai keluar kota. Ada juga yang sudah dimasukkan ke youtube, Namanya Bandot Cinta Asih. Untuk bantuan pupuk masih menjadi masalah dalam biaya penebusan pupuk. Karena biaya

bappelitbangda

operasional yang tinggi karena terkendala di infrastruktur. Pupuk subsidi banyak dijual dengan harga lebih tinggi karena ada biaya tambahan ongkos. Tidak ada petani milenial di desa, yang menjadi petani masih didominasi oleh orang tua.

Pelatihan-pelatihan jarang dilaksanakan di desa. Banyaknya petani untuk konsumsi, jarang sekali petani untuk dijual, kecuali petani palawija, jahe dan kunyit. Produksi kunyit di desa banyak, bahkan setiap rumah memiliki tanaman kunyit dan hasil tanaman kunyit dijual ke pengepul.

Di desa belum ada koperasi. Ada juga bank sampah di masyarakat namun hanya jalan beberapa tahun. Masyarakat sudah merasakan jenuh. Bumdes berjalan di jualan gas elpiji. Bumdes berjalan di gas awalnya berjalan di Pertashop namun karena kurangnya pendekatan jadi gagal, kemudian beralih ke bidang berjualan gas yang didistribusikan ke warung-warung masyarakat. Jatah gas di dapatkan perminggu, perminggu mendapatkan 500 (perminggu bisa 2 kali) Untuk hasil bumdes desa hanya menagih pertahun dan bumdes mensetorkan hasilnya pertahun.

Program yang diinginkan masyarakat adalah apapun program dari pemerintah ingin ada pelatihan terlebih dahulu, dibimbing hingga bisa lalu ada bantuan alat-alatnya, dan dibimbing hingga berhasil. Tidak ada desa wisata, karena akses jalan yang belum baik dan sempit. Banyak masyarakat yang terkendala di modal. Di desa ada yang telah berhasil menjual sambel tutut dan sudah menjual secara online ke shopee, mamahdeudeuh.

4.16. Gambaran Masyarakat Kecamatan Batu Jajar

Desa Galanggang memiliki potensi sumber daya yang sedikit, potensi didominasi oleh sektor pertanian, namun lahan sawah yang digarap sebagian besar milik TNI bukan milik warga setempat. Berikutnya, terdapat desa dekat Sungai Citarum sehingga banyak warga yang beternak ikan. Kecamatan Batu

bappelitbangda

Jajar tidak memiliki potensi pariwisata. Untuk pertanian kebanyakan hasil tani padi yang dikonsumsi sendiri. Untuk menggarap lahan TNI, ada perjanjian bagi hasil, petani membagi hasil panen untuk TNI sebanyak 2 karung. Peternak ikan kebanyakan di lahan Desa Galanggang, namun peternak ikan maupun pemilik lahan merupakan masyarakat dari luar, hasil peternakan ikan diperjual-belikan di pasar. Produksi peternakan ikan, sebagian besar adalah ikan mas dan Nila. Di Desa Gelanggang terdapat beberapa kesenian yang aktif namun karena tidak ada wadah yang menaunginya, sehingga saat ini kegiatan kesenian menjadi berkurang. Pembuat alat music tradisional saat ini dijual, naun untuk sekarang jumlahnya berkurang. Karakteristik masyarakat desa kebanyakan tekun. Desa gelanggang memiliki tingkat pendidikan masyarakat pada 2024 hampir rata-rata sudah SLTA. Untuk bangunan sekolah jaraknya dekat tidak terlalu jauh namun jumlahnya tidak banyak, kebanyakan sekolah di desa itu tingkat SD dan SMP. Aksesnya sangat dekat karena masih dalam wilayah desa. Tidak ada SMAN di desa, jadi untuk mengakses SMA harus ke desa lain yang tidak terlalu jauh. Akses pendidikan sudah cukup mudah. Anak putus sekolah pada tahun 2022 ada 10 orang yang putus sekolah namun di tahun ini sudah tidak ada anak putus sekolah. Kebanyakan anak putus sekolah karena faktor ekonomi. Anak putus sekolah ada pada tingkat SMP. Masyarakat Desa Gelanggang sebagian besar telah memiliki pekerjaan utama sebagai buruh pabrik. Untuk akses kesempatan pekerjaan ada yang mudah, namun ada juga yang sulit, karena untuk masuk kerja sendiri ada beberapa aspek yang harus dipenuhi, meskipun tinggal satu domisili dengan pabrik tapi belum tentu masyarakat dapat lolos diterima di pabrik tersebut. Mudahnya, jika ada beberapa usaha baru yang memerlukan tenaga kerja daerah setempat. Jika pendapatan tidak mencukupi, masyarakat kebanyakan memiliki pekerjaan sampingan meskipun ada beberapa masyarakat yang melakukan pinjaman kepada bank. Untuk masyarakat yang memiliki pekerjaan sampingan, umumnya berwirausaha. Masyarakat yang meminjam ke bank emok itu ada

bappelitbangda

namun tidak banyak. Masyarakat yang meminjam ke bank emok biasanya untuk keperluan tambahan modal. Warga desa banyak yang memiliki karakter kewirausahaan. Banyak pelaku UMKM, ada yang membuka usaha jus, pembuatan keripik salak, dan usaha-usaha kecil lainnya. Jiwa kewirausahaan masyarakat cukup tingggi, ada juga pelaku UMKM yang sudah ekspor ke Vietnam maupun penjualannya tembus ke supermarket. Masyarakat Desa Gelanggang sudah memiliki kemampuan mencukupi gizi, karena banyak program desa seperti makanan tambahan untuk anak stunting, sosialisasi dan pembinaan masyarakat terkait gizi, lalu akan ada makan gratis. Kualitas kesehatan masyarakat sudah cukup baik. Tidak ada wabah yang menjadi urusan urgent. Banyak juga program Kesehatan untuk masyarakat. Sekitar 89% Masyarakat sudah memiliki BPJS.

Desa Batujajar Barat memiliki potensi sumber daya manusia yang melimpah, saat ini Pemerintah Desa sedang melaksanakan pelatihan eduwisata, ada wahana permainan dan tutor. Untuk harga tiket anak sekolah 30 ribu sudah termasuk wahana permainan dan menangkap ikan. Sudah ada instagram @eduwisatamencrang. Potensi di desa diantaranya ada peternak puyuh. Potensi pertanian sawah ada namun tidak menonjol seperti desa lain karena lahannya yang semakin sedikit. Banyak pasar dekat desa jadi masyarakat banyak yang menjadi pedagang dan pegawai pabrik. Kebudayaan di Desa Batujajar Barat sudah berkurang. Namun beberapa waktu lalu mulai dikembangkan Kampung Buhun, eduwisata terkait kebudayaan seperti lukisan dan alat alat kesenian. Beberapa tahun sebelumnya ada hajat lembur, seperti syukuran suatu wilayah seperti *meruwat lembur* pada tahun 2022 yang didukung dinas pariwisata. Secara global seperti festival budaya menampilkan banyak kelompok pencak silat dan memajukan UMKM. Karakteristik masyarakat variatif, ada yang tekun, dan juga yang tidak. Desa Batujajar Barat memiliki tingkat pendidikan rata-rata SLTA. Di desa rata-rata sekolah SD dan

bappelitbangda

SMP, SMA sudah ada namun swasta. Untuk sekolah menengah atas negeri, masyarakat banyak belajar ke SMAN 1 Batujajar. Akses masyarakat untuk pendidikan sudah mudah. Anak putus sekolah masih ada namun beberapa kasus karena keinginan sendiri bukan karena faktor ekonomi. Desa memberikan solusi kejar paket untuk anak putus sekolah. Masyarakat Desa Batujajar Barat sudah mengetahui pemenuhan gizi, karena banyak program dan sosialiasi terkait gizi. Penyakit tidak menular yang dialami masyarakat, diantaranya stroke.

Desa Selacau memiliki potensi tambang galian c, tanah IP dan pertanian palawija. Petani palawija masih banyak perkebunan di beberapa RW yang digarap secara perorangan dan dijual ke pengepul, dan sebagian lagi dijual maisng-masing. Untuk tambang galian C yakni tambang batu andesit, saat ini sedang proses perizinan. Selain palawija ada juga masyarakat yang menanam sawi. Di Desa Selacau ada beberapa tradisi yaitu pencak silat, seni terompet dan calung/gamelan. Untuk calung dan gamelan banyak pelaku seni yang beralih pekerjaan. Untuk yang aktif hingga saat ini adalah pencak silat dan seni terompet. Untuk silat dan seni terompet setiap tahun ada pertunjukkan setiap lomba desa. Kesenian terompet masih banyak panggilan sehingga menjadi salah satu ladang penghasilan sampingan. Karakteristik masyarakat desa tidak bisa ditentukan tekun atau tidak, karena banyak perubahan mengikuti perkembangan. Namun kebanyakan tekun dan tidak mudah berpindah pekerjaan. Akses pendidikan warga desa tidak mudah tetapi beberapa masih bisa dijangkau masyarakat. Kendala akses pendidikan ke SMA adalah zonasi. Putus sekolah terjadi karena dua halrendahnya minat belajar anak dan faktor ekonomi. Di satu sisi mereka mau melanjutkan sekolah dengan kejar paket yang disediakan pihak desa. Anak yang putus sekolah adalah anak SD. Kendala lainnya adalah zonasi sekolah negeri. Masyarakat Desa Selacau, banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik, untuk akses mendapat pekerjaan

bappelitbangda

itu susah. Masyarakat yang berusia 17-30 tahun cukup mudah mendapatkan pekerjaan, sementara masyarakat yang berusia 30 tahun ke atas banyak yang mencari pekerjaan lintas provinsi, karena sulitnya mendapat pekerjaan di daerah sekitar. Jika pendapatan masyarakat tidak mencukupi, beberapa kelompok masyarakat (sebagian kecil) memilih ke bank emok. Jiwa masyarakat untuk berwirausaha cukup tinggi, salah satunya di desa ada yang berinovasi membuat sale pisang, telor asin, keripik asin, dan keripik gedebok pisang. Sampai saat ini, belum ada intervensi dari pemerintah kabupaten untuk membina dan mengembangkan UMKM. Kecukupan gizi masyarakat Desa Selacau sudah cukup baik. Beberapa balita memiliki masalah dalam hal makanan, yaitu *picky eater* (pilih-pilih makanan). Kesehatan masyarakat cukup baik, masyarakat yang memiliki riwayat penyakit menular memiliki kendala kepemilikan bpjs. Masyarakat yang memiliki BPJS Mandiri sudah lumayan banyak, namun pembayaran iurannya terkendala biaya, dan BPJS pemerintah tidak bisa dicover oleh seluruh faskes.

Desa Pangauban memiliki mayoritas pekerjaan sebagai petani. Potensi wilayah Desa Pangauban terdapat objek wisata tempat makan terapung. Pekerjaan masyarakat, sebagian besar petani sawah yang sudah bergabung dalam Gapoktan, dan sudah bisa menjual produk pertaniannya keluar, sedangkan petani biasa, hasil panen untuk konsumsi sendiri. Desa Pangauban untuk pekerjaan sampingan tidak ada. Karakteristik masyaraakat tekun pada pertanian. Desa Pangauban tingkat pendidikan masyarakat sudah mencapai tingkat SLTA, kemudian untuk akses pendidikan sudah cukup mudah dengan adanya SMA dan MA. Masih ada beberapa anak putus sekolah, umumnya karena faktor ekonomi dan lingkungan (pergaulan). Pekerjaan utama masyarakat Desa Pangauban sebagian besar sebagai petani, buruh pabrik, pedagang, dan ojek. Akses pekerjaan agak sulit, karena aksesnya yang jauh serta kualitas sumber daya masyarakatnya yang belum mampu bersaing. Jika

bappelitbangda

pendapatan tidak mencukupi sebagian masyarakat memiliki pekerjaan sampingan. Banyak masyarakat yang meminjam kepada bank emok dan bank konvensional. Karakter kewirausahaan dimiliki masyarakat namun terkendala pada modal dan selalu mengikuti tren tapi tidak bertahan lama. Kebutuhan gizi masyarakat Desa Pangauban sudah tercukupi. Kualitas keshatan sudah cukup baik, untuk riwayat penyakit ada masyarakat yang mengalami stroke, jantung dan kanker masih ada, namun untuk wabah tidak ada. Masyarakat yang memiliki BPJS sekitar 97%.

4.17. Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Berikut permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bandung Barat, sehingga usahanya tidak maju dan tetap terjebak dalam kemiskinan

Masalah Perekonomian

1. Infrastruktur jalan dan irigasi untuk pertanian belum menunjang. Pemasaran hasil pertanian masih dikuasai tengkulak/bandar. Gapoktan yang berjalan belum maksimal
2. minimnya informasi dan sulitnya akses pupuk bersubsidi.
3. Berkurangnya tanah garapan pertanian dan perkebunan, sudah banyak dikuasai orang lain, perusahaan, dan instansi. Petani KBB tidak lagi menjadi petani tetapi menjadi buruh tani.
4. Disaat kemarau, lahan tidak difungsikan untuk pertanian. Petani beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan.
5. Jika hasil pertanian tidak laku di pasaran, petani belum bisa mengolah dan memanfaatkan hasil panennya yang memberikan nilai tambah ekonomi
6. Minimnya pengetahuan dan ketrampilan bidang pertanian, peternakan, pariwisata, serta pemasaran produk

bappelitbangda

7. Sempitnya lahan pekerjaan/kesempatan kerja
8. Kendala usaha karena keterbatasan modal dan akses pemasaran
9. Rendahnya karakter dan kemampuan pengelolaan lembaga ekonomi desa (BUMDES) sehingga tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan desa
10. Ketidakmampuan ekonomi masyarakat mencukupi kebutuhan non primer (rumah tangga, pendidikan, mobilitas, dan kebutuhan hidup lainnya).
11. Masih ada masyarakat yang pinjam ke bank, pinjol dan bank emok untuk modal usaha maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga terjebak pada kemiskinan yang lebih dalam.
12. Karakter masyarakat yang kurang berkomitmen membayar pinjaman ke BUMDes maupun koperasi desa, sehingga menghambat kemajuan BUMDes untuk membantu masyarakat keluar dari perangkap pinjaman online.
13. Masyarakat ekonomi rendah terkendala modal dan biaya hidup, karena menunggu hasil panen cukup lama
14. Sebagian masyarakat sudah memiliki jiwa wirausaha, dibutuhkan kepemimpinan masyarakat desa (pemerintah desa, BUMDES, dan pesantren) lebih proaktif memberdayakan masyarakat, masyarakat hanya terkendala keterbatasan akses modal dan pemasaran.
15. Kesulitan kerjasama dan bagi hasil dengan pihak Perhutani untuk memajukan perkebunan Kopi. Kendala kemajuan kopi, petani terbatas alat pengolahan, dan penggilingan kopi, serta minimnya pengetahuan budidaya dan teknik memanen robusta.
16. Masyarakat belum dapat mengeloa objek pariwisata secara optimal. Minimnya pengetahuan manajemen usaha pariwisata dan belum adanya kerjasama secara legal formal dengan Perhutani untuk mengelola objek wisata. Pengembangan pariwisata 4 aspek manajemen pariwisata, aspek

bappelitbangda

atraksi banyak tersedia, tetapi tidak ditunjang oleh aspek amenity, aksesibility, dan anxiliary.

17. UMKM pengolahan makanan dan minuman masih berjalan sendiri-sendiri, serta terkendala pada pemasaran online. Produk UMKM banyak yang meniru, sehingga meningkatkan persaingan. Untuk bisnis secara online, kendala ekspedisi yang jauh
18. Belum memiliki akses pasar, hasil pertanian masih dijual ke Bandar. Kendala pertanian jagung terletak di peralatan dan biaya yang cukup mahal, dan lahan banyak milik TNI.
19. kesenian tradisional sulit dikembangkan dan memberikan nilai tambah ekonomi, kendalanya ada di fasilitas yang kurang memadai
20. Untuk peternakan, Hasil susu perah hanya dijual ke KPSBU tidak ada inovasi olahan produk dari susu, atau pasar lain yang menampung susu.
21. Kesulitan perikanan terletak pada *supply* bibit ikan
22. Perkebunan (jahe), terkendala modal yang besar, harga bibitnya saja bisa 20 ribu.
23. Jiwa wirausaha dan kreativitas masih rendah, jika usaha cenderung meniru, dan mudah menyerah.
24. Kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pergeseran, dari pertanian ke sektor industri, jasa, dan perdagangan.
25. Pengelolaan sampah dapat menjadi potensi, tetapi kendaraan pengangkutan, tempat penyimpanan, dan alat pengelolaan sampah masih terbatas. Café/restoran/tempat wisata mengelola sampah sendiri karena tidak ada koordinasi dan sinergitas dengan pihak desa
26. Minimnya pengetahuan dan daya kreasi untuk meningkatkan daya tarik produk

bappelitbangda

Masalah Sosial

1. Rendahnya pendidikan formal, menghasilkan SDM berpenghasilan rendah.
2. Minat belajar sudah tinggi, tetapi akses pendidikan terbatas.
3. Masih banyak masyarakat yang menjadi pengangguran. Kesempatan pekerjaan/lowongan pekerjaan tidak mencukupi karena tidak ada pabrik di kecamatan
4. masyarakat lebih mengandalkan bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan lainnya.
5. pemuda kurang berminat pada kegiatan pertanian, ada yang merasa gengsi jika memegang cangkul/bekerja di bidang pertanian. Beberapa pemuda lebih memilih usaha perbengkelan atau usaha jasa sebagai EO
6. Masyarakat kurang inovatif dalam mengolah hasil pertanian.
7. Warga masyarakat banyak yang berpendidikan hingga SMA. Masyarakat bekerja sebagai kuli bangunan, buruh pabrik, dan pekerja kasar lainnya. Masyarakat yang bekerja di bagian administrasi atau manajerial masih sedikit.
8. Masyarakat tidak mempunyai pekerjaan sampingan, jika penghasilan kurang maka warga akan meminjam ke pihak bank emok.
9. Kesadaran terhadap pemenuhan gizi masih kurang, jarang datang ke posyandu. Menderita penyakit cukup berat yang berkaitan dengan pernafasan, seperti TBC dan ISPA.
10. Masyarakat wilayah perkotaan relatif konsumtif dan hedonis, mengikuti gaya hidup perkotaan, jika perekonomian tidak mampu sebagian terjerat pinjol.
11. Minimnya kesempatan dan lapangan pekerjaan. hotel/tempat pariwisata yang dikelola swasta tidak memberikan CSR, kesempatan kerja banyak

bappelitbangda

untuk tenaga kerja dari luar daerah dan tidak menyerap tenaga kerja warga desa

12. Pengembangan UMKM juga terkendala pada SDM, masyarakat umumnya menginginkan mendapatkan uang secara instan sehingga meskipun banyak potensi yang belum bisa dikembangkan. Pekerjaan seperti buruh dan kuli bangunan menjadi mayoritas karena warga ingin pekerjaan yang langsung menghasilkan uang.
13. Minat masyarakat mengundang grup seni budaya tradisional masih tinggi, tapi pengembangan seni tradisional di lingkungan terkendala fasilitas sanggar dan pembaharuan alat-alat penunjang kesenian. Terdapat pelaku seni yang tidak memiliki pekerjaan lain, sehingga ketika sepi job manggung, tidak memperoleh penghasilan.
14. Minat belajar sesungguhnya tinggi, tetapi anak putus sekolah banyak disebabkan faktor ekonomi (yatim piatu dan fakir miskin), sistem zonasi yang akhirnya membuat masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk ongkos transportasi ke sekolah (karena tidak masuk zonasi di sekolah negeri terdekat, dan terpaksa sekolah di swasta yang tidak sesuai dengan harapan, lebih jauh dan mahal), keinginan segera bekerja dan mencari uang, pernikahan dini, faktor disabilitas seperti down syndrome, dan ada orang tua yang meminta anak membantu pekerjaan orang tuanya., dan adanya anggapan bahwa perempuan berpendidikan tinggi bukan kebutuhan utama.
15. Tingginya angka masyarakat miskin, salah satunya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah masih sangat tinggi, masyarakat yang mampu ingin masuk DTKS untuk mendapatkan KIP Kuliah.
16. BPJS-PBI yang jarang digunakan/lama tidak terpakai, langsung tidak aktif tanpa pemberitahuan, sehingga terkendala akses layanan kesehatan ketika masyarakat membutuhkan.

bappelitbangda

17. Masyarakat sudah memahami pentingnya asupan gizi, tapi lansia jadi kurang gizi

Masalah Fisik/Infrastruktur

1. akses infrastruktur jalan kabupaten menuju tempat usaha pertanian yang kecil dan rusak.
2. kesulitan geografis (jauhnya akses ke pusat-pusat kegiatan ekonomi, dan pendidikan)
3. Pariwisata terkendala untuk infrastruktur jalan, dan sarana dan prasarana
4. Ada beberapa tempat titik longsor, sehingga berdampak pada sulitnya peningkatan ekonomi.
5. Sarana pendidikan belum merata, beberapa desa terkendala akses sarana pendidikan.
6. Terdapat proyek strategis nasional yang menutup akses jalan warga masyarakat, sehingga berpotensi menghambat mobilitas karena semakin jauhnya jarak tempuh ke pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sosial.
7. Lahan garapan sebagian milik orang lain, perusahaan, dan instansi
8. Pengembangan wisata alam ada terkendala pengembangan batas wilayah yang belum selesai masih adanya saling klaim antar desa.
9. Berkurangnya Sumber daya air untuk pertanian

Masalah program pemerintah

1. Penyuluhan kepada masyarakat sudah cukup sering, baik dari pemerintah maupun perguruan tinggi, dan bantuan pemerintah pun kerap diberikan, sehingga usaha pertaniannya relatif maju. Hanya saja

bappelitbangda

ada salah satu bantuan alsintan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran (petani bunga diberikan alat traktor pembajak sawah), serta akses jalan sudah banyak yang bagus.

2. pelatihan dalam budidaya jamur namun pemasarannya kurang, akhirnya hanya berhenti di pelatihan

4.18. Program yang diinginkan

1. Bantuan pengolahan sampah dan Lahan tempat pengolahan (mendirikan bank sampah)
2. Pelatihan dan Pendampingan bagi UMKM
3. Bantuan pembinaan dan permodalan untuk pertanian, peternakan dan UMKM
4. Menggalakkan Program pendidikan persamaan
5. Pertanian, bantuan berupa alat pertanian, modal, pupuk, bantuan benih berkualitas, pelatihan budidaya pertanian, penanggulangan hama penyakit tanaman, dan penerapan teknologi pertanian, Bantuan mesin panen dan mesin rontok, sehingga dapat meringankan beban dan waktu petani. penyuluhan budi daya pertanian yang baik, karena saat ini masyarakat masih menggunakan teknik pertanian tradisional
6. Peternakan, bantuan berupa Pelatihan penanggulangan penyakit ternak, Pelatihan pembuatan pakan ternak,
7. Pengolahan hasil peternakan berupa fasilitasi pengolahan pupuk dari hasil kotoran ternak,
8. Bantuan infrastruktur berbentuk pengairan/irigasi dan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten, dan infrastruktur jalan usaha pertanian
9. Bantuan permodalan bergulir ekonomi keuangan untuk meminimalisir masyarakat meminjam ke bank emok

bappelitbangda

10. Pendampingan di bidang tata Kelola keuangan, bantuan keuangan dan pemasaran digital untuk UMKM
11. Pelatihan pengelolaan sampah seperti alat angkut sampah, bantuan lahan untuk membuat TPS, pengolahan sampah, serta dukungan regulasi agar desa dapat menarik sampah di tempat wisata.
12. Pembangunan sarana pendidikan sekolah di desa terutama di SMA dan SMP
13. Pelatihan manajemen usaha, pengelolan organisasi bagi BUMDES
14. Intervensi pemerintah untuk memfasilitasi kerjasama desa dengan pihak LMDH dan Perhutani
15. intervensi pemerintah untuk meninjau ulang kembali perizinan wisata cipanas nagreg yang tidak memberikan dampak pada masyarakat, tetapi aktivitas 24 jam mengganggu ketertiban di masyarakat.
16. pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat agar SDM bisa masuk ke wilayah manajerial.
17. pelatihan inovasi produk olahan produk-produk pertanian
18. pelatihan manajemen pariwisata
19. Pelatihan membuat konten-konten di media sosial untuk penghasilan tambahan
20. Setiap event/kegiatan pemerintahan bisa mengundang kelompok kesenian yang ada di desa, dan perlu pelatihan-pelatihan untuk edukasi grup kesenian yang inovatif
21. Mendukung program penyetaraan untuk kejar paket A,B,C bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan
22. Sosialisasi, sinergitas, dan koordinasi antara BPJS, Pemda KBB, dan pemerintah desa terkait BPJS-PBI
23. Pelatihan manajemen usaha (pengelolaan dan keuangan) pariwisata Modal untuk pariwisata dari pemerintah kabupaten.

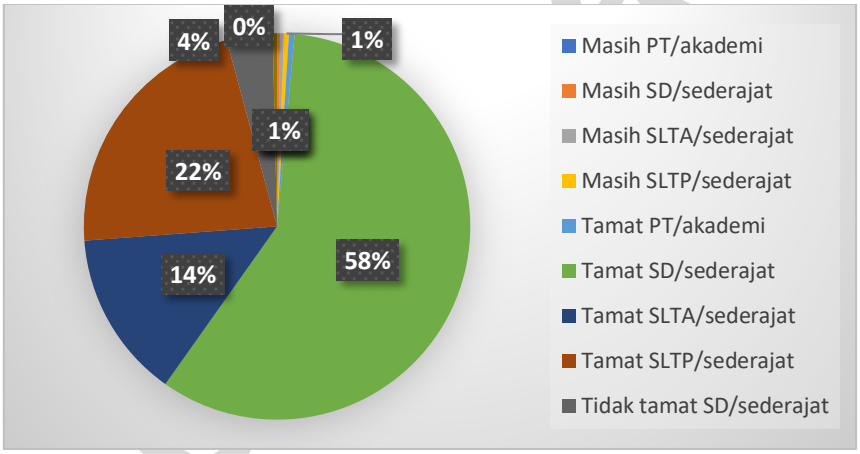
bappelitbangda

24. Pemerintah Mengadakan Roadshow melihat potensi desa untuk dikembangkan
25. Intervensi dinas pertanian/industri memasarkan hasil pertanian dan memperluas pasar
26. tersedianya fasilitas pendidikan sekolah SMP dan SMA di desa
27. Pelatihan keterampilan bagi anak yang baru lulus sekolah
28. Penambahan peralatan untuk UMKM seperti alat untuk produksi keripik
29. Pelatihan wirausaha dan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat,
30. Mewajibkan untuk usulan untuk kejar paket di RPJMDesa bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan.
31. Bantuan operasional untuk pelestarian sosial budaya
32. Memperbanyak lapangan pekerjaa dan Bantuan modal untuk UMKM dengan syarat administrasi yang mudah
33. memfasilitasi kemitraan UMKM kecil dengan UMKM yang sudah maju
34. Pelatihan yang dapat menggali potensi masyarakat karena banyak potensi yang belum tergali, seperti Pelatihan menjahit dan Tata Rias, Pelatihan pengolahan kopi, dan Pelatihan sablon

bappelitbangda

BAB 5
GAMBARAN UMUM KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

RT miskin terbanyak (Desil 1-4) adalah di Kecamatan Cikalong Wetan. RT miskin di KBB sebagian besar berpendidikan rendah (Kepala Keluarga Tamat SD/Sederajat = 118431 jiwa, tamat SMP = 44.590 jiwa, tamat SMA = 28436 jiwa), hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah pendidikan kepala keluarga maka semakin besar pula kemungkinannya menjadi keluarga miskin.



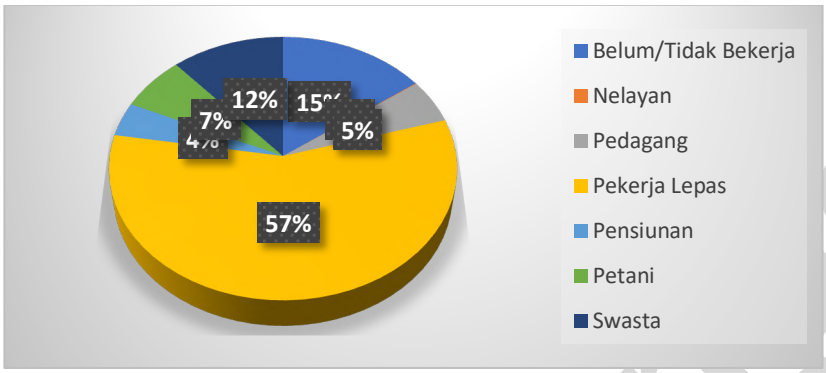
Grafik 5.1. Rumah Tangga miskin berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Data P3KE KBB per Maret 2024

Berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar kepala keluarga rumah tangga miskin merupakan pekerja lepas (57%) dengan status pekerjaan berusaha sendiri, belum bekerja (15%), dan pensiunan 4%. Hal ini

bappeda

menunjukkan sebagian besar kepala keluarga menjadi miskin karena tidak memiliki penghasilan tetap. Sedangkan, kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tetap namun termasuk miskin yaitu kelompok pegawai swasta sebanyak 12%, petani 7%, pedagang 5%.



Grafik 5.2. Rumah Tangga miskin berdasarkan Pekerjaan

Sumber : Data P3KE KBB per Maret 2024

Kepala keluarga Rumah tangga miskin yang belum memiliki penghasilan tetap (pekerja lepas dan belum bekerja) terbanyak di :

Tabel 5.1. Jumlah Rumah Tangga miskin yang bekerja sebagai Pekerja Lepas dan Belum Bekerja

Kecamatan	Pekerja Lepas	Belum Bekerja	Jumlah
Cikalong Wetan	13.079	3498	16.577
Cipongkor	11.747	2816	14.563
Gunung Halu	9934	3025	12.959
Cipatat	8866	2685	11.551
Cihampelas	1052	2213	3265
Cipeundeuy	7858	2122	9980
Padalarang	6321	2110	8431
Sindang Kerta	7570	2098	9668
Lembang	7725	1469	9194
Cililin	7551	1802	9353

bappelitbangda

Rongga	6645	1952	8597
Ngamprah	5339	1542	6881
Cisarua	4342	871	5213
Batu Jajar	3467	1052	4519
Parongpong	3341	527	3868
Saguling	2354	654	3008

Sumber : Data P3KE KBB per Maret 2024

Berdasarkan data status pekerjaan kepala keluarga RT Miskin, Kecamatan Cikalong Wetan, Cipongkor, Gunung Halu, Cipatat, Cihampelas, dan Cipeundeuy merupakan kecamatan dengan jumlah pekerja lepas dan pengangguran tertinggi, sehingga perlu menjadi wilayah prioritas utama untuk dilakukan pelatihan baik untuk peningkatan kompetensi dan ketrampilan, maupun kewirausahaan, bantuan peralatan dan modal agar dapat berdaya saing, dan memiliki pekerjaan yang layak maupun berwirausaha. Pelatihan yang diberikan sebaiknya sesuai dengan potensi ketrampilan SDM dan potensi alam yang dimiliki di wilayah tersebut.

Pelatihan dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan merupakan solusi jangka menengah dan panjang dalam mengatasi pengangguran. Sedangkan solusi jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bekerjasama dengan Pemerintahan Desa membuat memo kepada beberapa perusahaan yang ada di Bandung Barat untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat, dan masyarakat yang ditempatkan tersebut mendapat pelatihan dan pembinaan agar dapat bekerja dengan baik dan memuaskan. Disamping memberikan memo, Pemerintah Bandung Barat juga dapat menerapkan strategi Padat Karya yang melibatkan masyarakat untuk beberapa pekerjaan, seperti pekerjaan konstruksi. Dalam hal kerjasama pembangunan yang dilakukan perusahaan bersama dengan Pemda Bandung Barat, maka dalam kerjasama tersebut mencantumkan perlunya melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat.

bappelitbangda

Tabel 5.2. Karakteristik Masyarakat dan Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan	Karakter	Intervensi
Cikalong Wetan	**Potensi SDM** : Memiliki jiwa wirausaha, ketrampilan pertanian, peternakan, kerajinan, pengolahan makanan, dan menjahit **Potensi alam:** banyak terdapat singkong, bambu, pisang **Keterbatasan** : ketrampilan masih rendah, modal rendah, akses pemasaran terbatas, pemanfaatan e-commerce masih rendah **Kondisi mata pencaharian RT miskin :** Banyak pengrajin bambu yang memproduksi berdasarkan pesanan, saat ini pemasaran kurang, dan produk kurang memiliki daya tarik **Pernah maju di** sektor Pertanian, peternakan dan kebun karet, namun tergerus akibat pembangunan KCIC (lahan dan air berkurang, rumput untuk pakan ternak tidak tumbuh krn tdk ada air)	- Pelatihan wirausaha - Pelatihan inovasi pengolahan makanan dan kerajinan - Pelatihan teknik pengemasan, media advertising, dan digital marketting - Fasilitasi pemasaran dan perluasan kemitraan - Bantuan pemodalan - Pelatihan budidaya dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan - Pelatihan pengolahan limbah pertanian dan peternakan - Membangun infrastruktur pertanian dan peternakan
Cipongkor	**Potensi SDM :** Memiliki talenta dan menjalankan tradisi kesenian seperti dangdut, jaipong, band, pancaksilat, dan calung	1. Pembangunan komunitas masyarakat yang kuat dan mendukung 2. Pelatihan dan pembinaan bagi komunitas secara

bappelitbangda

	Potensi SDA : banyak ditanam palawija, jahe dan kunyit yang laku dijual, banyak rumah masyarakat menanam kunyit **Keterbatasan :** - Masyarakat kurang kreatif, - jiwa wirausaha rendah, dan mudah jenuh, - masyarakat terkendala modal. - Masyarakat tidak mandiri masih mempertahankan bantuan sosial pemerintah meskipun sudah dirasa cukup mampu - Tidak ada regenerasi, Pertanian didominasi orang tua - Infrastruktur jalan kurang memadai **Catatan :** masyarakat menghendaki pelatihan terlebih dahulu, dibimbing hingga bisa, lalu pemerintah memberikan bantuan alat-alatnya, dan dibimbing usahanya hingga berhasil.	terus menerus melalui sekolah ketrampilan desa sampai menghasilkan satu kelompok usaha 3. Memberikan bantuan peralatan bagi komunitas yang berhasil membangun usaha dan memasarkan produksinya 4. Memfasilitasi pemasaran dan jejaring pasar 5. Perbaikan akses jalan untuk melancarkan aktivitas ekonomi masyarakat 6. Pelatihan pengolahan tanaman biofarmaka 7. Membangun sentra kesenian dan budaya sehingga kesenian menjadi sumber ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Gunung Halu	**Potensi SDM :** Memiliki ketrampilan bidang pertanian, memiliki jiwa wirausaha dan mau berusaha **Potensi SDA** Masih banyak lahan sawah, terdapat lahan hutan yang dapat dikerjasamakan untuk perkebunan Memiliki potensi pariwisata	1. Peralatan Bantuan pengering biji dan pengolahan kopi 2. Bantuan pupuk dan bibit 3. Pengolahan susu sapi 4. Pelatihan ketrampilan lainnya (olahan makanan, dan tata rias/MUA)

bappeltbangda

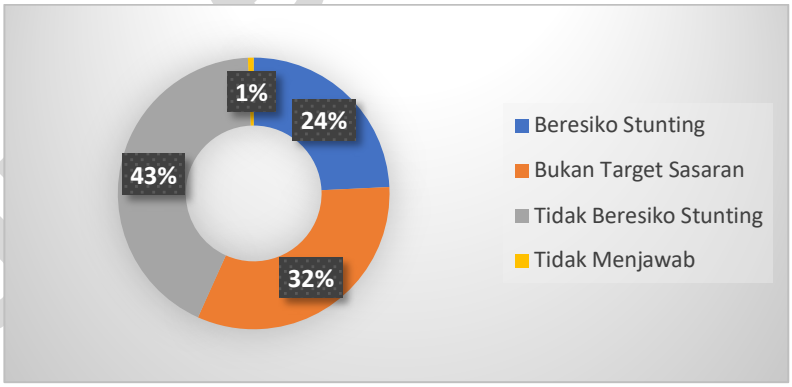
	Keterbatasan : Pemasaran, Modal, Infrastruktur karakter pengelola BUMDES	5. Membentuk pokdarwis desa dan Pelatihan Pengelolaan pariwisata 6. Pembinaan bumdesa dan mendorong pembuatan perdes tentang BUMDESa
Cipatat	**Potensi SDM:** Masyarakat memiliki talenta di sektor pertanian, perdagangan, dan pertambangan, memiliki jiwa produktif dan talenta berwirausaha di bidang kuliner dan kerajinan, **Potensi SDA** Terdapat tambang mineral bukan logam dan batuan, banyak ditanami singkong, padi, sayuran, dan kopi **Kebutuhan:** - Bantuan pengolahan sampah dan Lahan tempat pengolahan (mendirikan bank sampah) - Pelatihan dan Pendampingan - Bantuan pembinaan dan permodalan - Bantuan Peralatan (alat pertanian, kopi, kerajinan, pupuk, benih) - Fasilitasi Kemitraan (bahan baku dan pemasaran)	Memberikan pelatihan, pembinaan, bantuan peralatan dan permodalan, serta fasilitasi kemitraan untuk meningkatkan daya saing usaha yang dilakukan masyarakat
Cihampelas	**Potensi SDM** Memiliki jiwa wirausaha bidang kuliner dan kerajinan	Memberikan pelatihan, pembinaan, untuk meningkatkan daya saing usaha yang dilakukan

bappeltbangda

	Potensi SDA : potensi sawah, tanah darat dan perairan Saguling yang dapat dimanfaatkan potensi pariwisata	masyarakat (baik usaha kuliner, kerajinan, pertanian, perikanan, dan pariwisata) Perbaikan irigasi dan infrastruktur jalan Bantuan modal dan penyuluhan dan fasilitasi kemitraan
Cipeundeuy	**Potensi SDM** Memiliki talenta bidang pertanian **Potensi SDA** Ladang sawah	Memberikan pelatihan, pembinaan, untuk meningkatkan daya saing usaha pertanian Pelatihan inovasi hilirisasi produk pertanian, Bantuan modal, peralatan, dan pendampingan menjalin kemitraan

Sumber : Penelitian Kemiskinan KBB, 2024

Derajat kualitas kesehatan keluarga miskin di Kabupaten Bandung Barat tidak begitu rentan terhadap resiko stunting, berdasarkan data keluarga miskin, hanya 24% keluarga miskin beresiko stunting, sisanya tidak beresiko dan bukan target sasaran.



Grafik 5.3. Resiko Stunting Masyarakat KBB
Sumber : Data P3KE KBB, 2024

balitbangda

Masyarakat yang beresiko stunting paling tinggi ada di Kecamatan Gunung Halu, Cikalong Wetan, Cipongkor, Lembang dan Sindang Kerta.

Tabel 5.3. Masyarakat dengan Resiko Stunting berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah	Kecamatan	Jumlah
Gunung Halu	5494	Cihampelas	3333
Cikalong Wetan	4963	Cililin	3101
Cipongkor	4197	Cipeundeuy	2164
Lembang	4028	Cisarua	2103
Sindang Kerta	3791	Ngamprah	2083
Cipatat	3567	Parongpong	1624
Rongga	3487	Batu Jajar	910
Padalarang	3480	Saguling	881

Sumber : Data P3KE KBB, 2024

Berdasarkan data di atas, maka upaya pencegahan dan penanganan resiko stunting, sebaiknya diprioritaskan pada wilayah yang memiliki resiko stunting paling tinggi dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain.

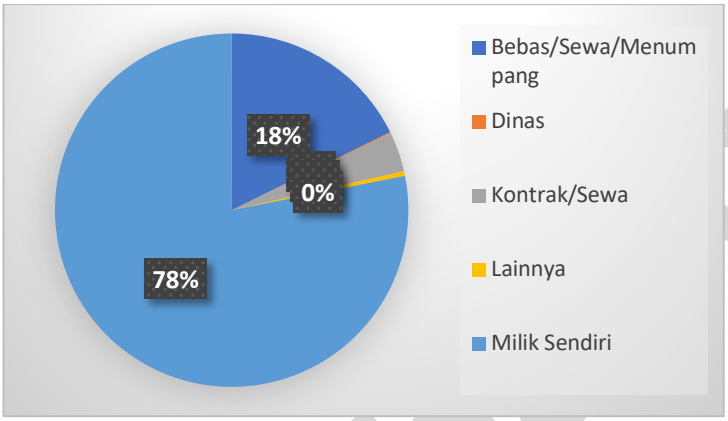
Upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi resiko stunting, yaitu pada wilayah kebijakan dan komunitas. Pemerintah KBB perlu membuat kebijakan mengenai makanna bergizi yang mendukung upaya penanganan stunting. Dengan adanya kebijakan tersebut, Pemerintah KBB mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung upaya penanganan stunting, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap upaya penanganan stunting untuk memastikan keberhasilan program.

Pemerintah KBB melalui penglibatan masyarakat melalui kader posyandu terus melakukan kegiatan sosialissi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya nutrisi pada anak. Perangkat daerah terkait bersama Kader posyandu mengembangkan program gizi untuk meningkatkan akses ke nutrisi yang cukup untuk balita dan anak-anak. Pemberian suplemen

bappelitbangda

nutrisi kepada anak-anak yang mengalami stunting, serta melakukan terapi gizi kepada anak-anak yang mengalami stunting. Pemda KBB juga perlu melakukan deteksi dan pengobatan penyakit yang dapat menyebabkan stunting, seperti infeksi dan penyakit kronis.

Sebagian besar keluarga miskin (78%) di KBB memiliki rumah sebagai aset. Keluarga miskin yang menumpang/bebas sewa hanya 18%, sisanya rumah kontrak/sewa dan lainnya.



Grafik 5.4. Kepemilikan Rumah Masyarakat Miskin KBB

Sumber : Data P3KE KBB, 2024

90% dari rumah milik keluarga miskin sudah beratap genteng, hanya sebagian kecil saja yang masih beratap bambu atau kayu/sirap, 65% berdinding tembok, 57% berlantai keramik, serta 77% sarana buang air besar sudah menggunakan septitank. Berikut data kelayakan rumah dan sanitasi keluarga miskin yang masih perlu diberikan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni.

bappelitbangda

Tabel 5.4. Kondisi Rumah Keluarga Miskin di KBB

Kecamatan	Atap Bambu dan/atau Kayu/Sirap	Dinding (Bambu, papan, plesteran anyaman bambu)	Lantai (Bambu, Kayu, dan Tanah)	Sumber air minum dari sumur tidak terlindungi	Sarana BAB (tanpa septitank dan lainnya)
Gunung Halu	49	13.107	11.497	1203	2845
Rongga	51	9710	9111	1097	1437
Cikalong Wetan	89	8224	6165	711	1971
Cipongkor	70	8417	7413	679	1819
Sindangkerta	58	7422	5695	661	1445
Cipatat	87	3390	2262	262	1860
Cipeundeuy	118	5021	3844	529	881
Cililin	49	4714	3465	579	1132
Lembang	51	2124	656	576	1265
Cihampelas	68	1923	1023	505	1236
Cisarua	21	2948	1128	123	450
Saguling	25	1655	1317	108	486
Padalarang	34	878	600	124	1172
Ngamprah	18	917	418	108	901
Parongpong	16	510	154	19	524
Batu Jajar	13	355	126	130	356

Sumber : Data P3KE KBB, 2024

Berdasarkan data di atas, atap rumah masyarakat yang masih menggunakan bambu, kayu dan Sirap terbanyak di Cipeundeuy. Rumah masyarakat yang berdinding bambu/papan/plesteran anyaman bambu terbanyak di Gunung Halu, Rongga, Cikalong Wetan, dan Cipongkor. Rumah masyarakat yang berlantai bambu/kayu atau tanah terbanyak di Gunung Halu, Rongga, dan Cipongkor. Masyarakat yang mengkonsumsi sumur yang tidak terlindungi sebagai sumber air minum, terbanyak di Gunung Halu dan Rongga. Rumah masyarakat yang **belum** memiliki sarana Buang Air Besar (BAB) dengan septi tank, terbanyak di Gunung Halu.

bappelitbangda

Di Bandung Barat masih banyak anak tidak sekolah, berdasarkan data Tabel Data Anak Tidak Sekolah berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan dari Pusdatin Kemendikbud[19], terdapat 17.684 anak yang tidak sekolah, terdiri dari 7123 anak yang DO (Drop Out) dan 10.561 anak yang lulus tapi tidak melanjutkan (LTM).

Tabel 5.5. Jumlah Siswa yang DO dan LTM di KBB

Kecamatan	DO	LTM	Jumlah
Cipatat	699	1122	1821
Lembang	826	767	1593
Cikalong Wetan	581	1140	1721
Cihampelas	813	668	1481
Padalarang	622	766	1388
Cililin	592	654	1246
Cisarua	432	699	1131
Gunung Halu	445	554	999
Cipeundeuy	421	558	979
Cipongkor	401	572	973
Ngamprah	307	606	913
Batu Jajar	364	491	855
Parongpong	294	539	833
Rongga	233	503	736
Sindangkerta	266	356	622
Saguling	157	236	393

Sumber : Pusdatin Kemdikbud, 2024

Berdasarkan data anak tidak sekolah Kecamatan Cipatat, Lembang, Cikalong Wetan, Cihampelas, dan Padalarang merupakan kecamatan yang paling banyak jumlah anak tidak sekolah. Siswa DO Masyarakat Bandung Barat di Tingkat SD terbanyak di Cipatat, Lembang, dan Padalarang. Adapun rincian siswa DO dan Lulus Tapi Tidak Melanjutkan sebagai berikut :

[19] https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/index.php/rangkuman/ats-by-sekolah/022300?tabulasi=wilayah

bappelitbangda

Tabel 5.6. Jumlah Siswa yang DO dan LTM di tingkat SD

Kecamatan	Jumlah	Kecamatan	Jumlah
Cipatat	156	Cisarua	80
Lembang	154	Ngamprah	72
Padalarang	135	Cililin	72
Cihampelas	111	Rongga	66
Batu Jajar	110	Cipongkor	62
Cikalong Wetan	94	Sindang Kerta	51
Cipeundeuy	94	Gunung Halu	48
Parongpong	89	Saguling	28

Siswa DO Masyarakat Bandung Barat di Tingkat SMP terbanyak di Lembang, Cikalong Wetan, dan Cipatat.

Tabel 5.7. Jumlah Siswa yang DO dan LTM di Tingkat SMP

Kecamatan	Jumlah	Kecamatan	Jumlah
Lembang	345	Gunung Halu	153
Cikalong Wetan	323	Cipeundeuy	142
Cipatat	307	Batu Jajar	136
Cihampelas	230	Ngamprah	129
Padalarang	229	Parongpong	129
Cililin	187	Sindang Kerta	114
Cipongkor	184	Saguling	93
Cisarua	168	Rongga	84

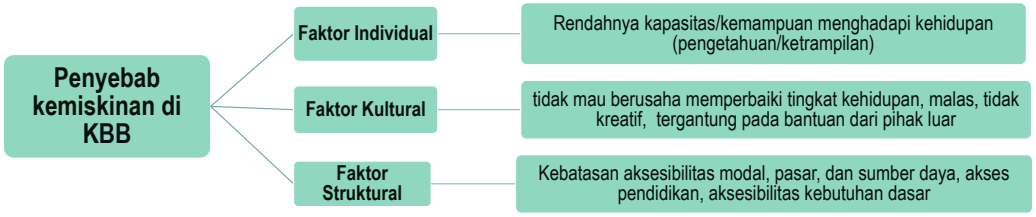
Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa penyebab anak tidak sekolah, diantaranya :

- Tidak memiliki biaya, karena jarak tempuh ke fasilitas sekolah yang jauh, dan keluarga miskin tidak memiliki biaya untuk ongkos sekolah, jajan, bahkan memenuhi kebutuhan peralatan sekolah maupun kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan belajar.

bappelitbangda

- Orang tua tidak mampu atau sakit, sehingga anak memilih untuk bekerja membantu orang tua
- Orang tua karena kesulitan ekonomi menganjurkan anak untuk tidak sekolah atau tidak melanjutkan sekolah
- Anak-anak yang memang malas sekolah karena lingkungan pergaulan yang lebih senang bermain daripada sekolah

Berdasarkan uraian kondisi kesejahteraan masyarakat KBB, penyebab kemiskinan disebabkan karena faktor individual, kultural, dan struktural, sebagaimana disajikan pada gamabr berikut :



Faktor	Upaya Penanggulangan	Bentuk Penanggulangan
rendahnya sumber daya dan aksesibilitas ekonomi	peningkatan produktivitas, akses ke pasar,untuk mendapatkan harga yang wajar untuk produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat miskin;	1. penyuluhan dan bimbingan, dan bantuan finansial 2. pelayanan sosial (akses pelayanan Kesehatan dasar dan beasiswa Pendidikan dan Pendidikan murah) 3. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; 4. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha untuk kemandirian berusaha 5. Memperkuat jejaring yang membuka akses dalam lapangan pekerjaan dan perluasan usaha 6. Motivasi berusaha, cita-cita untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik
rendahnya tingkat pengetahuan, ketrampilan, dan akses informasi, pendidikan, pelatihan dan bimbingan	meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin	
mental malas, mudah menyerah, rendahnya jiwa berusaha		

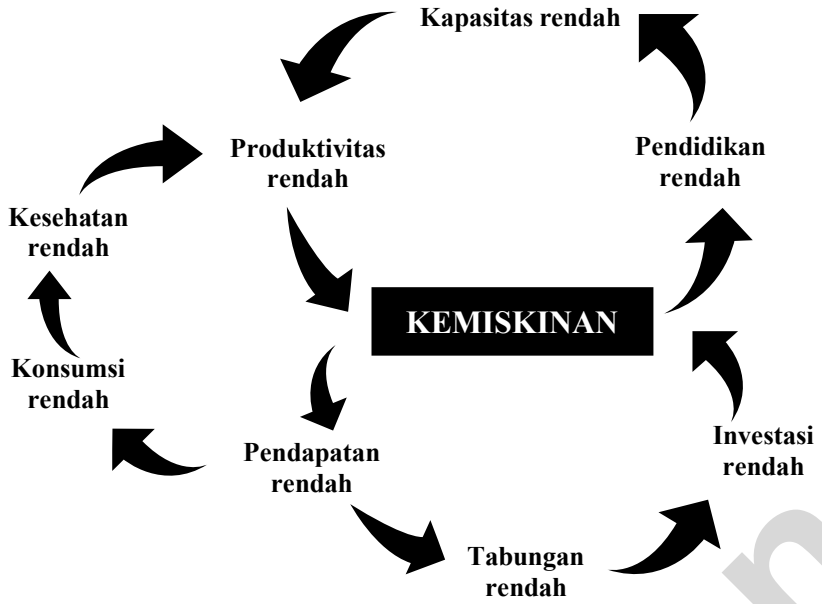
Gambar 5.1. Penyebab Kemiskinan di KBB
Sumber : Penelitian Kemiskinan, 2024

BAB 6
STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

6.1. Penyebab Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat

Penyebab utama kemiskinan masyarakat Kabupaten Bandung Barat, adalah pendidikan yang rendah. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Pendidikan dapat membuat seseorang memiliki ketrampilan-ketrampilan hidup. Tinggi rendahnya ketrampilan yang dimiliki seseorang menunjukkan kapasitas seseorang dalam mencari solusi atas masalah hidup yang dihadapinya. Kapasitas juga mempengaruhi kualitas produk/jasa yang dihasilkan seseorang. Selain kualitas, kapasitas yang tinggi juga mempengaruhi jumlah produksi, sehingga jika kapasitas seseorang rendah akan berpengaruh pula kepada produktivitas yang rendah pula. Produktivitas sendiri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan, sehingga jika produktivitas seseorang rendah maka akan pendapatan yang diperoleh pun akan rendah, sebaliknya semakin tinggi produktivitas seseorang, maka pendapatannya akan meningkat pula. Pendapatan yang rendah akan berdampak pada ketidak-mampuan daya beli, kualitas kesehatan, dan ketidak-mampuan berinvestasi untuk masa depan. Dalam keseluruhan, pendidikan berpengaruh terhadap kapasitas, produksi, pendapatan, daya beli, akses kesehatan sehingga berdampak pada kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, menguatkan pendidikan dan ketrampilan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat.

bappelitbangda



Gambar 6.1. Lingkaran Kemiskinan Masyarakat KBB

Sumber : Penelitian tentang Kemiskinan KBB, 2024

Berdasarkan data P3KE KBB, kepala keluarga rumah tangga miskin sebagian besar (58%) berpendidikan SD/Sederajat, 22% berpendidikan SLTP/sederajat, dan 14% berpendidikan SLTA/sederajat, hanya sebagian kecil (1%) kepala keluarga yang lulus perguruan tinggi termasuk kedalam keluarga miskin. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam keluarga. Menurut Bloom (2006), pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat memperbaiki cara berfikir yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas seseorang. Oleh karena itu, dalam jangka menengah dan panjang, memberikan pendidikan melalui pelatihan bagi masyarakat miskin sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan, dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan pada waktunya

bappelitbangda

akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 2010). Intervensi yang dapat dilakukan pemerintah KBB adalah :

1. Bantuan sosial untuk pemenuhan hak-hak dasar
2. Pemberian pelatihan ketrampilan, wirausaha, meningkatkan daya kreasi dan inovasi masyarakat, serta pembinaan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan diberikan kepada keluarga miskin (suami, istri, dan anak yang termasuk dalam angkatan kerja tapi tidak bekerja, pemuda yang baru lulus sekolah SMA/SMK tapi belum bekerja)
3. Pemberian bantuan modal dan peralatan berdasarkan seleksi kelayakan usulan usaha atau UMKM/Koperasi yang sudah berjalan
4. Perluasan akses kredit usaha dan jejaring mitra usaha
5. Perluasan akses pasar
6. Pendampingan usaha, data dan informasi yang mendukung kelansungan dan kemajuan usaha masyarakat.
7. Penyediaan infrastruktur dasar

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan seseorang akan bertambah yang akan bermanfaat di dunia kerja. Pendidikan merupakan kebutuhan paling asasi bagi semua orang karena masyarakat yang berpendidikan setidaknya dapat memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Bagi keluarga miskin yang tidak mampu mengakses pendidikan, solusi dengan memprioritaskan penanganan anak yang putus sekolah dan yang tidak sekolah. Berdasarkan data P3KE KBB 2024, Di Bandung Barat masih banyak anak tidak sekolah, terdapat 17.684 anak yang tidak sekolah, terdiri dari 7123 anak yang DO (Drop Out) dan 10.561 anak yang lulus tapi tidak melanjutkan (LTM). Berdasarkan data, Kecamatan Cipatat, Lembang, Cikalong Wetan, Cihampelas, dan Padalarang (Lihat tabel 5.5) merupakan kecamatan yang paling banyak jumlah anak tidak sekolah.

bappelitbangda

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa penyebab anak tidak sekolah, diantaranya tidak memiliki biaya untuk sekolah, membeli peralatan, ongkos, dan jajan, jarak tempuh ke fasilitas sekolah yang jauh, merawat orang tua yang sakit, bekerja membantu orang tua mencari nafkah, rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan, dan ada juga anak putus sekolah karena malas dan lebih senang bermain daripada sekolah. Intervensi yang dapat dilakukan pemerintah KBB untuk mengatasi masalah anak tidak sekolah, dapat dilakukan langkah-langkah berikut :

1. Memberikan bantuan pendidikan, peralatan sekolah, sekaligus biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
2. Menyediakan angkutan sekolah gratis
3. Menyediakan fasilitas pendidikan non formal (sekolah persamaan) dengan metode belajar yang lebih fleksibel, atau sekolah jarak jauh
4. Menciptakan sekolah yang menyenangkan dan ramah anak, dimana anak-anak dapat berkumpul, bermain dan belajar dengan teman-teman sebaya
5. Memberikan edukasi secara langsung kepada pihak orang tua dan mengenai pentingnya pendidikan.

Salah satu dampak kemiskinan, adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan pangan bergizi dan kualitas kesehatan. Masyarakat miskin Kab. Bandung Barat yang beresiko stunting hanya sekitar 24%. Namun meskipun, yang beresiko stunting lebih sedikit, namun prioritas pemerintah saat ini adalah mengatasi masalah stunting, bahkan berorientasi pada *zero growth stunting,* sehingga berbagai upaya perlu dilakukan agar tidak ada lagi ditemukan kasus stunting di Bandung Barat. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi stunting dan mencapai *zero growth stunting,* diantaranya *:*

bappelitbangda

1. Kegiatan pemberian nutrisi tambahan, agar balita dan anak sekolah mendapatkan nutrisi yang cukup, terutama protein, vitamin, dan mineral.
2. Deteksi pertumbuhan anak secara teratur, untuk mendeteksi kemungkinan stunting. Deteksi ini, akan lebih baik lagi jika didukung dengan teknologi untuk meningkatkan akses informasi mengenai kecukupan nutrisi dan memantau pertumbuhan anak.
3. Memberikan edukasi tentang pangan bergizi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya nutrisi yang cukup untuk anak-anak.
4. Bagi anak-anak yang terdeteksi stunting, maka perlu segera dilakukan terapi gizi. Terapi gizi setidaknya dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan anak, dan mengurangi resiko penyakit pada anak yang terkena stunting.
5. Melakukan deteksi terhadap penyakit yang dapat menyebabkan stunting, seperti infeksi dan penyakit kronis.

Upaya mencegah dan mengatasi stunting perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat (Posyandu), yang membantu dalam hal deteksi dini, memberikan edukasi, pengembangan program gizi dan inovasi pengolahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan mudah diakses masyarakat, dan membantu pelaksanaan terapi gizi dibawah pemantauan Dinas Kesehatan. Pelibatan swasta perlu juga dilakukan, dengan memanfaatkan dana CSR perusahaan untuk membantu penanganan stunting, atau bisa saja pemerintah KBB melakukan kerja sama dengan perusahaan makanan dan minuman untuk membantu terpenuhinya kebutuhan gizi anak.

Terakhir mengenai pemukiman yang layak huni, berdasarkan data P3KE KBB, pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diarahkan sesuai dengan kondisi yang tepat. Program Rutilahu diberikan sesuai kebutuhan, diprioritaskan kepada masyarakat di kewilayahan yang memang benar-benar membutuhkan. Atap rumah masyarakat yang masih

bappelitbangda

menggunakan bambu, kayu dan Sirap terbanyak di Cipeundeuy. Rumah masyarakat yang berdinding bambu/papan/plesteran anyaman bambu terbanyak di Gunung Halu, Rongga, Cikalong Wetan, dan Cipongkor. Rumah masyarakat yang berlantai bambu/kayu atau tanah terbanyak di Gunung Halu, Rongga, dan Cipongkor. Masyarakat yang mengkonsumsi sumur yang tidak terlindungi sebagai sumber air minum, terbanyak di Gunung Halu dan Rongga. Rumah masyarakat yang **belum** memiliki sarana Buang Air Besar (BAB) dengan septi tank, terbanyak di Gunung Halu.

6.2. Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan di KBB

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Seluruh masyarakat tidak terkecuali masyarakat miskin memiliki hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Namun, masyarakat miskin seringkali tidak mampu bahkan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) tersebut, seperti pemenuhan pangan bergizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Di samping itu masyarakat miskin juga ditandai dengan ketidakmampuan dalam melakukan kegiatan usaha produktif serta ketidakmampuan dalam menjangkau/mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi. Kondisi kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan, stabilitas, keamanan, dan keadilan, sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan utama yang diperlukan untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Salah satu permasalahan penanggulangan kemiskinan yang dihadapi selama ini adalah database kemiskinan yang belum akurat maupun variabel yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan seseorang (kepala

bappelitbangda

keluarga) serta keterpaduan program antar pengakat daerah, dunia usaha serta masyarakat. Untuk itu penyediaan database yang akurat perlu dilakukan sehingga ukuran kemiskinan telah mendekati realita yang ada dilapangan dan keterpaduan program perlu disinergikan.

Upaya penanggulangan Kemiskinan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Permendagri No 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kebijakan nasional, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara:

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta pengembangan dan jaminan keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
3. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat (akses pendidikan, kesehatan, pemukiman yang layak, infrastruktur pendukung lainnya)
4. mensinergikan kebijakan dan program sebagai kekuatan/keberhasilan penanggulangan kemiskinan.

Strategi di atas dijabarkan dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan, yang dibagi kedalam kelompok:

a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

bappelitbangda

b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; serta
d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Adapun Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah terdiri dari :

a. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota
b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Upaya mewujudkan penanggulangan kemiskinan dilakukan berdasar pada tiga pilar, yaitu (1) komitmen pemerintah; (2) keterpaduan program, anggaran, dan sasaran; serta (3) pemantauan dan evaluasi.

Pilar 1: Komitmen Pemerintah

Visi Kabupaten Bandung Barat 2025-2045 disusun merujuk pada visi jangka panjang nasional yang tercantum dalam RPJPN, yaitu Indonesia Emas 2045: “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, serta visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat, yaitu “Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan”. Oleh

bappelitbangda

karena itu, mendukung visi pembangunan nasional dan Jawa Barat, maka Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 adalah “Bandung Barat sejahtera, maju, dan berkelanjutan”.

Indikator kinerja untuk mengukur tingkat ketercapaian dari visi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dirumuskan dalam sasaran disertai dengan target[20], sebagai berikut:

1. Kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang
2. Pendapatan per kapita setara negara maju
3. Daya saing sumber daya manusia meningkat

Tabel 6.1. Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran dan indikator visi	Baseline 2025	Target 2045
Tingkat kemiskinan (%)	9,05-9,99	0,14-0,91
Rasio gini (Indeks)	0,366 – 0,373	0,340 – 0,363
Pertumbuhan ekonomi (%)	4,87-5,37	4,95-6,15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,62	76,48

Upaya penanggulangan kemiskinan yang secara eksplisit tercantum dalam RPJPD KBB 2025-2045 menunjukkan komitmen pemerintah KBB yang juga harus dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal pelaksanaannya, Pemerintah KBB juga perlu menetapkan regulasi dan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan, serta mengalokasikan APBD untuk pemenuhan layanan dasar (pangan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur), alokasi pemberdayaan masyarakat, akses permodalan, dan penguatan industri produksi lokal.

[20] RPJPD KBB 2025-2045, hal. 305

bappelitbangda

Pilar 2 Keterpaduan Program, Anggaran, dan Sasaran

- Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar sektor, dilakukan melalui :
    - Dukungan kebijakan yang memuat peran dan tanggung jawab masing-masing pihak
    - Penetapan standar layanan minimal, standar teknis pelayanan dasar, dan target capaian program penanggulangan kemiskinan
    - pemutakhiran data sasaran program dan validasi (pendataan penduduk berdasarkan nama, lokasi dan tingkat kesejahteraan, serta menyediakan akses masyarakat melakukan pendaftaran mandiri), serta mengintegrasikan berbagai jenis dan sumber data sosial dan ekonomi, baik data keluarga maupun data UMKM;
- mendorong pelibatan sektor nonpemerintah (swasta dan/atau masyarakat) untuk bergabung dalam forum kemitraan penanggulangan kemiskinan;
- merancang pelaksanaan program afirmasi terhadap masyarakat miskin, pengangguran, kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, anak, dan perempuan)
- Peningkatan kemampuan ekonomi, melalui:
    - kemudahan berusaha seperti perizinan usaha dan membuka kesempatan kerja untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan.
    - Menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok dan memastikan inflasi terkendali;
    - meningkatkan daya beli masyarakat, bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
    - pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat

bappelitbangda

    - Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas usaha masyarakat, peningkatan kapasitas UMKM (akses pasar, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, perluasan kemitraan, peningkatan akses permodalan)
- peningkatan kualitas penghidupan, melalui
    - perluasan cakupan layanan kesehatan, vaksinasi, pemberian nutrisi tambahan (bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan)
    - Bantuan perumahan layak huni dan sehat, sanitasi, akses air bersih, bantuan/subsidi energi (listrik dan gas)
- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat, manfaat pendidikan, program-program bantuan, dan hak-hak dasar masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi

Pilar 3 : Pemantauan dan Evaluasi

- Penetapan indikator capaian penghapusan kemiskinan
- Penyusunan mekanisme pemantauan yang dilakukan secara berkala.
- Menyediakan layanan pengaduan terhadap indikasi ketidasesuaian pelaksanaan program.
- Evaluasi berkala terhadap capaian penghapusan kemiskinan dan tindak lanjut pengaduan.

Adapun prinsip pelaksanaan yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut[21]:

1. **Tepat sasaran :** Seluruh penduduk miskin yang memperoleh program penanggulangan kemiskinan masuk ke dalam data sasaran berdasarkan pada status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini.

[21] Merujuk pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022

bappelitbangda

2. **Pendekatan multidimensi.** Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor terkait, seperti kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan.
3. **Keterpaduan dan sinergi.** Penduduk miskin dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN/P, APBD/P Provinsi, APBD/P Kabupaten, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat miskin.
4. **Tersampaikannya dan dipahaminya informasi.** Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program Penanggulangan Kemiskinan.
5. **Koordinasi dan kerja sama multipihak.** Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan memerlukan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan secara sinergis, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur nonpemerintah.
6. **Terpantau dan terkendali.** Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrumen dan indikator yang relevan dan terukur.

Untuk mendukung kebijakan nasional dan masalah daerah terkait kemiskinan, beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut .

bappelitbangda

Terdapat bebrapa kondisi prasyarat keberhasilan/kekuatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, yaitu :

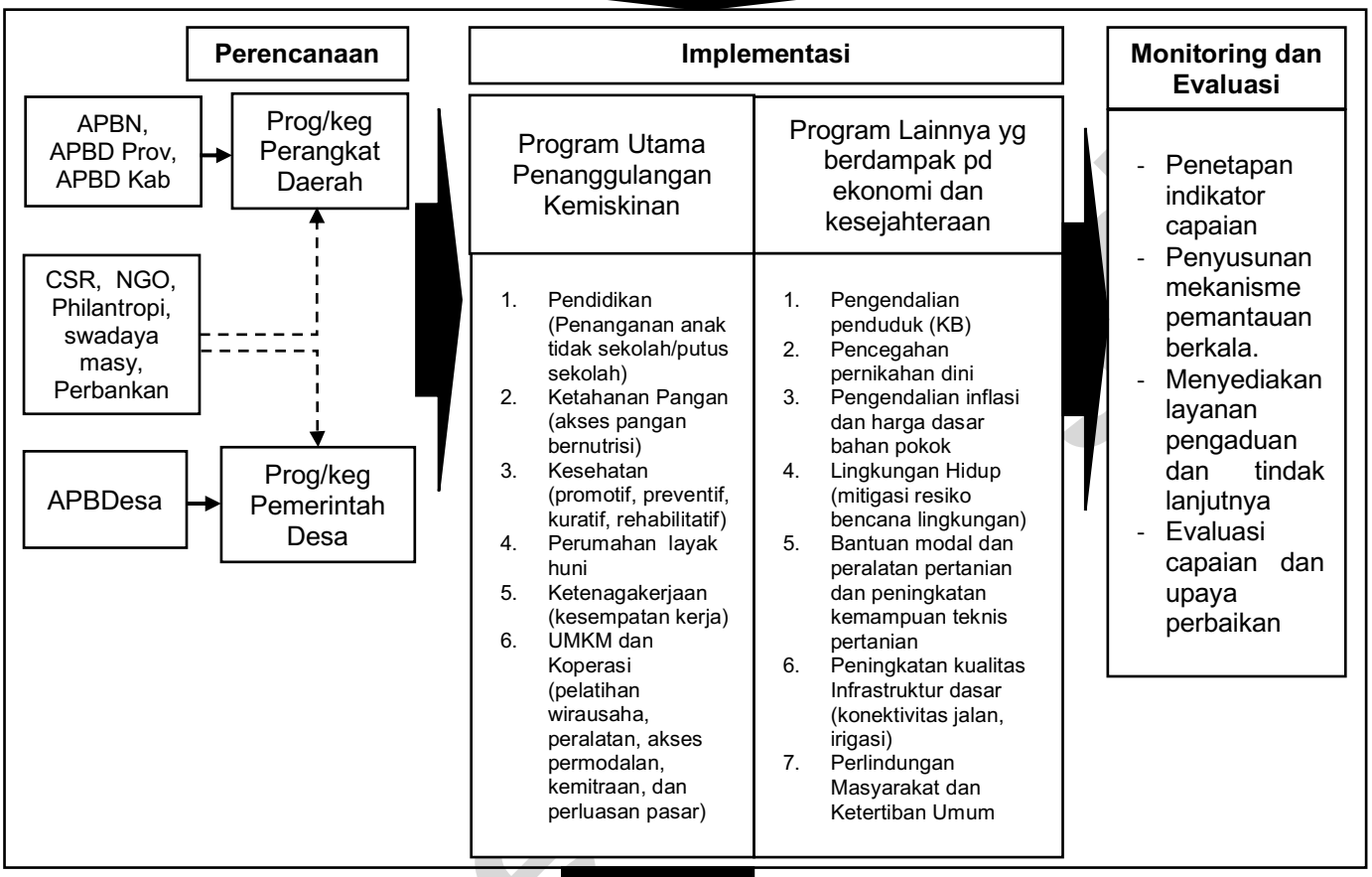
- Koordinasi yang kuat antar kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan kejelasan tugas dan tanggung jawab berbagai pihak. Oleh karena Pemerintah KBB, perlu merumuskan kebijakan, Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan, Mitigasi resiko yang jelas dan dapat disepakati semua pihak.
- Pendataan masyarakat miskin yang akurat dan terbaharui. Dalam upaya penanggulangan data yang akurat dan terbaharui sangat penting, agar intervensi yang dilakukan pemerintah KBB terlaksana efektif. Oleh karena itu dibutuhkan sistem data kemiskinan secara terintegrasi, valid, dan dinamis yang menjadi pegangan bagi pimpinan daerah dan DPRD sebagai regulator maupun bagi para birokrat sebagai operator.
- Pentingnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program , serta deteksi kesejahteraan masyarakat, dan validasi data masyarakat miskin secara dinamis dan terpadu.
- Penanggulangan kemiskinan tidak bisa diterapkan hanya satu program, untuk beberapa keluarga, perlu mengkombinasikan beberapa program penanggulangan kemiskinan (seperti program pengurangan beban pengeluaran keluarga, yang dikombinasikan dengan program peningkatan pendapatan), serta mengimplementasikan program secara bertahap (semula mendapat program pengurangan beban pengeluaran keluarga dan program peningkatan pendapatan, meningkat ke program penguatan ekonomi usaha mikro dan kecil)
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melibatkan sektor swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi pada program penanggulangan

bappelitbangda

kemiskinan, untuk meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara bottom up.

bappelitbangda

KLUSTER 1	KLUSTER 2	KLUSTER 3	KLUSTER 4
Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga	Program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan masyarakat	Program Penanggulangan kemiskinan Berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil	Program lain yang berdampak meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin



Gambar 6.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Komprehensif di Kabupaten Bandung Barat

Secara umum operasionalisasi strategi tersebut dilakukan melalui tahap sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan strategi penanggulangan kemiskinan diawali dengan langkah:

a. Pemetaan masalah kemiskinan, identifikasi jumlah rumah tangga/penduduk miskin, dan karakteristik wilayah. Pemetaan kelompok sasaran dilakukan berdasarkan indikator berdasar data resmi dari BPS Informasi status kesejahteraan rumah tangga/individu disajikan data pada level kecamatan dalam kategori:
    1) Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah;
    2) Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah; dan
    3) Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah.

    Serta jumlah sebarannya di kecamatan dan desa. Dari data tersebut, TKPKD Kabupaten Bandung Barat dapat melakukan penyesuaian indikator yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi hasil pendataan penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat, seperti kondisi rumah, fasilitas buang air besar, sumber air minum, bahan bakar memasak, kemampuan akses layanan kesehatan dan pendidikan, jenis dan status pekerjaan, pendidikan tertinggi Kepala keluarga, resiko stunting, kemampuan akses pangan bergizi, ketahanan ekonomi wilayah, jumlah anak tidak skeolah/putus sekolah, dan lain-lain sesuai kebutuhan program
b. Merumuskan kriteria program dan kegiatan untuk mengintervensi permasalahan kemiskinan. Sesuai dengan kebijakan nasional (Undang-

bappelitbangda

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Permendagri No 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota). Strategi utama yang dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat untuk penanggulangan kemiskinan, maka program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mengintervensi permasalahan kemiskinan harus memenuhi kriteria:

1) Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin untuk meningkatkan kualitas;
2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin
3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk penyerapan tenaga kerja dari penduduk miskin.

Berdasar kriteria tersebut maka kisi-kisi program dan kegiatan prioritas di bidang fokus penanggulangan kemiskinan, yaitu: kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, kelembagaan ekonomi dan usaha mikro dan kecil, ketahanan pangan dan pertanian, perumahan/pemukiman/ prasarana Dasar, pengendalian penduduk, keamanan dan ketertiban, penanggulangan bencana yang disarikan dari daftar Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut:

1) Prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu berbasis keluarga

bappelitbangda

a. Bidang ketahanan pangan : pemberian nutrisi tambahan, BPNT
b. bidang kesehatan : aksesibilitas layanan kesehatan, bantuan iuran BPJS
c. bidang pendidikan : Bantuan sosial PIP, penanganan anak tidak sekolah/putus sekolah, beasiswa bagi siswa miskin, dan kelompok rentan, sekolah persamaan, penambahan jumlah PKBM
d. bidang sosial ekonomi : bantuan sosial PKH, BLT, BPNT, subsidi energi dan listrik
e. bidang pemukiman dan infrastruktur : perumahan yang layak, bersih dan sehat, akses air bersih

2) Prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat
   a. Bidang ketenagakerjaan : program padat karya, ketrampilan kewirausahaan
   b. Bidang Ekonomi dan pembangunan :mengembangkan industri lokal, kompensasi dampak pembangunan, bantuan modal dan peralatan pertanian
   c. Bidang infrastruktur : Prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu berbasis keluarga bidang Pemukiman dan Infrastruktur : rehabilitasi sanitasi dan pembangunan sanitasi komunal
3) Prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil
   a. Penguatan kelembagaan ekonomi : Peningkatan usaha BUMDes dan Koperasi Desa

bappelitbangda

b. Bidang ekonomi : Bantuan Kredit Usaha/ modal bagi UMKM, Pelatihan inovasi produk, manajemen usaha, promosi, pemasaran, peningkatan kualitas dan daya tarik produk, Promosi produk UMKM, gerakan membeli produk lokal, dan perluasan pasar

c. Bidang hukum : Fasilitasi dan perlindungan usaha (HAKI, ijin usaha, jejaring kemitraan, Merumuskan sasaran dan target program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;

4) Program lain yang berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

a. Bidang Pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan : penggunaan KB, dan pencegahan pernikahan dini

b. Bidang infrastruktur : Perbaikan infrastruktur jalan dan jalan usaha pertanian, dan konektivitas wilayah

c. Bidang lingkungan hidup : kualitas lingkungan hidup dan mitigasi resiko bencana lingkungan

d. Bidang keamanan : melaksanakan perlindungan masyarakat dan ketertiban umum

c. Mengintegrasikan program dan kegiatan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, pada dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah, serta mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan baik bersumber dari dana pemerintah pusat, APBD, APBDes, CSR, Yayasan Philantropi, mapun swadaya masyarakat.

d. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Bandung Barat yang mengkoordinasikan program Penanggulan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat secara lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Sinergitas antara

bappelitbangda

program penanggulangan kemiskinan ditingkat desa dan kabupaten dapat dilakukan dengan cara dan mekanisme dengan melibatkan berbagai stakeholder (perangkat daerah, pemerintah desa, swasta, yayasan philantropi, swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi)

e. Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program Penanggulan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Bandung Barat, serta merumuskan tindak lanjut evaluasi dan perbaikan program.
f. Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dibantu oleh kelompok program yang terdiri dari: (i) Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; (ii) Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (iii) Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK); (iv) kelompok program penunjang kualitas penghidupan dan kesejahteran masyarakat. Kelompok Program bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta memberikan masukan dan pertimbangan hasil evaluasi dan tindak lanjutnya.
g. Dalam pelaksanaan tugas, Kelompok Program dibantu oleh Kesekretariatan, yang memiliki fungsi :
    1. Pelaksanaan administratif harian
    2. Koordinasi dan melaksanakan pendataan dan sistem informasi
    3. Pengembangan Kemitraan
    4. Penanganan pengaduan masyarakat
    5. Penyusunan laporan evaluasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat

bappelitbangda

Tabel 6.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Secara Komprehensif				
KLUSTER	**KLUSTER 1**	**KLUSTER 2**	**KLUSTER 3**	**KLUSTER 4**
PROGRAM	**Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga**	**Program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan masyarakat**	**Program Penanggulangan kemiskinan Berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil**	**Program lain yang berdampak meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin**
SASARAN	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja	penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil	Peningkatan kualitas penghidupan dan kesejahteraan masyarakat
KEGIATAN	1. Perlindungan sosial melalui Bansos (PKH, BLT, PIP, BPNT, BPJS Kesehatan) 2. Pemberian makanan/ nutrisi tambahan (bagi ibu hamil, balita dan anak sekolah) 3. Aksesibilitas layanan kesehatan (promosi kesehatan, vaksinasi, dan pengobatan) 4. Penanganan anak tidak sekolah/putus sekolah (edukasi, beasiswa, affirmasi, dan transportasi sekolah) 5. Pemukiman yang layak, bersih, dan sehat 6. Peningkatan akses air bersih 7. Bantuan subsidi gas/ subsidi energi listrik	1. rehabilitasi sanitasi dan pembangunan sanitasi komunal 2. Program Padat Karya 3. Pelatihan ketrampilan kewirausahaan dan inovasi produksi 4. Membangun Industri lokal dan perluasan kesempatan kerja 5. Bantuan Kompensasi kepada masyarakat dampak pembangunan 6. Bantuan modal dan peralatan pertanian dan peningkatan kemampuan teknis pertanian	1. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dan Koperasi Desa 2. Bantuan Kredit Usaha/ modal bagi UMKM 3. Pelatihan inovasi produk, manajemen usaha, promosi, pemasaran, peningkatan kualitas dan daya tarik produk 4. Fasilitasi dan perlindungan usaha (HAKI, ijin usaha, jejaring kemitraan, Promosi produk UMKM, gerakan membeli produk lokal, dan perluasan pasar)	1. Pencegahan pernikahan dini dan pengendalian penduduk (KB) 2. Perbaikan infrastruktur jalan dan jalan usaha pertanian, dan konektivitas wilayah 3. Lingkungan Hidup (mitigasi resiko bencana lingkungan) 4. Perlindungan masyarakat dan Ketertiban Umum

bappeda.bandungbarat.go.id

Tabel 6.3. Rencana Aksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan KBB

Kluster 1 : Program Prioritas bantuan sosial terpadu berbasis keluarga **Sasaran :** Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar									
Kegiatan	**Indikator**	**Sumber Dana**	**Target Capaian (5 tahun)**					**Sinergitas para pihak**	**Urutan Prioritas Kelompok Penerima Manfaat**
Perlindungan sosial melalui Bansos (PKH, BLT, PIP, BPNT, BPJS Kesehatan)	Jumlah/persentase masyarakat yang memperoleh bantuan sosial secara tepat sasaran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten						- Dinas Sosial, - Dinas Pendidikan, - Dinas Kesehatan, - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Pemerintah Desa, - BPJS Kesehatan	**Berdasarkan data jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) terbanyak :** Cikalongwetan (7088) Cipongkor (6276) Gununghalu (5534) Rongga (4645) Sindangkerta (4551) Cipeundeuy (3859) Cihampelas (3616) Cipatat (3455) Cililin (3326) Lembang (2497) Ngamprah (2011) Padalarang (1918) Cisarua (1673) Batujajar (1100) Saguling (941) Parongpong (691)
Pemberian makanan/nutrisi tambahan (bagi ibu hamil, balita dan anak sekolah)	Jumlah/persentase ibu hamil, balita, dan anak sekolah dari keluarga miskin yang memperoleh makanan/nutrisi tambahan (makanan bergizi dan viamin)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, dana philantropi, swadaya masyarakat						- Dinas Kesehatan, - Dinas Pendidikan, - Swasta, NGO, Yayasan - Perguruan tinggi (program KKN dan PKM) - Masyarakat/Kelompok pengajian/DKM	**Berdasarkan data RTM resiko stunting:** Gununghalu (5494) Cikalongwetan (4953) Cipongkor (4197) Lembang (4028) Sindangkerta (3791) Cipatat (3567) Rongga (3487) Padalarang (3480)

bappelitbangda

									Cihampelas (3333) Cililin (3101) Cipeundeuy (2164) Cisarua (2103) Ngamprah (2083) Parongpong (1624) Batujajar (910) Saguling (881)
Aksesibilitas layanan kesehatan - Promotif (edukasi peningkatan kesehatan)	Jumlah/persentase masyarakat miskin yang memperoleh edukasi peningkatan kesehatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, dana philantropi, swadaya masyarakat						- Dinas Kesehatan, - Swasta, NGO, Yayasan, - Perguruan tinggi (program KKN dan PKM)	**Berdasarkan data wilayah potensi KLB** Cipongkor Ngamprah Parongpong Cikalong wetan Rongga Lembang Cisarua Gunung Halu Cililin Saguling Padalarang Sindangkerta Cihampelas Batujajar Cipeundeuy Cipatat
Kegiatan Preventif (Upaya pencegahan penyakit)	Jumlah/persentase masyarakat miskin yang memperoleh imunisasi/vaksin, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan vitamin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, dana philantropi, swadaya masyarakat						- Dinas Kesehatan, - Swasta, NGO, Yayasan, Perguruan tinggi (program KKN dan PKM)	
Kuratif (Upaya penyembuhan penyakit)	Jumlah/persentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan pengobatan dan terapi kesehatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, dana philantropi, swadaya masyarakat						- Dinas Kesehatan Swasta, Yayasan (bantuan biaya)	
Rehabilitatif (Upaya pemulihan kesehatan)	Jumlah/persentase masyarakat miskin yang memperoleh layanan pemulihan kesehatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, dana philantropi, swadaya masyarakat						- Dinas Kesehatan Swasta, Yayasan (bantuan biaya)	

bappelitbangda

(Lanjutan)
Kluster 1 : Program Prioritas bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
Sasaran : Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar

Kegiatan	Indikator	Sumber Dana	Target Capaian (5 tahun)					Sinergitas para pihak	Urutan Prioritas Kelompok Penerima Manfaat
Penanganan anak tidak sekolah/putus sekolah (Edukasi pentingnya pendidikan)	Jumlah rumah tangga miskin dengan anak tidak sekolah/putus sekolah yang mendapat edukasi Menurunnya angka DP dan LTM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, Dana Philantropi						- Dinas Pendidikan - Swasta, Yayasan Perguruan tinggi (program KKN dan PKM)	**Penanganan Berdasarkan data jumlah siswa DO dan LTM tertinggi** Cipatat (1821) Lembang (1593) Cikalong Wetan (1721) Cihampelas (1481) Padalarang (1388) Cililin (1246) Cisarua (1131) Gunung Halu (999) Cipeundeuy (979) Cipongkor (973) Ngamprah (913) Batu Jajar (855) Parongpong (833) Rongga (736) Sindang kerta (622) Saguling (393)
Bantuan beasiswa bagi anak tidak sekolah/Putus sekolah	Jumlah siswa miskin berprestasi (yang rentan tidak melanjutkan pendidikan) memperoleh beasiswa Menurunnya angka DP dan LTM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, Dana Philantropi						- Dinas Pendidikan - Dinas Sosial Swasta, Yayasan (bantuan biaya)	
Bantuan Transportasi anak sekolah gratis bagi keluarga miskin (utk kegiatan sehari-hari dan sekolah)	Jumlah/persentase siswa dan rumah tangga miskin yang memanfaatkan transportasi anak sekolah secara gratis Meningkatnya angka RLS	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, Dana Philantropi						- Dinas Pendidikan, - Dinas Perhubungan, - Pemerintah Desa, Swasta, NGO, Yayasan	

bappelitbangda

(Lanjutan) ***Kluster 1 : Program Prioritas bantuan sosial terpadu berbasis keluarga*** **Sasaran :** Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar									
Kegiatan	**Indikator**	**Sumber Dana**	**Target Capaian (5 tahun)**					**Sinergitas para pihak**	**Urutan Prioritas Kelompok Penerima Manfaat**
Afirmasi akses layanan pendidikan bagi siswa miskin dan kelompok rentan	Jumlah/persentase siswa miskin dan disabilitas yang mendapat afirmasi akses layanan pendidikan di seluruh satuan pendidikan milik pemerintah (tanpa aturan zonasi) Meningkatnya angka RLS	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, Dana Philantropi						- Dinas Pendidikan, - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Optimalisasi Pelaksanaan Pendidikan jarak jauh/ pendidikan persamaan bagi KK miskin	Jumlah/persentase KK rumah tangga miskin yang meningkatkan jenjang pendidikannya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi, swadaya masyarakat						Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Desa, Swasta, PKBM	**Berdasarkan data P3KE KK RTM yang berpendidikan menengah ke bawah (< PT/Akademi)** Cikalong Wetan (21814) Cipongkor (18298) Gunung Halu (16788) Cihampelas (15627) Cipatat (14724) Lembang (14455) Sindang Kerta (15398) Cipeundeuy (13435) Cililin (12774) Rongga (12744) Padalarang (11714) Ngamprah (10660) Cisarua (8148)

bappelitbangda

									Batu Jajar (7054) Parongpong (5851) Saguling (4225)
Pemukiman yang layak, bersih, dan sehat- Rumah layak huni (bangunan fisik- atap, lantai, dinding)	Jumlah/persentase rumah tangga miskin yang mendapat bantuan rutilahu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi, swadaya masyarakat						Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**Berdasarkan data kondisi rumah RTM (P3kE)** Gunung Halu Rongga Cikalong Wetan Cipongkor Sindang Kerta Cipatat Cipeundeuy Cililin Lembang Cihampelas, Cisarua Saguling Padalarang Ngamprah Parongpong Batu Jajar
Peningkatan akses air bersih	Jumlah/persentase rumah tangga miskin yang memperoleh akses air bersih	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi, swadaya masyarakat						Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**Priorias pada RTM yang menggunakan sumber sumur tdk terlindungi (data P3kE)** Gunung Halu (1203) Rongga (1097) Cikalong Wetan (711) Cipongkor (679) Sindang Kerta (661) Cililin (579) Lembang (576) Cipeundeuy (529) Cihampelas (505) Cipatat (262)

bappelitbangda

									Batu Jajar (130) Padalarang (124) Cisarua (123) Saguling (108) Ngamprah (108) Parongpong (19)
Bantuan subsidi gas/ subsidi energi listrik	Jumlah/persentase rumah tangga miskin yang memperoleh Bantuan subsidi gas/ subsidi energi listrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PLN	**Berdasarkan data jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) terbanyak :** Cikalongwetan (7088) Cipongkor (6276) Gununghalu (5534) Rongga (4645) Sindangkerta (4551) Cipeundeuy (3859) Cihampelas (3616) Cipatat (3455) Cililin (3326) Lembang (2497) Ngamprah (2011) Padalarang (1918) Cisarua (1673) Batujajar (1100) Saguling (941) Parongpong (691)
KLUSTER II : Program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan masyarakat									

bappelitbangda

SASARAN : meningkatkan kemampuan ekonomi dan pendapatan masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja **Keselarasan thd Capaian Target Visi Misi RPJPD KBB 2025-2045 : Penurunan Angka Kemiskinan dan Pendapatan per Kapita setara negara maju**									
Kegiatan	**Indikator**	**Sumber Dana**	**Target Capaian (5 tahun)**					**Sinergitas para pihak**	**Urutan Prioritas Kelompok Penerima Manfaat**
Bantuan sarana BAB (rehabilitasi sanitasi dan pembangunan sanitasi komunal)	Jumlah/persentase rumah tangga miskin yang meperoleh bantuan rehabilitasi sanitasi atau jumlah/persentase wilayah yang memperoleh bantuan pembangunan santitasi komunal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi, swadaya masyarakat						Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**Berdasarkan data kondisi rumah RTM (P3kE)** Gunung Halu (2845) Cikalong Wetan (1971) Cipatat (1860) Cipongkor (1819) Sindang Kerta (1445) Rongga (1437) Lembang (1265) Cihampelas (1236) Padalarang (1172) Cililin (1132) Ngamprah (901) Cipeundeuy (881) Parongpong (524) Saguling (486) Cisarua (450) Batu Jajar (356)
Program Padat Karya	Jumlah/persentase kepala keluarga rumah tangga miskin yang tidak bekerja/pekerja lepas yang mengikuti program padat karya	- APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa (untuk pembangunan yg dilakukan oleh pemerintah) - Swasta (utk pembangunan yang dilakukan oleh swasta)						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Pemukiman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**Berdasarkan data KK miskin yg berstatus pekerja lepas dan tidak bekerja (P3KE)** Cikalong Wetan (16.577) Cipongkor (14.563) Gunung Halu (12.959) Cipatat (11.551) Cipeundeuy (9980) Sindang kerta (9668) Cililin (9353) Lembang (9194) Rongga (8597)
Pelatihan ketrampilan	Jumlah/persentase anggota rumah	APBN, APBD Provinsi, APBD						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

bappelitbangda

kewirausahaan dan pembinaan usaha untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan inovasi produksi yang bernilai ekonomi	tangga (KK, istri, pemuda) yang meperoleh pelatihan dan jumlah siswa baru lulus yang memperoleh pelatihan	Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Swasta Perguruan Tinggi (KKN Tematik dan PKM integratif)	Padalarang (8431) Ngamprah (6881) Cisarua (5213) Batu Jajar (4519) Parongpong (3868) Saguling (3008)
Didirikannya Rumah ketrampilan Desa (dibawah pembinaan pemerintahan desa dan pendampingan kader PKK/posyandu)- Pelatihan tata rias/MUA, menjahit, kriya, desain/fashion, workshop pengolahan limbah, hilirisasi produk pertanian yang bernilai ekonomi)	Jumlah/persentase masyarakat miskin yang menjadi peserta pelatihan di Rumah ketrampilan Desa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Swasta Perguruan Tinggi (KKN Tematik dan PKM integratif)	
Bantuan modal bagi pelaku usaha baru (hasil pelatihan) berdasarkan seleksi kelayakan usaha	Jumlah/persentase masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan modal berdasarkan seleksi kelayakan usaha rintisan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Swasta	

bappelitbangda

Membangun Industri Produksi lokal dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah industri lokal yang dibangun dan jumlah anggota rumah tangga miskin yang terserap/bekerja pada insustri tersebut atau persentase penurunan pengangguran	Swasta						Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu	
Pemberian Bantuan modal dan peralatan untuk peningkatan kemampuan teknis pertanian dan perikanan	Jumlah/persentase petani miskin yang mendapat Bantuan modal dan peralatan pertanian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan	**Berdasarkan Data P3KE berdasarkan jenis pekerjaan KK RTM (Petani dan nelayan)** Rongga (2236) Sindangkerta (1752) Cisarua (1408) Lembang(1175) Gunung Halu (1075) Cipongkor (1043) Cikalong Wetan (892) Cililin (892) Cipeundeuy (780) Ngamprah (626) Saguling (544) Cipatat (463) Parongpong (341) Cihampelas (252) Padalarang (187) Batujajar (146)
Fasilitasi kerjasama Pengelolaan hutan	Jumlah kelompok petani kopi dan petani perkebunan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten						Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas	**Berdasarkan Data P3KE berdasarkan jenis pekerjaan KK RTM (Petani)**

bappelitbangda

berbasis masyarakat (PHBM)	dari RT miskin yang bekerjasama dengan Perhutani dalam pengelolaan PHBM							Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Desa, NGO, swasta, masyarakat	Rongga (2228) Sindangkerta (1750) Cisarua (1402) Lembang (1172) Gunung Halu (1072) Cipongkor (1039) Cikalong Wetan (887) Cililin (868) Cipeundeuy (716) Cipatat (463)
Pemberian Bantuan Kompensasi kepada masyarakat dampak pembangunan	Jumlah/persentase rumah tangga miskin yang mendapat Kompensasi dampak pembangunan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu	**Kompensasi diberikan kepada masyarakat miskin terdampak pembangunan**
KLUSTER III : Program Penanggulangan kemiskinan Berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil **Sasaran : penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil** **Keselarasan thd Capaian Target Visi Misi RPJPD KBB 2025-2045 : Pendapatan per Kapita setara negara maju dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**									
Kegiatan	**Indikator**	**Sumber Dana**	**Target Capaian (5 tahun)**					**Sinergitas para pihak**	**Urutan Prioritas Kelompok Penerima Manfaat**
Peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dan Koperasi Desa	Jumlah/Persentase BUMDes/Koperasi Desa yang maju dan mesejahterakan masyarakat desa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	**Berdasarkan data indeks Ekonomi Desa Membangun 2024 (utk IKE < 0,70)** Kecamatan Cisarua : 1. Desa Sadang Mekar (0,62) 2. Pasirlangu (0,65),

bappeltbandung

									3. Pada Asih (0,67) Kecamatan Cikalong Wetan : 1. Tenjolaut (IKE 0,68), 2. Kanangasari (0,67), 3. Ganjar Sari (0,63) Kecamatan Cipeundeuy 1. Desa Sukahaji (IKE 0,68) Kecamatan Ngamprah: 1. Ngamprah (IKE 0,63), 2. Cimanggu (IKE 0,6), 3. Bojong Koneng (IKE 0,65), 4. Mekarsari (IKE 0,68) Kecamatan Cihampelas: 1. Cipatik (IKE 0,68), 2. Situwangi (IKE 0,63) Kecamatan Cililin 1. Budiharja (IKE 0,67), 2. Karang Anyar (IKE 0,53), 3. Karya Mukti (IKE 0,58), 4. Nanggerang (IKE 0,55), 5. Kidang Panandjung (IKE 0,52) Kecamatan Cipongkor 1. Mekarsari (IKE 0,68), 2. Neglasari (IKE 0,63), 3. Cintaasih (IKE 0,61) Kecamatan Rongga 1. Sukaresmi (IKE 0,68), 2. Cibitung (IKE 0,65), 3. Cicadas (IKE 0,6) Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat (IKE 0,68)

bappelitbangda

									Kecamatan Sindangkerta 1. Buninagara (IKE 0,63), 2. Wangunsari (IKE 0,61) Desa Sindangjaya Gununghalu (IKE 0,68)
Bantuan Kredit Usaha/ modal bagi UMKM	Jumlah/Persentase KK RTM (pekerjaan sbg pedagang) yang mendapat Bantuan Kredit Usaha/ modal bagi UMKM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**Berdasarkan data jenis Pekerjaan KK RTM sebagai pedagang (P3KE)** Cikalong Wetan (1212) Cihampelas (1016) Cililin (1005) Lembang (946) Gunung Halu (899) Cipongkor (756) Padalarang (717) Cipatat (640) Ngamprah (623) Cipeundeuy (598) Rongga (579) Sindangkerta (561) Batu Jajar (444) Parongpong (442) Cisarua (388) Saguling (125)
Dibentuknya inkubator untuk pembentukan usaha baru, inovasi usaha, pengembangan usaha	Jumlah wirausaha baru dari hasil inkubator bisnis	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Swasta, NGO	
Pelatihan inovasi produk, manajemen usaha, promosi, pemasaran, peningkatan kualitas dan daya tarik produk	Jumlah/Persentase KK RTM (pedagang) yang memperoleh Pelatihan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Swasta, NGO Perguruan Tinggi (Program KKN tematik dan PKM integratif)	
Fasilitasi ijin usaha, bagi UMKM dari RT Miskin	Jumlah/Persentase KK RTM (pedagang) yang memperoleh Fasilitasi ijin usaha	APBD Kabupaten						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Fasilitasi dan perlindungan	Jumlah/Persentase KK RTM (pedagang) yang	APBD Kabupaten						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

bappelitbangda

melalui pendaftaran HAKI,	memperoleh Fasilitasi HAKI atas produk inovasinya							Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Fasilitasi pembinaan usaha dan perluasan jejaring kemitraan, strategis dengan swasta untuk memperoleh bahan baku murah dan kemitraan pemasaran	Peningkatan jumlah/persentase kemitraan UMKM untuk bahan baku murah yang difasilitasi pemerintah	APBD Kabupaten, APBDesa, CSR						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, swasta	
	Peningkatan jumlah/persentase wilayah pemasaran produk usaha RTM	APBD Kabupaten, APBDesa, CSR						Dinas Perindustrian dan Perdagangan, swasta	
Fasilitasi pembentukan asosiasi bisnis lokal (UMKM) untuk memperkuat bisnis online	Jumlah asosiasi bisnis lokal yang terbentuk	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, swasta	
Penguatan pasar lokal (Festival pertanian, bazaar, pasar pemerintah)	Jumlah festival, bazaar, dan pasar pemerintah yang diadakan untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM lokal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, swasta	**Berdasarkan data jenis Pekerjaan KK RTM sebagai pedagang (P3KE)** Cikalong Wetan (1212) Cihampelas (1016) Cililin (1005) Lembang (946) Gunung Halu (899) Cipongkor (756) Padalarang (717) Cipatat (640) Ngamprah (623) Cipeundeuy (598)
Pemanfaatan produk UMKM dari RT Miskin pada setiap kegiatan pemerintah	Jumlah/persentase kegiatan pemerintah yang memanfaatkan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

bappelitbangda

	produk UMKM dari RT Miskin								Rongga (579) Sindangkerta (561) Batu Jajar (444) Parongpong (442) Cisarua (388) Saguling (125)
Promosi produk UMKM lokal pada pasar domestik dan internasional	Jumlah event yang memperkenal produk UMKM lokal di tingkat nasional dan internasional	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
KLUSTER IV : Program lain yang berdampak meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin **SASARAN : meningkatkan kualitas penghidupan dan kesejahteraan masyarakat** **Keselarasan thd Capaian Target Visi Misi RPJPD KBB 2025-2045 : Peningkatan daya saing SDM dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**									
Kegiatan	**Indikator**	**Sumber Dana**	**Target Capaian (5 tahun)**					**Sinergitas para pihak**	**Urutan Prioritas Kelompok Penerima Manfaat**
Pencegahan pernikahan dini dan pengendalian penduduk (KB)	Menurunnya persentase pertumbuhan penduduk dan persentase pernikahan dini/anak	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak	**Pencegahan dimulai dari kecamatan yang angka pernikahan dini yang termasuk tinggi**
Pengendalian inflasi, stabilitas harga dan pasokan bahan pokok	Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tingkat inflasi yang seimbang	APBD Kabupaten						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**Seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat Termasuk masyarakat miskin**
	Harga-harga bahan pokok yang stabil								
Perbaikan infrastruktur jalan dan jalan usaha pertanian, irigasi, dan konektivitas wilayah	Jumlah/persentase infrastruktur jalan dan irigasi dalam kondisi baik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa,						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Seluruh masyarakat miskin terdampak**
	Bertambahnya ruas jalan baru yang terkoneksi								

bappelitbangda

	dan memudahkan mobilitas masyarakat								
Lingkungan Hidup (mitigasi resiko bencana lingkungan) Pelatihan mitigasi Bencana	Jumlah/persentase RT Miskin yang memperoleh pelatihan mitigasi bencana	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Seluruh masyarakat miskin terdampak**
Edukasi Pencegahan potensi Bencana (Banjir, Kebakaran, longsor)	Jumlah/persentase RT Miskin yang memperoleh edukasi pencegahan potensi bencana	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, CSR, Dana Philantropi						Badan Penanggulanan Bencana Daerah	**Seluruh masyarakat miskin terdampak**
Perlindungan masyarakat dan ketertiban umum bagi RTM miskin dan UMKM	Jumlah/persentase RT Miskin/ pedagang miskin yang merasa terlindungi dari ancaman kekerasan/ kriminalitas/ pemerasan/ penindasan/ Premanisme	APBD Kabupaten						Satuan Polisi Pamong Praja	**Seluruh masyarakat miskin terdampak**

bappelitbangda

BAB 7
PENUTUP

Penyebab utama kemiskinan masyarakat Kabupaten Bandung Barat, adalah pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam keluarga. Menurut Bloom (2006), pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat memperbaiki cara berfikir yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas seseorang.

Pendidikan dapat membuat seseorang memiliki ketrampilan-ketrampilan hidup, yang menunjukkan kapasitas seseorang dalam mencari solusi atas masalah hidup yang dihadapinya. Kapasitas juga mempengaruhi kualitas produk/jasa yang dihasilkan seseorang. Dengan produktivitas tinggi berkorelasi terhadap meningkatkan pendapatan, jika produktivitas seseorang rendah maka akan pendapatan yang diperoleh pun akan rendah, sebaliknya semakin tinggi produktivitas seseorang, maka pendapatannya akan meningkat pula. Pendapatan yang rendah akan berdampak pada ketidak-mampuan daya beli, kualitas kesehatan, dan ketidak-mampuan berinvestasi untuk masa depan. Dalam keseluruhan, pendidikan berpengaruh terhadap kapasitas, produksi, pendapatan, daya beli, akses kesehatan sehingga berdampak pada kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, menguatkan pendidikan dan ketrampilan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Dalam penanggulangan kemiskinan, merujuk pada kebijakan nasional, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara:

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

bappelitbangda

2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta pengembangan dan jaminan keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
3. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat (akses pendidikan, kesehatan, pemukiman yang layak, infrastruktur pendukung lainnya)
4. mensinergikan kebijakan dan program sebagai kekuatan/keberhasilan penanggulangan kemiskinan.

Strategi di atas dijabarkan dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan, yang dibagi kedalam kelompok:

a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; serta
d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Strategi diatas menjadi dasar penyusunan rencana aksi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Rencana aksi disusun agar seluruh pemangku kepentingan (pemerintah pusat, daerah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat) dapat terlibat dalam upaya penghapusan kemiskinan serta menjadi panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan,

bappelitbangda

sehingga bisa lebih tepat dalam mengidentifikasi prioritas program dan kegiatan, mengidentifikasi prioritas wilayah dan mengidentifikasi prioritas penerima manfaat.

bappelitbangda

Daftar Referensi

Annur, R. A. (2013). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KECAMATAN JEKULO DAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013*. Dipublikasikan. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj

Aris. (n.d.). *Faktor Penyebab Kemiskinan dan Dampaknya*. Retrieved from gramedia.com: https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-kemiskinan/#google_vignette

Arsyad, L. (2010), Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.

Bloom, David; Canning, David and Chan, Kevin. (2006), Higher Education and Economic Development in Africa. Human Development Research, Vol. 5, No. 1, (PP: 25-90).

Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan,* (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2016),

Maharani, C., Amelia Ningrum, D., Eka Fatmawati, A., & Fadilla, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif. In *Journal of Macroeconomics and Social Development* (Vol. 1, Issue 3). https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd

Manangkalangi, L. K. (2020). Analisis Pengaruh Pdrb Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah (2000-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.

Molo, M. (1995). Kemiskinan: Konsep, Pengukuran dan Kebijakan. *Populasi*, 1-13.

Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. In *Jurnal Kependudukan Padjadjaran* (Vol. 10, Issue 1).

bappelitbangda

Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia .

Pujiharto, sugeng. (2021). PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA MANDIRI PANGAN (Studi Pada Kelompok Afinitas Sinar Rejeki Desa Tempuran Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang). *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang (SINOV)*, *4*(1), 25–36.

Ramadhan, N. I. (n.d.). *Pengertian Kemiskinan: Jenis, Penyebab dan Dampaknya*. Retrieved from gramedia.com: https://www.gramedia.com/literasi/kemiskinan/#google_vignette

Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). *EFEKTIVITAS KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR*.

Salma, M., Hartanti, N., & Kartono, D. T. (2019). ETOS KERJA MASYARAKAT MISKIN PEDESAAN (STUDI FENOMENOLOGI PADA MASYARAKAT DESA SEWUREJO KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR). In *Journal of Development and Social Change* (Vol. 2, Issue 1).

Salwa Fadhilah Haya, T. F. (2022). Dampak Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Journal of Economics and Business Management*, 55-68.

Sarjito, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Akses Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *JurnalIlmuSosial,PolitikdanPemerintahan*, 397-416.

Sinurat, R. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia . *Jurnal Registratie*, 87-103.

bappelitbangda

Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI DKI JAKARTA. In *Journal of Applied Business and Economic* (Vol. 5, Issue 4).

Yacoub, Y. (2012). *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*.

bappelitbangda

DOKUMENTASI KEGIATAN






November 09, 2024 9:16 AM


BABA PARFUME
November 09, 2024 10:22 AM






Quote
Orang yang tinggi akhlaknya walaupun rendah ilmunya lebih mulia dari orang yang banyak ilmunya tapi kurang akhlaknya.
Habib
UMAR BIN HAFIDZ

bar


November 16, 2024 2:27 PM



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, JL. Raya Padalarang - Cisarua KM 2 NgamprahKode Pos 40552 Tlp./Fax. (022) 27012821 E-mail: bappelitbangda.bandungbarat@gmail.com

Bandung Barat,11 November 2024

Nomor : 000.9/2230/Litbang
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Undangan Mengikuti FGD Online Potensi Wilayah dan Karakteristik Kemiskinan di Kewilayahan

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di
Tempat

Dalam rangka pengumpulan informasi bagi penyusunan Kajian Identifikasi Masalah Kemiskinan dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, dengan ini kami bermaksud menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) secara online.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang kehadirannya untuk berpartisipasi pada kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari /Tanggal : Jadwal terlampir.
Materi : Potensi Wilayah dan Karakteristik Kemiskinan di Wilayah Kecamatan (aspek-aspek diskusi, terlampir).
Link Zoom : https://bit.ly/FGDonline_kemiskinan
Catatan : 1. Camat dapat menugaskan pejabat/pegawai yang membidangi tugas terkait dengan masalah kemiskinan.
2. Camat menghadirkan seluruh Kepala Desa di wilayahnya masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Dra. Hj. RINA MARLINA
Pembina Tk.I/ IV-b

Tembusan :
1. Yth. Pj. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

bappelitbangda

Lampiran Undangan
Nomor : 000.9/2230/Litbang/2024
Tanggal : 11 November 2024

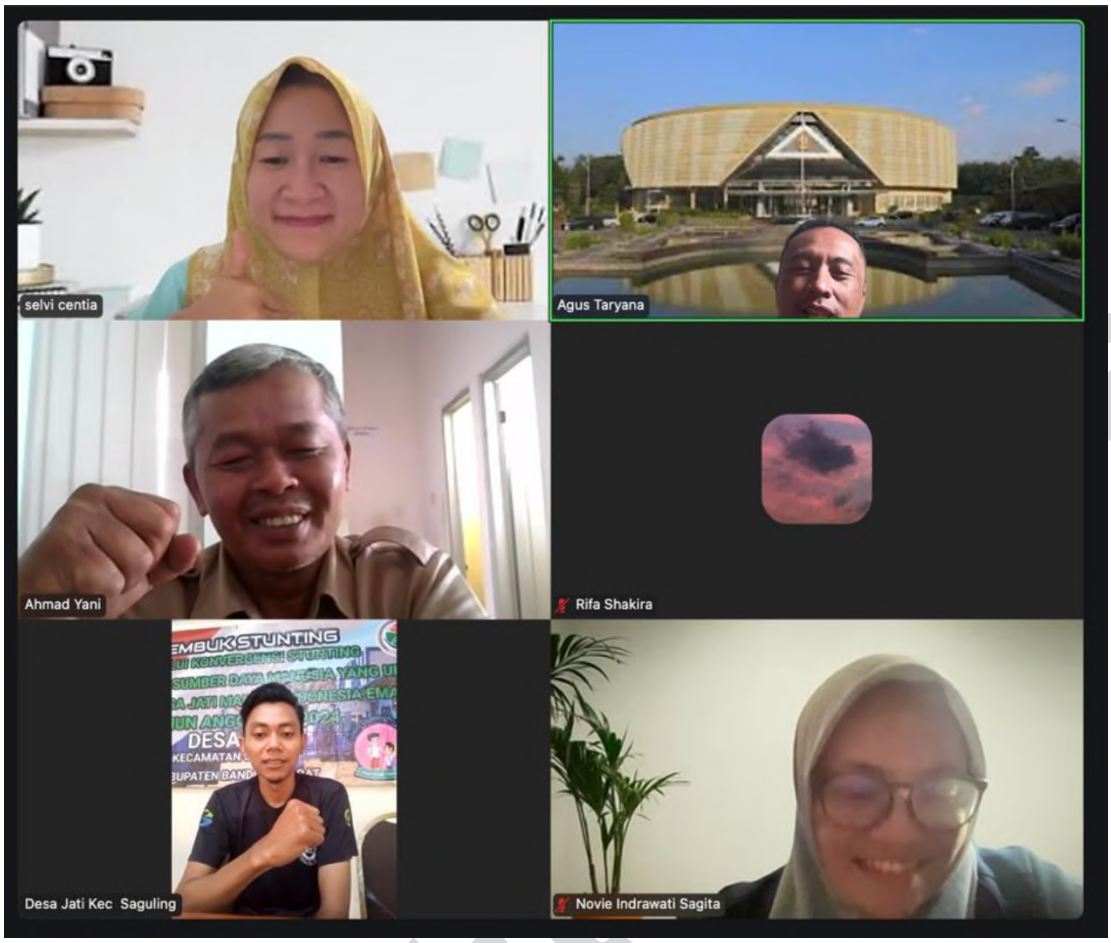
A. Jadwal *Focus Grup Discussion*

No.	Undangan	Tanggal	Waktu	Link Zoom
1.	Camat Sindangkerta	14 November 2024	09.00 - 11.00	https://bit.ly/FGDonline_kemiskinan
2.	Camat Saguling	14 November 2024	13.00 - 15.00	
3.	Camat Lembang	18 November 2024	09.00 - 11.00	
4.	Camat Parongpong	18 November 2024	13.00 - 15.00	
5.	Camat Cisarua	19 November 2024	09.00 - 11.00	
6.	Camat Ngamprah	19 November 2024	13.00 - 15.00	
7.	Camat Cipeundeuy	20 November 2024	09.00 - 11.00	
8.	Camat Padalarang	20 November 2024	13.00 - 15.00	
9.	Camat Batujajar	21 November 2024	09.00 - 11.00	
10.	Camat Cihampelas	21 November 2024	13.00 - 15.00	
11.	Camat Cililin	22 November 2024	09.00 - 11.00	
12.	Camat Rongga	22 November 2024	13.0 - 15.00	

B. Aspek-aspek Diskusi

Aspek	Hal yang ditanyakan
Sumber daya	1. Potensi-potensi alam yang ada di kewilayahan 2. Apakah potensi alam sudah dimanfaatkan secara optimal
Sosial-Budaya	1. Apakah ada tradisi atau aktvitas masyarakat yang dapat menjadi potensi sosial (ketrampilan, seni budaya masyarakat, tradisi budaya yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi) 2. Apakah masyarakat memiliki daya tahan yang tinggi dan tidak mudah menyerah/tekun?
Pendidikan	1. Tingkat pendidikan masyarakat ? 2. Apakah masyarakat dapat mengakses pendidikan? 3. Jika ada yang putus sekolah, faktor apa yang menjadi penyebab utama putus sekolah atau anak tidak sekolah?
Ekonomi	1. Jumlah masyarakat yang sudah bekerja dan jenis pekerjaan utama. 2. Apakah akses pekerjaan (kesempatanan pekerjaan) mudah diperoleh masyarakat ? 3. Jika pendapatan sehari-hari tidak mencukupi? Apakah masyarakat memiliki tabungan atau meminjam ke jasa pinjaman keuangan mikro (bank emok atau bank keliling, rentenir), ataukah memiliki pekerjaan sampingan? 4. Apakah masyarakat memiliki karakter kewirausahaan?
Kesehatan	1. Apakah masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dengan baik ? 2. Bagaimana dengan kualitas kesehatan masyarakat? Apakah ada yang memiliki riwayat penyakit menular dan/atau tidak menular (stroke, jantung, kanker, diabetes, cacat) yang dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat?

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.


selvi centia
Agus Taryana
Ahmad Yani
Rifa Shakira
Desa Jati Kec Saguling
Novie Indrawati Sagita


DEFINISI
PENYEBAB



bappelitbangda



bappelitbangda